



LAPORAN TAHUNAN 2024

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS

ISO 9001 : 2015
14001 : 2015
37001 : 2016



JL. RAYA PADANG — PAINAN KM. 16, KOTA PADANG, SUMATERA BARAT
TELEPON/FAX: (075 1) 75 1122 EMAIL: PPS.BUNGUS@KKP.GO.ID

Kata Pengantar



Widodo, S.Pi, M.Sc
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus

Puji dan syukur Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Tahun 2024" dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Tahunan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja baik keberhasilannya maupun hal-hal lain yang harus dilakukan peninjauan kembali agar dapat mencapai keberhasilan, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas PPS Bungus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai media pertanggung jawaban, laporan ini berisikan tentang Laporan Kegiatan Selama Tahun 2024. Seluruh hasil realisasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dituangkan secara transparan dan akuntabel dalam Laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna seperti yang diharapkan, untuk itu kami akan terus berupaya menyempurnakan dan penyajian Laporan Tahunan di masa yang akan datang.

Demikianlah laporan ini kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.

Bungus, Januari 2025

Kepala Pelabuhan
Perikanan Samudera Bungus



Widodo, S.Pi, M.Sc

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
Latar Belakang	2
Fungsi Pemerintahan.....	3
Fungsi Pengusahaan.....	3
Peranan Pelabuhan Perikanan	3
BAB II Pelaksanaan Kegiatan	4
Alokasi dan Realisasi Anggaran	5
Pelaksanaan Kegiatan	14
Analisis dan Penjelasan Realisasi Anggaran PPS Bungus Tahun 2024	20
Gambaran Umum.....	20
Analisis Berdasarkan Program Utama	20
Evaluasi dan Kesimpulan.....	20
Rekomendasi:.....	20
BAB 3 Perkembangan Capaian IKU	21
Capaian Kinerja	22
Analisa Capaian Kinerja	23
Sasaran Kinerja (SK) 1: Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	23
Indikator Kinerja (IK) 1 – Penerimaan PNBPN Non SDA di PPS Bungus	24
Sasaran Kinerja (SK) 2: Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Meningkat.....	28
Indikator Kinerja (IK) 2 – Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	28
Sasaran Kinerja (SK) 3: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing	31
Indikator Kinerja (IK) 3 – Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).....	32
Indikator Kinerja (IK) 4 – Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	34
Indikator Kinerja (IK) 5 – Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	37

Sasaran Kinerja (SK) 4: Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal	40
Indikator Kinerja (IK) 6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	40
Indikator Kinerja (IK) 7 – Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	42
Sasaran Kinerja (SK) 5: Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	45
Indikator Kinerja (IK) 8 - Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan.....	45
Sasaran Kinerja (SK) 6: Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	48
Indikator Kinerja (IK) 9 – Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan	48
Sasaran Kinerja (SK) 7: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	51
Indikator Kinerja (IK) 10 – Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan.....	51
Indikator Kinerja (IK) 11 – Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	55
Indikator Kinerja (IK) 12 – Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus ..	57
Indikator Kinerja (IK) 13 – Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	60
Indikator Kinerja (IK) 14 – Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	63
Indikator Kinerja (IK) 15 – Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	65
Indikator Kinerja (IK) 16 – Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	67
Indikator Kinerja (IK) 17 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	70
Indikator Kinerja (IK) 18 – Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera.....	72
Akuntabilitas Keuangan.....	76
BAB 4 Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan.....	77
Organisasi dan Tata Kerja PPS Bungus.....	78
Struktur Organisasi	78
Kepala Pelabuhan.....	79
Subbagian Umum.....	79

Tim Kerja	81
Kelompok Jabatan Fungsional	81
Komposisi Pegawai	82
Pendidikan dan Diklat Pegawai	83
Mutasi Pegawai dan Pensiun	84
Mutasi Pegawai	84
Pegawai Pensiun	86
Hubungan Kelembagaan	86
BAB 5 Keragaan Pelabuhan	88
Pelaksanaan Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) dan Kehumasan	89
Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)	89
Implementasi PIPP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	89
Data yang Dikelola dalam PIPP	89
Peran Kehumasan dalam Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	90
Tujuan Pembentukan Bagian Humas di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	90
Media Komunikasi dan Informasi	90
Kegiatan Edukasi di PPS Bungus	90
Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PPS Bungus	91
Pengembangan Kegiatan Edukasi di PPS Bungus	92
Pengelolaan Barang Milik Negara	92
Kegiatan Administrasi Persuratan dan Kearsipan	93
Kegiatan Pelayanan Publik Masyarakat Perikanan	94
Pelayanan Jasa Pelabuhan Perikanan	95
Pelayanan Jasa yang Berkaitan dengan PNBP	95
Pelayanan kepada Masyarakat Perikanan yang Tidak Berkaitan dengan PNBP	109
Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	110
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	123
Jumlah Nelayan dan Tenaga Kerja	124
Investasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	125
BAB VI Permasalahan Dan Upaya Pemecahan Masalah	127
Permasalahan yang Dihadapi	128
BAB VII Rencana Pembangunan Tahun 2025	129
Latar Belakang	130

Visi dan Misi Pembangunan	130
Isu Strategis dan Tantangan Terkini	130
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan 2025	131
Strategi Umum:	131
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas 2025	131
Kegiatan Fisik dan Infrastruktur	131
Kegiatan Non-Fisik dan Penguatan Tata Kelola.....	131
Ringkasan.....	132
BAB VIII Penutup	133
Kesimpulan	134
Saran	134
Penutup	135

Daftar Tabel

Tabel 1. Sumber dana dan Realisasi Penyerapan Anggaran terhadap Target Penyerapan anggaran pada TA. 2023	5
Tabel 2. Rincian Kertas Kerja PPS Bungus Tahun 2024	6
Tabel 3. Detail Realisasi Anggaran PPS Bungus Tahun 2024	14
Tabel 4. Capaian IKU PPS Bungus hasil Balanced Scorecard (BSC) Tahun 2024	22
Tabel 5. Target dan Realisasi Nilai PNBPN di PPS Bungus	24
Tabel 6. Capaian Penerima PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	25
Tabel 7. Analisa Efisiensi IKU Penerimaan PNBPN Non SDA di PPS Bungus	27
Tabel 8. Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus Tahun 2024	28
Tabel 9. Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus	29
Tabel 10. Analisa Efisiensi IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus	31
Tabel 11 Capaian Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	32
Tabel 12 Analisa Efisiensi Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	34
Tabel 13. Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	35
Tabel 14. Analisa Efisiensi Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	37
Tabel 15 Capaian Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	38
Tabel 16. Analisa Efisiensi Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	39
Tabel 17 Capaian Indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	40
Tabel 18. Analisa Efisiensi Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	42
Tabel 19 Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	43
Tabel 20. Analisa Efisiensi Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	44
Tabel 21 Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	45
Tabel 22. Analisa Efisiensi Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	47
Tabel 23 Capaian Indikator Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan	49
Tabel 24. Analisa Efisiensi Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan	50
Tabel 25 Capaian Indikator Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan	51
Tabel 26. Hasil Penilaian LKE WBK PPS Bungus	52
Tabel 27. Analisa Efisiensi Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan	54
Tabel 28 Capaian IK "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja" Tahun 2024	55
Tabel 29. Analisa Efisiensi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	56
Tabel 30 Capaian Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	57
Tabel 31. Aspek Penilaian Lembar Kerja Rekonsiliasi	57
Tabel 32. Analisa Efisiensi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	59
Tabel 33 Capaian Indikator IP ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	60
Tabel 34. Analisis Efisiensi Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	62
Tabel 35 Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	63
Tabel 36. Analisa Efisiensi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	64
Tabel 37 Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	65
Tabel 38. Analisa Efisiensi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	66
Tabel 39 Capaian Kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	68
Tabel 40. Analisa Efisiensi Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	69
Tabel 41 Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	70
Tabel 42. Analisa Efisiensi Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	72
Tabel 43. Capaian Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera	73
Tabel 44. Analisa Efisiensi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera	74
Tabel 45. Realisasi Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan PPS Bungus Tahun 2024	76
Tabel 46. Komposisi PNS, TKK dan Outsourcing Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	82
Tabel 47. Tingkat pendidikan pegawai di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	84

<i>Tabel 48. Daftar Pegawai Mutasi ke Unit Kerja Lain.....</i>	<i>85</i>
<i>Tabel 49. Jumlah Surat Tahun 2023 dan 2024.....</i>	<i>94</i>
<i>Tabel 50. Jenis dan Jumlah Pelayanan Kesyahbandaran di PPS Bungus</i>	<i>110</i>
<i>Tabel 51. Distribusi Air Bersih di PPS Bungus.....</i>	<i>113</i>
<i>Tabel 52. Data Penyaluran BBM Subsidi di PPS Bungus</i>	<i>114</i>
<i>Tabel 53. Penyaluran ES di PPS Bungus dalam Lima Tahun</i>	<i>116</i>
<i>Tabel 54. Kegiatan Bengkel PPS Bungus</i>	<i>117</i>
<i>Tabel 55. Pelayanan Jasa Listrik Tahun 2024</i>	<i>118</i>
<i>Tabel 56. Pelayanan Forklift Tahun 2024.....</i>	<i>118</i>
<i>Tabel 57. Penerimaan Jasa Kebersihan di PPS Bungus Tahun 2023 dan 2024</i>	<i>120</i>
<i>Tabel 58. Docking Tahun 2023 dan 2024.....</i>	<i>121</i>
<i>Tabel 59. Penerimaan Pas Masuk.....</i>	<i>122</i>
<i>Tabel 60. Kegiatan Tambat Labuh</i>	<i>123</i>
<i>Tabel 61. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024.....</i>	<i>124</i>
<i>Tabel 62. Jumlah tenaga kerja Non Nelayan di PPS Bungus tahun 2024.....</i>	<i>125</i>
<i>Tabel 63. Daftar Investor dan Lahan Industri Perikanan yang dimanfaatkan di PPS Bungus 2024</i>	<i>126</i>

Daftar Gambar

Gambar 1. Penerimaan PNBP 2024.....	24
Gambar 2. Capaian PPS Bungus Tahun 2020-2024.....	25
Gambar 3. Perbandingan Realisasi Capaian.....	25
Gambar 4. Capaian Volume Produksi Tahun 2024.....	28
Gambar 5. Capaian PPS Bungus Tahun 2020 – 2024.....	29
Gambar 6. Perbandingan Capaian.....	29
Gambar 7. Perbandingan dengan Satker Lain.....	32
Gambar 8 Capaian Tingkat Kinerja Tahun 2024.....	35
Gambar 9. Perbandingan Capaian.....	36
Gambar 10. Capaian PPS Bungus tahun 2020-2024.....	36
Gambar 11. Pelayanan Kesyahbandaran Tahun 2024.....	38
Gambar 12. Perbandingan dengan Satker Lain.....	38
Gambar 13. Perbandingan dengan Satker Lain.....	41
Gambar 14. Skor Penilaian aplikasi SELARASKAN tahun 2024.....	43
Gambar 15. Perbandingan Capaian.....	43
Gambar 16. Perbandingan dengan Satker Lain.....	43
Gambar 17. Capaian Kapal Perikanan Izin Daerah.....	46
Gambar 18. Perbandingan Tahun Sebelumnya.....	46
Gambar 19. Perbandingan dengan Satker Lain.....	46
Gambar 20. Perbandingan Dengan Tahun 2023.....	49
Gambar 21. Perbandingan dengan Satker Lain.....	49
Gambar 22. Capaian PPS Bungus Tahun 2020-2024.....	52
Gambar 23. Perbandingan Capaian.....	53
Gambar 24. Perbandingan Tahun Sebelumnya.....	58
Gambar 25. Perbandingan dengan Satker Lain.....	58
Gambar 26. Capaian PPS Bungus Tahun 2020 - 2024.....	61
Gambar 27. Perbandingan Capaian.....	61
Gambar 28. Capaian PPS Bungus Tahun 2021-2024.....	63
Gambar 29. Capaian PPS Bungus Tahun 2021-2024.....	65
Gambar 30. Perbandingan Capaian.....	66
Gambar 31. Capaian PPS Bungus Tahun 2020-2023.....	68
Gambar 32. Perbandingan Capaian.....	69
Gambar 33. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.....	71
Gambar 34. Capaian Nilai SKM PPS Bungus Tahun 2024.....	73
Gambar 35. Struktur Tim Kerja PPS Bungus 2024.....	78
Gambar 36. Struktur Organisasi.....	78
Gambar 37. Jumlah Surat Tahun 2023 dan 2024.....	94
Gambar 38. Grafik Pelayanan Kesyahbandaran di PPS Bungus 2023 dan 2024.....	110
Gambar 39. Distribusi Air Bersih di PPS Bungus.....	113
Gambar 40. Penyaluran BBM Subsidi.....	114
Gambar 41. Penyaluran ES di PPS Bungus dalam Lima Tahun.....	116
Gambar 42. Volume dan Nilai Kegiatan Bengkel.....	117
Gambar 43. Penerimaan Jasa Kebersihan di PPS Bungus Tahun 2023 dan 2024.....	120
Gambar 44. Grafik Pelayanan Docking.....	121



2
0
2
4

BAB 1

PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. TUGAS DAN FUNGSI PELABUHAN
- 1.3. PERANAN PELABUHAN

Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km², sektor kelautan dan Perikanan menjadi sangat strategis bagi Indonesia. Potensi pembangunan ekonomi kelautan Indonesia dikelola dengan inovatif dan baik menjadi salah satu sumber modal utama pembangunan, dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat Indonesia. Secara potensi, perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Kegiatan produksi perikanan terbagi menjadi dua yaitu perikanan tangkap (*capture fisheries*) dan perikanan budidaya (*aquaculture*). Kegiatan ekonomi kelautan dan Perikanan di Indonesia terbagi dalam 11 sektor ekonomi kelautan yaitu (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) pertambangan dan energi (ESDM), (6)

pariwisata bahari, (7) hutan bakau, (8) perhubungan laut, (9) sumberdaya wilayah pulau-pulau kecil, (10) industri dan jasa maritim, dan (11) SDA non-konvensional. Total potensi nilai ekonomi kesebelas sektor kelautan Indonesia itu diperkirakan sebesar 1,33 triliun dolar AS/tahun atau 1,3 kali PDB Indonesia saat ini atau 7 kali lipat APBN 2017. Lebih dari itu, potensi lapangan kerja yang bisa dihasilkan dari kesebelas sektor kelautan tersebut adalah sekitar 45 juta orang atau 35% dari total angkatan kerja Indonesia (126 juta orang, yang berusia antara 15 sampai 64 tahun). Sementara itu, tingkat pemanfaatan (pembangunan) ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan baru sekitar 25% dari total potensinya. Dengan kata lain, peluang untuk mengembangkan (*room for expansion*) ekonomi kelautan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa sejatinya masih sangat besar.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan serta merupakan penjabaran dari misi pembangunan nasional. Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap.
- 2 Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap.
- 3 Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap.
- 4 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Pelabuhan perikanan merupakan basis utama kegiatan industri perikanan tangkap yang harus dapat menjamin suksesnya aktivitas usaha perikanan tangkap di laut. Pelabuhan perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha dan berdayaguna tinggi. Pelabuhan perikanan yang modern setidaknya memberikan gambaran bahwa nelayan dan pengusaha perikanan kita benar benar memperhatikan kualitas produk perikanan. Aktivitas unit penangkapan ikan di laut, keberangkatannya dari pelabuhan harus dilengkapi dengan bahan bakar, perbekalan makanan, es dan lain-lain secukupnya. Dan

aktifitas tersebut juga perlu campur tangan dari pemerintah. Agar bisa menyediakan keperluan keperluan yang di inginkan nelayan sebelum berangkat ke laut, Informasi tentang data harga dari kebutuhan ikan di pelabuhan perlu dikomunikasikan dengan cepat dari pelabuhan ke kapal di laut. Setelah selesai melakukan pekerjaan di laut kapal akan kembali dan masuk ke pelabuhan untuk membongkar dan menjual ikan hasil tangkapan. Pola pelabuhan sebagai keluar masuknya unit penangkapan dalam hal ini kapal perikanan harus selalu terkontrol. Kontrol inilah yang setidaknya saling menguntungkan, baik untuk pemerintah maupun untuk pengusaha perikanan dan nelayan.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah salah satu dari 22 pelabuhan perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mempunyai visi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Perikanan Terpadu yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Sedangkan Misinya adalah 1) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Memadai dan Ramah Lingkungan, 2) Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah (*Value Added*) dan Daya Saing Produk Perikanan Untuk Kesejahteraan Nelayan, 3)

Meningkatkan Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan yang Akurat dan Update. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (PPS Bungus) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada dibawah pembinaan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mendukung kegiatan perikanan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, disamping melaksanakan tugas tersebut, Pelabuhan Perikanan juga menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan fungsi pengusaha.

Fungsi Pemerintahan

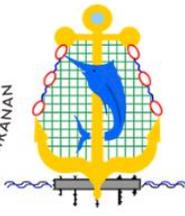
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a) Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; b) Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; c) Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; d) Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan; e) Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan; f) Pelaksanaan kesyahbandaran; | <ul style="list-style-type: none"> g) Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan; h) Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan; i) Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan; j) Pemantauan wilayah pesisir; k) Pengendalian lingkungan; l) Kepabeanan; dan/atau; m) Keimigrasian. |
|--|--|

Fungsi Pengusahaan

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a) Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; b) Pelayanan bongkar muat ikan; c) Pelayanan pengolahan hasil perikanan; d) Pemasaran dan distribusi ikan; e) Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan; | <ul style="list-style-type: none"> f) Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; g) Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; h) Wisata bahari; dan/atau i) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
|--|--|

Peranan Pelabuhan Perikanan

Merujuk pada fungsi-fungsi pelabuhan perikanan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan produksi perikanan yang berujung pada peningkatan pendapatan negara, pemerintah daerah, dan masyarakat nelayan. Pembangunan pelabuhan perikanan bertujuan sebagai penggerak utama ekonomi bagi masyarakat nelayan, memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi wilayah, dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sebagai pusat ekonomi perikanan, pelabuhan perikanan diharapkan mampu menghasilkan pendapatan sendiri melalui pelayanan jasa yang meliputi penggunaan fasilitas, jasa, dan barang. Selain itu, pelabuhan perikanan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan dan sekitarnya serta membuka peluang usaha baru karena aktivitas di pelabuhan.



2024

BAB 2

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 2.1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN**
- 2.2. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Alokasi dan Realisasi Anggaran

Anggaran Kegiatan Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

Pada tahun 2024 anggaran yang dialokasikan untuk Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahap pertama sesuai dengan DIPA PPS Bungus TA. 2024 Nomor: SP DIPA-032.03.2.531488/2024 tanggal 24 November 2023 yaitu sebesar **Rp. 16.155.295.000,-** (*Enam belas miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Pada Tahun anggaran 2024 Pengelola Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai Berikut :

- KPA : Widodo, S.Pi, M.Sc
- PPK : Bayu Eko Wibowo, S.St.Pi
- PPSPM : Risdianto, S.Kom
- Bendahara Pengeluaran: Eva Susanti
- Bendahara Penerimaan: Netti Hamidah

Adapun rincian kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Sumber dana dan Realisasi Penyerapan Anggaran terhadap Target Penyerapan anggaran pada TA. 2023

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi Anggaran Triwulan IV 2024	Persentase Realisasi Anggaran (%)
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.495.548.000,-	2.487.895.536,-	99,69%
1 Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	27.450.000,-	27.376.420,-	99,73%
2 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2.400.965.000,-	2.395.153.963,-	99,76%
3 Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	1.000.000,-	990.000,-	99%
4 Pengelolaan Sumber Daya Ikan	66.133.000,-	64.375.153,-	97,34%
Program Dukungan Manajemen	13.659.747.000,-	13.662.405.232,-	100,02%
5 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	13.659.747.000,-	13.662.405.232,-	100,02%

Pada tahun 2024, realisasi anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah mencapai Rp. 16.150.300.768,- atau 99,97% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 16.155.295.000,-. Dengan demikian, sisa anggaran yang belum terserap pada tahun ini adalah Rp. 4.994.232,- atau setara dengan 0,03% dari total pagu. Capaian ini mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan anggaran, dengan tingkat realisasi yang hampir maksimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan mendukung kelancaran operasional di sektor perikanan dan kelautan, maka kami telah menyusun tabel data anggaran yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alokasi dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Anggaran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan kapal perikanan, peningkatan kompetensi nelayan, pengelolaan pelabuhan perikanan, hingga dukungan manajemen dan tata kelola kelembagaan publik.

Melalui penyusunan anggaran ini, diharapkan dapat tercipta transparansi dalam penggunaan dana serta optimalisasi setiap program yang dijalankan guna mendukung keberlanjutan industri perikanan dan kesejahteraan para pemangku kepentingan di bidang ini. Dengan demikian, setiap pihak yang terlibat dapat memahami alokasi anggaran secara lebih sistematis dan akurat.

Tabel 2. Rincian Kertas Kerja PPS Bungus Tahun 2024

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	ANGGARAN
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		2.685.031.000
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan		38.000.000
2337.ACA	Perizinan Produk[Base Line]	40.0 Produk	25.000.000
	Lokasi : KOTA PADANG		
2337.ACA.001	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	40.0 Produk	25.000.000
052	Implementasi kebijakan bidang kapal perikanan		25.000.000
	<i>Pelaksanaan Pemeriksaan</i>		
	<i>Kelaikan/Pengukuran/Pengujian/Inspeksi Kapal Perikanan</i>		18.750.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		18.750.000
	<i>B</i>		
	<i>Alokasi Automatic Adjustment</i>		6.250.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		6.250.000
2337.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	33.0 Orang	13.000.000
	Lokasi : KOTA PADANG		
2337.BDC.001	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	33.0 Orang	13.000.000
052	Fasilitasi dan pembinaan peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan		13.000.000
	<i>Bimbingan Teknis Untuk Peningkatan Kompetensi Awak Kapal/Nelayan</i>		13.000.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		8.700.000
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>		1.000.000
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u>		3.300.000
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan		2.530.110.000
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi[Base Line]	1.0 Lembaga	1.818.016.000
	Lokasi : KOTA PADANG		
2338.BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	1.0 Lembaga	1.818.016.000
051	Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan		408.270.000
	<i>Pengelolaan dan Operasional Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan</i>		77.909.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		27.764.000
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.010-Padang)		2.000.000
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>		15.984.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		32.161.000
	<i>Pendampingan UPT Pusat Pada Pelabuhan Perikanan</i>		
	<i>Binaan dalam rangka Implementasi PIT dan PNBP Pasca</i>		61.293.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		4.988.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		56.305.000
	<i>Desimilasi Regulasi Kesyahbandaran dan Teman SPB di Pelabuhan Perikanan Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi dan Penangkapan Ikan Terukur</i>		19.803.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		7.353.000
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>		1.000.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	ANGGARAN
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u>		7.650.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>		3.800.000
E	<i>Sosialisasi dan Pendampingan Supervisi Operasional dalam menunjang pelaksanaan PNPB Pasca Produksi/Sistem Kontrak</i>		9.942.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		5.692.000
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>		2.000.000
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>		2.250.000
F	<i>Pelaksanaan Pemantauan dan Analisis di Pelabuhan Perikanan</i>		1.950.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		1.950.000
G	<i>Operasional Petugas Inspeksi Pengendalian Mutu</i>		1.989.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		1.989.000
J	<i>Penertiban Kolam Dan Alur Pelabuhan Dalam Rangka Peningkatan PNPB Tambat Labuh</i>		235.384.000
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>		235.384.000
052	Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan		32.650.000
B	<i>SOSIALISASI SHTI DI PELABUHAN PERIKANAN</i>		8.650.000
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>		1.000.000
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u>		7.650.000
C	<i>Alokasi Automatic Adjustment</i>		24.000.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		12.000.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>		12.000.000
053	Pelaksanaan tata kelola dan operasional cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan		39.254.000
A	<i>Pengelolaan dan Operasional Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran Ikan di Pelabuhan Perikanan</i>		14.020.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		8.056.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		5.964.000
B	<i>Sosialisasi CPIB di Pelabuhan Perikanan</i>		18.964.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		6.804.000
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>		1.000.000
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>		3.000.000
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u>		8.160.000
D	<i>Alokasi Automatic Adjustment</i>		6.270.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		4.570.000
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>		1.700.000
054	Pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di pelabuhan perikanan		1.112.488.000
A	<i>Pengelolaan dan Operasional Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) di Pelabuhan Perikanan</i>		10.252.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		1.855.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>		8.397.000
B	<i>SOSIALISASI PENGGUNAAN PORTAL GATE JASA PAS MASUK</i>		1.000.000
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>		1.000.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	ANGGARAN
C	<i>PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN PELANGGAN DAN KPI</i>		45.061.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		13.061.000
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>		17.000.000
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u>		15.000.000
D	<i>PERSIAPAN PENETAPAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK</i>		24.254.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		24.254.000
E	<i>Pengelolaan Operasional ISO 9001 di Pelabuhan Perikanan</i>		26.475.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		2.055.000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>		24.420.000
F	<i>HARMONISASI DATA PELAYANAN, REVIEW SOP DAN STANDAR PELAYANAN DI PELABUHAN PERIKANAN</i>		1.860.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		1.860.000
G	<i>Pengelolaan dan Operasional ISO 14001 di Pelabuhan Perikanan</i>		36.109.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		2.185.000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>		24.420.000
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>		1.555.000
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>		7.949.000
H	<i>LAYANAN DUKUNGAN APLIKASI SELARASKAN</i>		5.020.000
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>		850.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>		4.170.000
J	<i>Alokasi Automatic Adjustment</i>		21.765.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		13.690.000
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>		8.075.000
K	<i>PERJALANAN DALAM RANGKA TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS</i>		575.223.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		312.170.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		249.540.000
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>		13.513.000
L	<i>Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional</i>		14.985.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		14.985.000
M	<i>Perjalanan Mendukung Peningkatan PNPB</i>		295.983.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		295.983.000
N	<i>ISO 37001 : 2016 di PPS Bungus</i>		54.501.000
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>		54.501.000
055	Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan		174.180.000
A	<i>Operasional K5 di pelabuhan perikanan</i>		138.058.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		41.917.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		81.141.000
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>		15.000.000
C	<i>K5 di lokasi Bank Sampah Unit Sajameh</i>		24.122.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		24.122.000
D	<i>Alokasi Automatic Adjustment</i>		12.000.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>		12.000.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	ANGGARAN
056	Pelaksanaan tata kelola dan operasional SPDN di pelabuhan perikanan		23.053.000
A	<i>Pengelolaan dan Operasional Kegiatan SPDN di Pelabuhan Perikanan</i>		15.353.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		15.353.000
B	<i>Alokasi Automatic Adjustment</i>		7.700.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>		7.700.000
057	Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan		28.121.000
A	<i>Pengelolaan dan Operasional Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)</i>		4.933.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		1.983.000
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>		2.950.000
D	<i>Pendampingan dan Supervisi Operasional dalam menunjang pelaksanaan PNBP pasca produksi/sistem kontrak</i>		17.188.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		6.088.000
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>		2.100.000
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>		9.000.000
E	<i>Alokasi Automatic Adjustment</i>		6.000.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>		6.000.000
2338.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	1.0 Unit	119.210.000
	Lokasi : KOTA PADANG		
2338.RAL.001	Sarana penunjang pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang disediakan	1.0 Unit	119.210.000
052	Pelaksanaan pengadaan sarana penunjang pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang disediakan		119.210.000
A	<i>Sarana Penunjang Pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang Disediakan</i>		119.210.000
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>		18.680.000
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>		75.000.000
532121	<u>Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin</u>		25.530.000
2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	1.0 Unit	592.884.000
	Lokasi : KOTA PADANG		
2338.RBQ.001	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	1.0 Unit	592.884.000
051	Pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di UPT Pusat untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur		592.884.000
A	<i>REHABILITASI FASILITAS PELABUHAN</i>		592.884.000
533121	<u>Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan</u>		139.884.000
533121	<u>Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan</u>		443.288.000
534151	<u>Belanja Penambahan Nilai Irigasi</u>		9.712.000
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan		4.000.000
2339.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	20.0 Orang	4.000.000
	Lokasi : KOTA PADANG		
2339.QDC.003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	20.0 Orang	4.000.000
052	Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan)		4.000.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	ANGGARAN
A	<i>Pelaksanaan Fasilitas Pendanaan Usaha Nelayan melalui Pojok Pendanaan Nelayan</i>		4.000.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		1.000.000
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>		3.000.000
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan		112.921.000
2341.QGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi[Base Line]	1.0 Lembaga	71.136.000
	Lokasi : KOTA PADANG		
2341.QGA.001	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	1.0 Lembaga	71.136.000
051	Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur		71.136.000
B	<i>Operasional Unit Pengelola Perikanan LPP WPPNRI 572 Mendukung Perikanan Terukur di Zona Industri Perikanan</i>		41.423.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		90.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		41.333.000
C	<i>Automatic Adjustment</i>		29.713.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		29.713.000
2341.QKB	Pemantauan produk[Base Line]	220.0 laporan	41.785.000
	Lokasi : KOTA PADANG		
2341.QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	220.0 laporan	41.785.000
051	Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan		41.785.000
A	<i>Pengumpulan dan Verifikasi Data Logbook Penangkapan Ikan</i>		26.310.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		6.610.000
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>		1.600.000
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>		2.250.000
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u>		3.750.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>		12.100.000
B	<i>Alokasi Automatic Adjustment</i>		15.475.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		15.475.000
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen		13.853.229.000
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap		13.853.229.000
2342.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]	1.0 Unit	253.283.000
	Lokasi : KOTA PADANG		
2342.CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.0 Unit	253.283.000
051	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		253.283.000
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>		253.283.000
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>		253.283.000
2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	3.0 Layanan	13.066.187.000
	Lokasi : KOTA PADANG		
2342.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.0 Layanan	64.396.000
051	Evaluasi dan Penataan Organisasi di Lingkungan KKP		64.396.000
A	<i>FORUM KONSULTASI PUBLIK DAN PEMANTAUAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS</i>		37.198.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		10.291.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		13.407.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	ANGGARAN
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>		13.500.000
B	<i>Alokasi Automatic Adjustment</i>		27.198.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		27.198.000
2342.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.0 Layanan	8.802.000
053	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap		8.802.000
A	<i>LAYANAN DATA STATISTIK KELAUTAN DAN PERIKANAN</i>		8.802.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		2.303.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		6.499.000
2342.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan	12.992.989.000
001	Gaji dan Tunjangan		8.100.187.000
A	<i>PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN</i>		8.100.187.000
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u>		2.290.092.000
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u>		37.000
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u>		173.298.000
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u>		51.665.000
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u>		34.290.000
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u>		184.360.000
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u>		21.778.000
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u>		120.290.000
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u>		292.000.000
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u>		58.950.000
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u>		684.314.000
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u>		17.000
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u>		49.511.000
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u>		12.435.000
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u>		99.330.000
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u>		44.978.000
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u>		123.842.000
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u>		2.934.000.000
512414	<u>Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK</u>		925.000.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		4.892.802.000
B	<i>PERAWATAN JARINGAN, JALAN DAN MESIN</i>		641.920.000
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u>		397.553.000
523133	<u>Belanja Pemeliharaan Jaringan</u>		244.367.000
C	<i>PEMELIHARAAN PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN</i>		205.942.000
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u>		74.888.000
523119	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya</u>		131.054.000
D	<i>LANGGANAN DAYA DAN JASA</i>		1.185.014.000
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u>		1.134.483.000
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u>		50.531.000
E	<i>POS DAN GIRO</i>		634.000
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u>		634.000
F	<i>OPERASIONAL PERKANTORAN</i>		2.678.856.000
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u>		323.993.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	ANGGARAN
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u>		75.600.000
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>		279.600.000
522141	<u>Belanja Sewa</u>		152.131.000
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>		1.847.532.000
G	<i>PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI</i>		180.436.000
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>		180.436.000
2342.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	2.0 Unit, m2	229.019.000
	Lokasi : KOTA PADANG		
2342.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.0 Unit	96.304.000
051	Pengadaan sarana perkantoran		96.304.000
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>		96.304.000
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>		96.304.000
2342.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.0 Unit	132.715.000
051	Pengadaan dan Rehabilitasi prasarana perkantoran		132.715.000
A	<i>PENGADAAN DAN REHABILITASI PRASARANA PERKANTORAN</i>		132.715.000
533121	<u>Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan</u>		132.715.000
2342.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	1.0 Layanan	55.000.000
	Lokasi : KOTA PADANG		
2342.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1.0 Layanan	55.000.000
051	Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai		55.000.000
A	<i>MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DAN PENERAPAN DISPLIN PEGAWAI</i>		18.959.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		18.959.000
B	<i>PENGUATAN INTEGRITAS DAN SUBSTANSI TEKNIS BAGI PNS PENGANGKATAN TAHUN 2023</i>		2.536.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		2.536.000
C	<i>SOSIALISASI KEPEGAWAIAN TERKAIT TASPEN, KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI</i>		9.050.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>		6.550.000
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>		1.800.000
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>		700.000
D	<i>Alokasi Automatic Adjustment</i>		24.455.000
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>		830.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		23.625.000
2342.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	3.0 Layanan	249.740.000
	Lokasi : KOTA PADANG		
2342.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.0 Layanan	35.855.000
053	Penyusunan arsitektur informasi kinerja, sosialisasi dan bimbingan teknis perencanaan dan anggaran		35.855.000
A	<i>PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA RAKERNIS</i>		35.855.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>		35.855.000
2342.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.0 Layanan	29.762.000
052	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran		29.762.000
A	<i>MONEV DAN PELAPORAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</i>		29.762.000
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>		9.000.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	ANGGARAN
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		8.784.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>		11.978.000
2342.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Layanan	184.123.000
054	Pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap		184.123.000
A	<i>PELAPORAN KEUANGAN LINGKUP DITJEN PERIKANAN TANGKAP</i>		74.823.000
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>		2.895.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>		71.928.000
B	<i>Alokasi Automatic Adjustment</i>		109.300.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		109.300.000

Tabel data anggaran yang telah disusun di atas menggambarkan alokasi dana yang direncanakan untuk berbagai program strategis dalam sektor perikanan dan kelautan. Anggaran ini dirancang untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, peningkatan produktivitas, serta keberlanjutan ekosistem maritim. Dengan perencanaan yang matang, setiap program diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan. Selain itu, pengalokasian dana juga mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas guna memaksimalkan dampak positif bagi para pemangku kepentingan, termasuk nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir. Beberapa poin utama yang menjadi fokus dalam anggaran ini meliputi:

1

Pengelolaan Kapal Perikanan dan Perizinan

Dialokasikan untuk perizinan produk dan dokumen kapal perikanan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

2

Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi nelayan dan awak kapal melalui berbagai pelatihan serta pendampingan teknis.

3

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Dana difokuskan pada peningkatan operasional pelabuhan perikanan, pengelolaan kesyahbandaran, serta rehabilitasi fasilitas guna mendukung aktivitas perikanan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

4

Pengelolaan Perizinan dan Kenelayan

Fasilitasi pendanaan usaha nelayan menjadi salah satu program utama yang didanai guna meningkatkan akses permodalan bagi nelayan kecil.

5

Dukungan Manajemen dan Tata Kelola

Anggaran ini mencakup pengelolaan sarana teknologi informasi, pemantauan data logbook penangkapan ikan, serta pengelolaan sumber daya ikan secara lebih efisien.

Dengan adanya alokasi anggaran ini, diharapkan implementasi program-program tersebut dapat berjalan secara optimal sehingga memberikan dampak positif bagi pengembangan sektor perikanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Evaluasi dan pemantauan terhadap penggunaan anggaran juga akan dilakukan secara berkala guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal guna mendukung operasional serta pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, berikut disajikan rincian pelaksanaan anggaran tahun 2024 yang mencakup berbagai aspek pendanaan serta alokasi sumber daya untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan:

Tabel 3. Detail Realisasi Anggaran PPS Bungus Tahun 2024

URAIAN	PAGU	REALISASI	%
	16.155.295.000	16.150.300.768	99,97 %
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2.495.548.000	2.487.895.536	99,69 %
Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat			
HB.2337 Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	27.450.000	27.376.420	99,73 %
ACA Perizinan Produk	18.750.000	18.745.820	99,98 %
ACA.001 Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	18.750.000	18.745.820	99,98 %
052 Implementasi kebijakan bidang kapal perikanan	18.750.000	18.745.820	99,98 %
Pelaksanaan Pemeriksaan			
052.0A Kelaikan/Pengukuran/Pengujian/Inspeksi Kapal Perikanan	18.750.000	18.745.820	99,98 %
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.750.000	18.745.820	99,98 %
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	8.700.000	8.630.600	99,20 %
BDC.001 Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	8.700.000	8.630.600	99,20 %
052 Fasilitasi dan pembinaan peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan	8.700.000	8.630.600	99,20 %
052.0A Bimbingan Teknis Untuk Peningkatan Kompetensi Awak Kapal/Nelayan	8.700.000	8.630.600	99,20 %
521211 Belanja Bahan	8.700.000	8.630.600	99,20 %
HB.2338 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2.400.965.000	2.395.153.963	99,76 %
BGA Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	1.688.871.000	1.684.768.359	99,76 %
BGA.002 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	1.688.871.000	1.684.768.359	99,76 %
051 Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	395.620.000	395.613.447	100 %
051.0A Pengelolaan dan Operasional Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	75.909.000	75.905.120	99,99 %
521211 Belanja Bahan	27.764.000	27.763.000	100 %
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	15.984.000	15.984.000	100 %
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.161.000	32.158.120	99,99 %
051.0B Pendampingan UPT Pusat Pada Pelabuhan Perikanan Binaan dalam rangka Implementasi PIT dan PNBP Pasca	61.293.000	61.291.967	100 %
521211 Belanja Bahan	4.988.000	4.988.000	100 %
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	56.305.000	56.303.967	100 %
051.0D Desimilasi Regulasi Kesyahbandaran dan Teman SPB di Pelabuhan Perikanan Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi dan Penangkapan Ikan Terukur	11.153.000	11.152.560	100 %

URAIAN	PAGU	REALISASI	%
	16.155.295.000	16.150.300.768	99,97 %
521211 Belanja Bahan	7.353.000	7.352.560	99,99 %
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.800.000	3.800.000	100 %
051.0E Sosialisasi dan Pendampingan Supervisi Operasional dalam menunjang pelaksanaan PNBP Pasca Produksi/Sistem Kontrak	7.942.000	7.941.800	100 %
521211 Belanja Bahan	5.692.000	5.691.800	100 %
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000	2.250.000	100 %
051.0F Pelaksanaan Pemantauan dan Analisis di Pelabuhan Perikanan	1.950.000	1.949.800	99,99 %
521211 Belanja Bahan	1.950.000	1.949.800	99,99 %
051.0G Operasional Petugas Inspeksi Pengendalian Mutu	1.989.000	1.988.200	99,96 %
521211 Belanja Bahan	1.989.000	1.988.200	99,96 %
051.0J Penertiban Kolam Dan Alur Pelabuhan Dalam Rangka Peningkatan PNBP Tambat Labuh	235.384.000	235.384.000	100 %
522191 Belanja Jasa Lainnya	235.384.000	235.384.000	100 %
053 Pelaksanaan tata kelola dan operasional cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan	23.824.000	23.822.225	99,99 %
053.0A Pengelolaan dan Operasional Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran Ikan di Pelabuhan Perikanan	14.020.000	14.019.025	99,99 %
521211 Belanja Bahan	8.056.000	8.055.900	100 %
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.964.000	5.963.125	99,99 %
053.0B Sosialisasi CPIB di Pelabuhan Perikanan	9.804.000	9.803.200	99,99 %
521211 Belanja Bahan	6.804.000	6.803.200	99,99 %
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	3.000.000	100 %
054 Pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di pelabuhan perikanan	1.071.873.000	1.067.845.214	99,62 %
054.0A Pengelolaan dan Operasional Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) di Pelabuhan Perikanan	10.252.000	10.250.282	99,98 %
521211 Belanja Bahan	1.855.000	1.853.996	99,95 %
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.397.000	8.396.286	99,99 %
054.0C Pengukuran Indeks Kepuasan Pelanggan Dan KPI	28.061.000	28.060.100	100 %
521211 Belanja Bahan	13.061.000	13.060.100	99,99 %
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.000.000	15.000.000	100 %
054.0D Persiapan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK	24.254.000	24.253.130	100 %
521211 Belanja Bahan	24.254.000	24.253.130	100 %
054.0E Pengelolaan Operasional ISO 9001 di Pelabuhan Perikanan	26.475.000	26.475.000	100 %
521211 Belanja Bahan	2.055.000	2.055.000	100 %
522151 Belanja Jasa Profesi	24.420.000	24.420.000	100 %
054.0F Harmonisasi Data Pelayanan, Review Sop Dan Standar Pelayanan Di Pelabuhan Perikanan	1.860.000	1.860.000	100 %
521211 Belanja Bahan	1.860.000	1.860.000	100 %
054.0G Pengelolaan dan Operasional ISO 14001 di Pelabuhan Perikanan	36.109.000	36.107.081	99,99 %

URAIAN	PAGU	REALISASI	%
	16.155.295.000	16.150.300.768	99,97 %
521211 Belanja Bahan	2.185.000	2.184.881	99,99 %
522151 Belanja Jasa Profesi	24.420.000	24.420.000	100 %
522191 Belanja Jasa Lainnya	9.504.000	9.502.200	99,98 %
054.0H Layanan Dukungan Aplikasi Selaraskan	4.170.000	4.170.000	100 %
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.170.000	4.170.000	100 %
054.0K Perjalanan Dalam Rangka Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis	575.223.000	571.201.742	99,30 %
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	561.710.000	559.916.742	99,68 %
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.513.000	11.285.000	83,51 %
054.0L Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	14.985.000	14.985.000	100 %
521211 Belanja Bahan	14.985.000	14.985.000	100 %
054.0M Perjalanan Mendukung Peningkatan PNBP	295.983.000	295.981.879	100 %
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	295.983.000	295.981.879	100 %
054.0N ISO 37001 : 2016 di PPS Bungus	54.501.000	54.501.000	100 %
522191 Belanja Jasa Lainnya	54.501.000	54.501.000	100 %
055 Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan	162.180.000	162.115.063	99,96 %
055.0A Operasional K5 di pelabuhan perikanan	138.058.000	138.055.813	100 %
521211 Belanja Bahan	123.058.000	123.055.813	100 %
522191 Belanja Jasa Lainnya	15.000.000	15.000.000	100 %
055.0C K5 di lokasi Bank Sampah Unit Sajameh	24.122.000	24.059.250	99,74 %
521211 Belanja Bahan	24.122.000	24.059.250	99,74 %
056 Pelaksanaan tata kelola dan operasional SPDN di pelabuhan perikanan	15.353.000	15.352.110	99,99 %
056.0A Pengelolaan dan Operasional Kegiatan SPDN di Pelabuhan Perikanan	15.353.000	15.352.110	99,99 %
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.353.000	15.352.110	99,99 %
057 Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan	20.021.000	20.020.300	100 %
057.0A Pengelolaan dan Operasional Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)	4.933.000	4.932.500	99,99 %
521211 Belanja Bahan	1.983.000	1.982.500	99,97 %
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.950.000	2.950.000	100 %
057.0D Pendampingan dan Supervisi Operasional dalam menunjang pelaksanaan PNBP pasca produksi/sistem kontrak	15.088.000	15.087.800	100 %
521211 Belanja Bahan	6.088.000	6.087.800	100 %
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000	9.000.000	100 %
RAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	119.210.000	118.898.250	99,74 %
RAL.001 Sarana penunjang pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang disediakan	119.210.000	118.898.250	99,74 %
052 Pelaksanaan pengadaan sarana penunjang pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang disediakan	119.210.000	118.898.250	99,74 %
052.0A Sarana Penunjang Pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang Disediakan	119.210.000	118.898.250	99,74 %
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.680.000	93.645.750	99,96 %
532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	25.530.000	25.252.500	98,91 %
RBQ Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	592.884.000	591.487.354	99,76 %
RBQ.001 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	592.884.000	591.487.354	99,76 %

URAIAN	PAGU	REALISASI	%
	16.155.295.000	16.150.300.768	99,97 %
051 Pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di UPT Pusat untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	592.884.000	591.487.354	99,76 %
051.0A Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan	592.884.000	591.487.354	99,76 %
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	583.172.000	581.778.184	99,76 %
534151 Belanja Penambahan Nilai Irigasi	9.712.000	9.709.170	99,97 %
HB.2339 Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	1.000.000	990.000	99,00 %
QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.000.000	990.000	99,00 %
QDC.003 Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	1.000.000	990.000	99,00 %
052 Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan)	1.000.000	990.000	99,00 %
052.0A Pelaksanaan Fasilitasi Pendanaan Usaha Nelayan melalui Pojok Pendanaan Nelayan	1.000.000	990.000	99,00 %
521211 Belanja Bahan	1.000.000	990.000	99,00 %
HB.2341 Pengelolaan Sumber Daya Ikan	66.133.000	64.375.153	97,34 %
QGA Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah	41.423.000	39.743.202	95,94 %
QGA.001 Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	41.423.000	39.743.202	95,94 %
051 Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur	41.423.000	39.743.202	95,94 %
051.0B Operasional Unit Pengelola Perikanan LPP WPPNRI 572 Mendukung Perikanan Terukur di Zona Industri Perikanan	41.423.000	39.743.202	95,94 %
521211 Belanja Bahan	90.000	90.000	100 %
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.333.000	39.653.202	95,94 %
QKB Pemantauan produk	24.710.000	24.631.951	99,68 %
QKB.001 Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	24.710.000	24.631.951	99,68 %
051 Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan	24.710.000	24.631.951	99,68 %
051.0A Pengumpulan dan Verifikasi Data Logbook Penangkapan Ikan	24.710.000	24.631.951	99,68 %
521211 Belanja Bahan	6.610.000	6.602.400	99,89 %
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000	2.250.000	100 %
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.750.000	3.750.000	100 %
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12.100.000	12.029.551	99,42 %
WA Program Dukungan Manajemen	13.659.747.000	13.662.405.232	100,02 %
WA.2342 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	13.659.747.000	13.662.405.232	100,02 %
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	253.283.000	252.971.500	99,88 %
CAN.955 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	253.283.000	252.971.500	99,88 %
051 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	253.283.000	252.971.500	99,88 %
051.0A Tanpa Sub Komponen	253.283.000	252.971.500	99,88 %
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	253.283.000	252.971.500	99,88 %
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	13.015.460.000	13.019.497.910	100,03 %
EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	23.698.000	23.436.067	98,89 %

URAIAN	PAGU	REALISASI	%
	16.155.295.000	16.150.300.768	99,97 %
051 Evaluasi dan Penataan Organisasi di Lingkungan KKP	23.698.000	23.436.067	98,89 %
051.0A Forum Konsultasi Publik Dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas	23.698.000	23.436.067	98,89 %
521211 Belanja Bahan	10.291.000	10.030.000	97,46 %
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.407.000	13.406.067	99,99 %
EBA.963 Layanan Data dan Informasi	8.802.000	8.801.225	99,99 %
053 Pemantauan dan evaluasi pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	8.802.000	8.801.225	99,99 %
053.0A Layanan Data Statistik Kelautan Dan Perikanan	8.802.000	8.801.225	99,99 %
521211 Belanja Bahan	2.303.000	2.303.000	100 %
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.499.000	6.498.225	99,99 %
EBA.994 Layanan Perkantoran	12.982.960.000	12.987.260.618	100,03 %
001 Gaji dan Tunjangan	8.090.158.000	8.094.927.466	100,06 %
001.0A Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	8.090.158.000	8.094.927.466	100,06 %
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	2.280.063.000	2.290.071.200	100,44 %
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	38.000	34.305	90,28 %
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	173.297.000	173.296.970	100 %
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	51.665.000	51.519.868	99,72 %
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	34.290.000	34.290.000	100 %
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	184.360.000	184.360.000	100 %
511125 Belanja Tunj. PPH PNS	21.778.000	21.239.150	97,53 %
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	120.290.000	120.289.620	100 %
511129 Belanja Uang Makan PNS	292.000.000	289.782.000	99,24 %
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	58.950.000	58.950.000	100 %
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	684.314.000	684.296.400	100 %
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	17.000	15.572	91,60 %
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	49.511.000	49.509.620	100 %
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	12.435.000	12.434.882	100 %
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	99.330.000	99.330.000	100 %
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	44.978.000	44.972.820	99,99 %
511628 Belanja Uang Makan PPPK	123.842.000	123.809.000	99,97 %
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2.934.000.000	2.933.285.644	99,98 %
512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	925.000.000	923.440.415	99,83 %
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.892.802.000	4.892.333.152	99,99 %
002.0B Perawatan Jaringan, Jalan Dan Mesin	641.920.000	641.908.431	100 %
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	397.553.000	397.542.551	100 %
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan	244.367.000	244.365.880	100 %
002.0C Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Perkantoran	205.942.000	205.940.787	100 %
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	74.888.000	74.887.260	100 %
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Lainnya	131.054.000	131.053.527	100 %
002.0D Langganan Daya Dan Jasa	1.185.014.000	1.185.012.948	100 %
522111 Belanja Langganan Listrik	1.134.483.000	1.134.482.116	100 %
522112 Belanja Langganan Telepon	50.531.000	50.530.832	100 %
002.0E Pos Dan Giro	634.000	633.800	99,97 %
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	634.000	633.800	99,97 %
002.0F Operasional Perkantoran	2.678.856.000	2.678.407.706	99,98 %
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	323.993.000	323.562.783	99,87 %
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	75.600.000	75.600.000	100 %

URAIAN	PAGU	REALISASI	%
	16.155.295.000	16.150.300.768	99,97 %
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	279.600.000	279.598.320	100 %
522141 Belanja Sewa	152.131.000	152.125.000	100 %
522191 Belanja Jasa Lainnya	1.847.532.000	1.847.521.603	100 %
002.0G Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	180.436.000	180.429.480	100 %
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	180.436.000	180.429.480	100 %
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	229.019.000	228.741.420	99,88 %
EBB.951 Layanan Sarana Internal	96.304.000	96.209.520	99,90 %
051 Pengadaan sarana perkantoran	96.304.000	96.209.520	99,90 %
051.0A Tanpa Sub Komponen	96.304.000	96.209.520	99,90 %
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.304.000	96.209.520	99,90 %
EBB.971 Layanan Prasarana Internal	132.715.000	132.531.900	99,86 %
051 Pengadaan dan Rehabilitasi prasarana perkantoran	132.715.000	132.531.900	99,86 %
051.0A Pengadaan Dan Rehabilitasi Prasarana Perkantoran	132.715.000	132.531.900	99,86 %
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	132.715.000	132.531.900	99,86 %
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	30.545.000	29.791.874	97,53 %
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	30.545.000	29.791.874	97,53 %
051 Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai	30.545.000	29.791.874	97,53 %
051.0A Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Dan Penerapan Disiplin Pegawai	18.959.000	18.206.774	96,03 %
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Penguatan Integritas Dan Substansi	18.959.000	18.206.774	96,03 %
051.0B Teknis Bagi Pns Pengangkatan Tahun 2023	2.536.000	2.535.100	99,96 %
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.536.000	2.535.100	99,96 %
051.0C Sosialisasi Kepegawaian Terkait Taspen, Kode Etik Dan Disiplin Pegawai	9.050.000	9.050.000	100 %
521211 Belanja Bahan	6.550.000	6.550.000	100 %
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	1.800.000	1.800.000	100 %
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000	700.000	100 %
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	131.440.000	131.402.528	99,97 %
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	35.855.000	35.853.560	100 %
053 Penyusunan arsitektur informasi kinerja, sosialisasi dan bimbingan teknis perencanaan dan anggaran	35.855.000	35.853.560	100 %
053.0A Penyusunan Perencanaan Program Dan Anggaran Serta Rakernis	35.855.000	35.853.560	100 %
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	35.855.000	35.853.560	100 %
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	20.762.000	20.760.701	99,99 %
052 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran	20.762.000	20.760.701	99,99 %
052.0A Monev Dan Pelaporan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	20.762.000	20.760.701	99,99 %
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.784.000	8.782.996	99,99 %
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.978.000	11.977.705	100 %
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	74.823.000	74.788.267	99,95 %
054 Pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	74.823.000	74.788.267	99,95 %
054.0A Pelaporan Keuangan Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	74.823.000	74.788.267	99,95 %
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.895.000	2.895.000	100 %
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	71.928.000	71.893.267	99,95 %

Analisis dan Penjelasan Realisasi Anggaran PPS Bungus Tahun 2024

1 Gambaran Umum

Realisasi anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus tahun 2024 mencapai Rp16.150.300.768 dari total pagu sebesar Rp16.155.295.000, dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,97%. Ini menunjukkan efisiensi yang sangat tinggi dalam pelaksanaan anggaran, dengan hanya sedikit dana yang tidak terealisasi.

2 Analisis Berdasarkan Program Utama

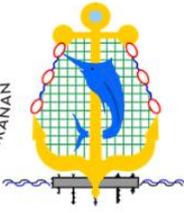
- Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan memiliki pagu sebesar Rp2.495.548.000 dan realisasi sebesar Rp2.487.895.536 (99,69%).
 - Salah satu sub-program penting adalah Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan dengan penyerapan sebesar 99,73%.
 - Realisasi tertinggi terlihat pada Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan, yang mencapai 99,98%.
- Program Pengelolaan Pelabuhan Perikanan memiliki pagu Rp2.400.965.000 dengan realisasi Rp2.395.153.963 (99,76%).
 - Sub-program dengan realisasi 100% antara lain:
 - Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
 - Pendampingan UPT Pusat pada Pelabuhan Perikanan Binaan
 - Sosialisasi dan Pendampingan Supervisi Operasional dalam menunjang pelaksanaan PNPB Pasca Produksi/Sistem Kontrak
 - Sub-program dengan penyerapan tertinggi adalah Penertiban Kolam dan Alur Pelabuhan dalam Rangka Peningkatan PNPB Tambat Labuh dengan 100%.
- Program Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan memiliki pagu Rp1.000.000 dan realisasi Rp990.000 (99,00%).
 - Salah satu sub-program penting adalah Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan yang terserap 99,00%.
- Program Pengelolaan Sumber Daya Ikan memiliki pagu Rp66.133.000 dengan realisasi Rp64.375.153 (97,34%).
 - Sub-program dengan penyerapan lebih rendah adalah Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI sebesar 95,94%.

3 Evaluasi dan Kesimpulan

- Efisiensi Anggaran: Dengan tingkat realisasi 99,97%, PPS Bungus menunjukkan efisiensi yang sangat tinggi dalam penggunaan anggaran.
- Sub-program dengan realisasi tertinggi: Mayoritas sub-program mencapai realisasi di atas 99%, dengan beberapa mencapai 100%, menandakan anggaran telah dimanfaatkan secara optimal.
- Sub-program dengan realisasi lebih rendah: Beberapa sub-program memiliki tingkat realisasi lebih rendah seperti Operasionalisasi LPP WPPNRI (95,94%) yang mungkin dipengaruhi oleh kendala administratif atau operasional.

4 Rekomendasi:

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi pada program dengan realisasi di bawah 99%.
- Memastikan kelancaran administrasi dan teknis untuk program yang masih mengalami keterlambatan.
- Mempertahankan efektivitas penggunaan anggaran yang telah berjalan baik selama tahun 2024.



2
0
2
4

BAB 3

CAPAIAN IKU

- 3.1. STAKEHOLDER PERSPECTIVE**
- 3.2. CUSTOMER PERSPECTIVE**
- 3.3. INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE**
- 3.4. LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE**
- 3.5. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Capaian Kinerja

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam hal ini merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) turut ikut serta dalam melaksanakan Visi, Misi dan Tujuan yang ingin dicapai oleh Ditjen Perikanan Tangkap dengan melaksanakan Sasaran Kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diturunkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap maupun yang ditetapkan sendiri oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Tabel 4. Capaian IKU PPS Bungus hasil Balanced Scorecard (BSC) Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta).	1.283,20	2.608,46	203,28%
2.	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	2. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton).	6.347	8.260,07	130,14%
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing	3. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi (Persen).	100	100	100%
		4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai).	84	91,08	108,43%
		5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).	81	100,55	124,14%
4.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal	6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).	57	100	175,44%
		7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai).	30,1	90,55	300,83%
5.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	8. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal).	412	685	166,26%
6.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	9. Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen).	30,15	39,81	132,04%
7.	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	10. Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan (nilai)	75	76,56	102,08%
		11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80	88	110%
		12. Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	94	98,78	105,09%
		13. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	84	92,99	110,70%
		14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80	96,29	120,36%
		15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80	90	112,50%
		16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	93,76	93,91	100,16%
		17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	71	90	126,76%
18.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera (Indeks)	88,3	91,37	103,48%	

Pembahasan masing – masing indikator akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut:

- 1 Membandingkan realisasi indikator triwulan I, II dan III tahun 2024 terhadap target capaian triwulan IV tahun 2024;
- 2 Membandingkan realisasi indikator tahun 2024 terhadap target tahun 2024; Membandingkan realisasi indikator tahun 2023 terhadap target indikator tahun 2024 yang merupakan awal RPJMN dan tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJMN. Hal ini didasarkan oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPS/Kepala Bappenas);
- 3 Membandingkan realisasi indikator tahun 2024 terhadap target indikator yang sifatnya standar nasional (apabila ada) dengan tujuan untuk mengukur pencapaian PPS Bungus terhadap capaian Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan capaian nasional;
- 4 Menyajikan analisa (penyebab) terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target tahun 2024 berdasarkan faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator;
- 5 Menyajikan besarnya jumlah sumberdaya yang digunakan berupa alokasi anggaran dalam upaya mencapai target indikator tahun 2024 sesuai dengan yang terdapat pada dokumen penganggaran (RKAKL).
- 6 Analisa ini terbatas pada internal process perspective dan learning and growth perspective dikarenakan kedua perspektif ini sifatnya proses dan input (masukan) yang dapat langsung diukur efeknya terhadap pencapaian indikator, sedangkan kedua perspektif lainnya yakni stakeholder perspective dan costumer perspective merupakan dampak atau hasil dari pencapaian indikator;
- 7 Menyajikan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator tahun 2024.

Analisa Capaian Kinerja

Pada Tahun 2023, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berbagai program dan inisiatif telah dijalankan untuk meningkatkan efektivitas layanan pelabuhan, mendukung operasional perikanan, serta memastikan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian setiap sasaran kegiatan dilakukan secara sistematis guna mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai serta tantangan yang masih perlu diatasi. Rincian evaluasi dan analisis terhadap setiap sasaran kegiatan diuraikan sebagai berikut

Sasaran Kinerja (SK) 1: Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran kinerja pertama (SK-1) yang akan dicapai adalah “Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Indikator Nilai PNBP PPS Bungus adalah seluruh penerimaan PPS Bungus yang merupakan pelaksanaan dari fungsi perusahaan PPS Bungus sebagai unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP PPS Bungus didasarkan pada PP Nomor 75 Tahun 2015 yang diperbaharui dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan. Ada dua jenis penerimaan di PPS Bungus, yakni penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Penerimaan fungsional di PPS Bungus, yaitu: Pelayanan Penggunaan tanah

dan bangunan, tanah yang dipakai di kawasan Pelabuhan perikanan, pelayanan penggunaan peralatan dan mesin, pelayanan peralatan di kawasan pelabuhan perikanan, pelayanan penggunaan peralatan pengolahan, pelayanan penggunaan transportasi, pelayanan tambat untuk kapal perikanan, pelayanan tambat untuk kepala non perikanan, pelayanan docking dengan perkerjaan, pelayanan perbaikan kapal, pelayanan pengadaan air, pelayanan bengkel pelayanan pas masuk harian, pelayanan pas masuk berlangganan, pelayanan kebersihan di kawasan pelabuhan, pelayanan kebersihan kolam pelabuhan, dan pendapat jasa lainnya.

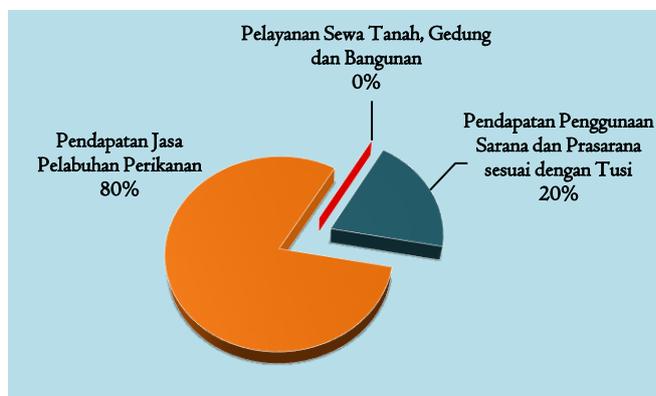
Indikator Kinerja (IK) 1 – Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Bungus

Target dan Realisasi

Indikator nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pendapatan yang diperoleh pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang berada di Pelabuhan Perikanan.

Tabel 5. Target dan Realisasi Nilai PNBP di PPS Bungus

Akun	Jenis Jasa	Target 2024 (Rp.)	Realisasi Triwulan IV (Rp.)
425131	Pelayanan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	317.175.000	512.081.472
	Pelayanan Penggunaan Tanah dan Bangunan	115.650.000	56.509.155
	Tanah yang dipakai di kawasan Pelabuhan Perikanan	41.450.000	4.705.500
	Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin	140.300.000	439.916.817
	Pelayanan peralatan di kawasan pelabuhan perikanan	7.500.000	7.200.000
	Pelayanan Penggunaan Peralatan Pengolahan	10.400.000	-
	Pelayanan Penggunaan Transportasi	1.875.000	3.750.000
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	966.029.000	2.096.377.523
	Pelayanan tambat untuk Kapal Perikanan	136.479.000	331.052.154
	Pelayanan Tambat untuk Kapal Non Perikanan	476.600.000	485.531.961
	Pelayanan Docking dengan Pekerja	68.000.000	117.062.800
	Pelayanan Perbaikan Kapal	55.400.000	165.931.320
	Pelayanan Pengadaan Air	31.000.000	229.912.480
	Pelayanan Bengkel	1.800.000	2.300.000
	Pelayanan Pas Masuk Harian	70.000.000	65.408.000
	Pelayanan Pas Masuk Berlangganan	28.500.000	41.760.000
	Pelayanan Kebersihan di Kawasan Pelabuhan	7.650.000	20.098.476
	Pelayanan Kebersihan Kolam Pelabuhan	62.000.000	69.286.750
	Pendapatan Jasa Lainnya	28.600.000	568.033.582
TOTAL PENERIMAAN		1.283.204.000	2.608.458.995

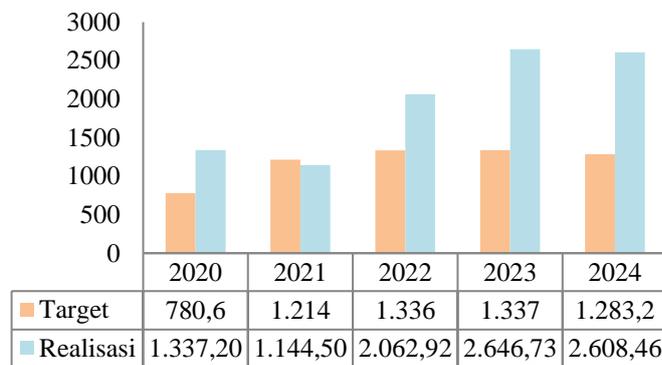


Gambar 1. Penerimaan PNBP 2024

Realisasi PNBP paling besar pada tahun 2024 berasal dari akun pendapatan jasa pelabuhan Perikanan dengan penerimaan terbanyak dari pelayanan tambat untuk kapal non perikanan sebesar Rp. 485.531.961,- (18,61%) dari total penerimaan tahun 2024. Sedangkan realisasi dari akun pendapatan penggunaan sarana dan prasarana, penerimaan terbanyak berasal dari Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 439.916.817,- atau sebesar 16,87% dari total penerimaan tahun 2024.

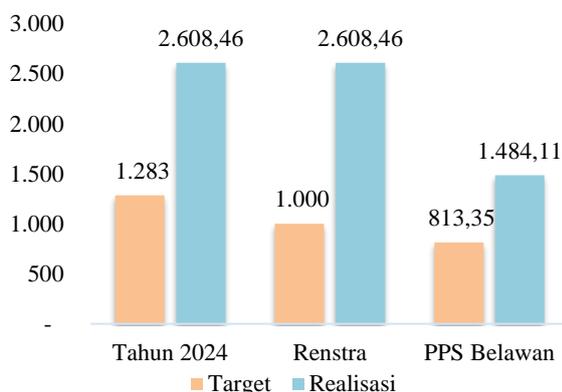
Tabel 6. Capaian Penerima PNBPNon SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 1	Nilai PNBPNon SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
IK 1	Penerimaan PNBPNon SDA di PPS Bungus									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus		
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
263,55	1.144,50	2.062,92	2.646,73	2.608,46	1.283,20	2.608,46	203,28	1.000	2.646,73	



Gambar 2. Capaian PPS Bungus Tahun 2020-2024

Berdasarkan data lima tahun terakhir penerimaan PNBPNon SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, terlihat tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan mencapai 1.337,2 juta, jauh di atas target sebesar 780,6 juta, mencerminkan awal yang positif dalam pengelolaan pelabuhan meskipun mungkin ada tantangan global seperti pandemi. Namun, pada tahun 2021, realisasi menurun menjadi 1.144,5 juta dan tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 1.214 juta. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor eksternal yang memengaruhi operasional pelabuhan. Tahun 2022 menjadi titik balik dengan peningkatan signifikan, di mana realisasi penerimaan mencapai 2.062,92 juta, jauh melampaui target sebesar 1.336 juta. Ini menunjukkan adanya perbaikan besar dalam operasional pelabuhan, seperti peningkatan fasilitas dan layanan yang lebih optimal. Tren ini terus berlanjut pada 2023, di mana realisasi mencapai 2.646,73 juta, lebih dari dua kali lipat dari target yang hanya sebesar 1.337 juta. Ini merupakan tahun dengan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir, menandakan kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan pelabuhan. Pada tahun 2024, meskipun target diturunkan sedikit menjadi 1.283,2 juta, realisasi penerimaan tetap tinggi, mencapai 2.608,46 juta. Pencapaian ini konsisten dengan tren peningkatan sejak 2022, menandakan bahwa PPS Bungus berhasil mempertahankan performa luar biasa dan terus mengoptimalkan pendapatan PNBPNon SDA. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa setelah sedikit penurunan pada 2021, pelabuhan berhasil bangkit dan mencatat peningkatan penerimaan yang signifikan, dengan capaian yang selalu melebihi target selama tiga tahun terakhir.



Gambar 3. Perbandingan Realisasi Capaian

Berdasarkan grafik perbandingan, capaian PNBPNon SDA tahun 2024 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menunjukkan kinerja yang sangat baik. Realisasi penerimaan PNBPNon SDA tahun 2024 mencapai 2.608,46 juta, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 1.283,2 juta. Jika dihitung dalam persentase, capaian ini sebesar 203,3% dari target, menunjukkan keberhasilan pelabuhan dalam mengelola dan mengoptimalkan layanan yang tersedia sehingga mampu menghasilkan penerimaan lebih dari dua kali lipat target yang ditetapkan. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis (Renstra) yang sebesar 1.000 juta, capaian ini juga sangat signifikan. PPS Bungus berhasil mencapai 260,8% dari target Renstra, yang menunjukkan bahwa pelabuhan ini tidak hanya memenuhi tetapi juga melampaui ekspektasi perencanaan jangka panjang yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan efisiensi dan strategi operasional yang sangat baik di PPS Bungus. Ketika dibandingkan dengan Pelabuhan Perikanan

Samudera Belawan, yang merupakan satuan unit kerja setara, capaian PPS Bungus juga jauh lebih unggul. PPS Belawan memiliki target sebesar 813,35 juta dan realisasi sebesar 1.484,11 juta, dengan persentase capaian 182,4% dari target. Meskipun PPS Belawan juga berhasil melampaui targetnya, realisasi PNBP di PPS Bungus hampir dua kali lebih besar dari PPS Belawan, menandakan bahwa PPS Bungus mampu mencapai performa yang lebih optimal dibandingkan satker lain yang sejenis. Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa PPS Bungus memiliki kinerja yang sangat baik pada tahun 2024, baik dibandingkan dengan target tahunannya, target Renstra, maupun satker setara seperti PPS Belawan. Pencapaian ini mengindikasikan pengelolaan pelabuhan yang efektif, inovasi dalam pelayanan, serta potensi besar dalam meningkatkan penerimaan PNBP.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian Penerimaan PNBP Non-SDA tahun 2024 di PPS Bungus didukung oleh komitmen dari petugas pelayanan jasa dan penagihan atas jasa pelayanan kepada stakeholder. Terlaksananya kegiatan pelayanan tambat untuk kapal non perikanan, pelayanan penggunaan peralatan dan mesin, pelayanan tambat untuk kapal perikanan, pelayanan pengadaan air dan pelayanan perbaikan kapal dengan maksimal menjadi penunjang capaian PNBP tahun 2024 di Perikanan Samudera Bungus. Dalam pencapaian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2024 di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus masih menghadapi sejumlah permasalahan, terutama terkait rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam mematuhi klausul kontrak perjanjian penggunaan tanah dan/atau

bangunan. Hal ini menjadi tantangan utama yang masih mempengaruhi optimalisasi penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus saat ini. Kepatuhan yang rendah ini mencerminkan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kewajiban mereka, yang berdampak negatif pada kelancaran operasional dan keberlanjutan pengelolaan fasilitas pelabuhan. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan para pelaku usaha terhadap perjanjian yang telah disepakati, melalui monitoring dan evaluasi yang lebih intensif, penegakan aturan yang lebih tegas, serta pengawasan yang lebih ketat agar realisasi PNBP dapat tercapai sesuai target yang diharapkan.

Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program atau kegiatan yang berperan penting dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini mencakup Pendampingan dan Supervisi Operasional. Pendampingan berfungsi sebagai sarana untuk memberikan bimbingan langsung kepada pelaku usaha atau pegawai terkait, membantu mereka memahami dan menerapkan kebijakan serta prosedur yang berlaku dengan lebih efisien. Melalui pendampingan, para pelaku usaha memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja mereka, serta meminimalisir risiko kesalahan atau ketidakpatuhan. Sementara itu, Supervisi Operasional bertindak sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan standar dan

regulasi yang ditetapkan. Supervisi ini meliputi pengawasan harian, audit berkala, serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja. Dengan pengawasan yang konsisten dan sistematis, potensi pelanggaran atau penyimpangan dapat segera diidentifikasi dan ditangani, sehingga mendukung pencapaian target IKU secara lebih efektif. Kombinasi antara Pendampingan dan Supervisi Operasional menciptakan lingkungan kerja yang lebih terstruktur dan terkendali, memastikan setiap proses berjalan dengan lebih efisien dan akuntabel. Hal ini tidak hanya mendukung langsung keberhasilan IKU, tetapi juga meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap komitmen organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya.

Selain itu, program Pendampingan dan Supervisi Operasional juga berperan dalam membentuk budaya kerja yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas. Pendampingan yang berkesinambungan memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan yang efektif, yang pada gilirannya akan mempercepat proses adaptasi terhadap perubahan kebijakan atau perkembangan teknologi. Supervisi yang baik juga mendorong setiap individu dalam organisasi untuk lebih bertanggung jawab atas peran mereka,

mengurangi peluang terjadinya kelalaian atau penyimpangan yang dapat menghambat kinerja operasional secara keseluruhan. Melalui penerapan kedua program ini, organisasi tidak hanya mampu meningkatkan kinerja secara internal, tetapi juga menunjukkan daya saing yang lebih tinggi di tingkat eksternal. Pendekatan yang terfokus pada kualitas dan akuntabilitas ini memungkinkan organisasi merespons tantangan dengan lebih proaktif, serta membangun reputasi yang kuat dalam menjaga standar operasional yang tinggi.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumberdaya pendukung meliputi 2 (dua) hal, yaitu anggaran dan sumber daya manusia.

Anggaran

Tabel 7. Analisa Efisiensi IKU Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Bungus	203,3%	119,210,000	118,898,250	242.353.930	123.455.680
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				104%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{104\%}{20} \times 50 \right)$				310%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Penerimaan PNBP Non SDA mencapai Rp. 118.898.250,-, atau sekitar 99,74% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 119.210.000,-. Tingginya tingkat realisasi ini mencerminkan optimalisasi penggunaan anggaran secara maksimal untuk mendukung berbagai layanan dan operasional terkait. Selain itu, tingkat efisiensi yang dicapai juga menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan Return on Investment (RO) sebesar 104% dan nilai efisiensi mencapai 310%. Hal ini menandakan bahwa setiap rupiah yang digunakan telah memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kinerja penerimaan PNBP Non SDA, sekaligus mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian IKU Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan hasil kerja sama yang solid antara berbagai elemen, terutama Tim Petugas Pelayanan Publik. Tim ini terdiri dari 11 orang pegawai yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan Jasa PNBP, dengan beberapa di antaranya menangani lebih dari satu jenis pelayanan guna memastikan efisiensi dan efektivitas operasional. Keberhasilan dalam mencapai indikator kinerja ini juga tidak terlepas dari dukungan teknologi, khususnya dengan diterapkannya aplikasi Sistem

Jasa Kepelabuhanan (SIJAKA). Aplikasi ini telah terintegrasi dengan Teman SPB dan Simponi, yang berperan penting dalam mengotomatiskan proses administrasi dan pembayaran. Integrasi sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih akurat serta meminimalisir potensi kesalahan dalam pembayaran tambat labuh, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PNBP di pelabuhan.

Sasaran Kinerja (SK) 2: Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Meningkat

Sasaran kinerja kedua (SK-2) yang akan dicapai adalah “Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

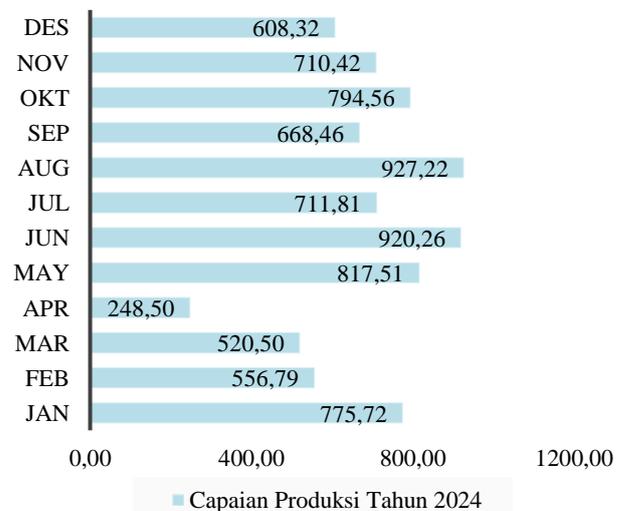
Indikator Kinerja (IK) 2 – Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Volume produksi perikanan tangkap merupakan jumlah produksi perikanan tangkap yang didaratkan di PPS Bungus. Pengumpulan data produksi dilakukan oleh petugas Pendataan di Pelabuhan Perikanan. Pendataan dilaksanakan oleh petugas pendataan terhadap produksi ikan yang didaratkan dengan menggunakan form monitoring data produksi harian. Data yang telah dikumpulkan kemudian diverifikasi, selanjutnya diolah oleh petugas pengelola data, serta dilaporkan secara berkala, baik harian, bulanan, dan triwulanan sebagai bentuk realisasi produksi perikanan tangkap.

Target dan Realisasi

Tabel 8. Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus Tahun 2024

No	Bulan	Volume Jumlah Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp. Juta)
1	Januari	775,72	7.068.189.000
2	Februari	556,79	5.736.793.000
3	Maret	520,50	5.638.154.000
4	April	248,50	2.941.161.000
5	Mei	817,51	8.871.914.000
6	Juni	920,26	9.757.392.000
7	Juli	711,81	9.186.581.000
8	Agustus	927,22	9.919.985.000
9	September	668,46	9.697.389.000
10	Oktober	794,56	9.951.366.000
11	November	710,42	7.937.626.000
12	Desember	608,32	6.370.503.000
Total		8.260,07	93.077.053.000

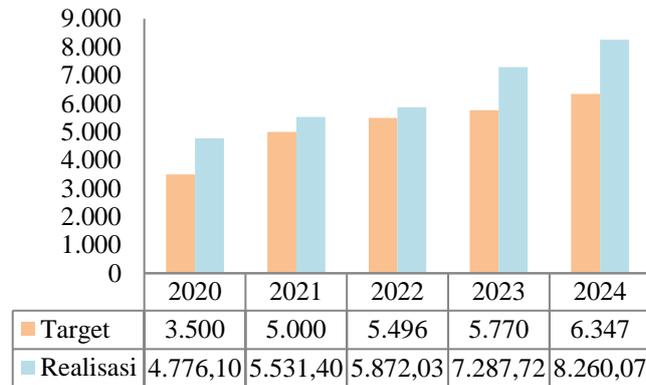


Gambar 4. Capaian Volume Produksi Tahun 2024

Berdasarkan grafik ini dapat terlihat bahwa Produksi tahun 2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan penurunan signifikan pada awal tahun, terutama pada bulan April yang mencapai titik terendah (248,50 ton). Produksi kemudian pulih secara drastis pada bulan Mei (817,51 ton) dan mencapai puncaknya di bulan Agustus (927,22 ton). Pada triwulan IV cenderung lebih stabil, meskipun terdapat sedikit penurunan di akhir tahun. Total produksi sepanjang tahun adalah 8.260,07 ton, dengan rata-rata bulanan 688,34 ton. Pola ini mengindikasikan adanya tantangan di awal tahun yang disebabkan oleh faktor musiman atau operasional, sementara pemulihan di pertengahan tahun mencerminkan perbaikan yang efektif. Stabilitas di akhir tahun memberikan peluang untuk mempertahankan atau meningkatkan produksi dengan mengelola fluktuasi secara lebih baik.

Tabel 9. Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus

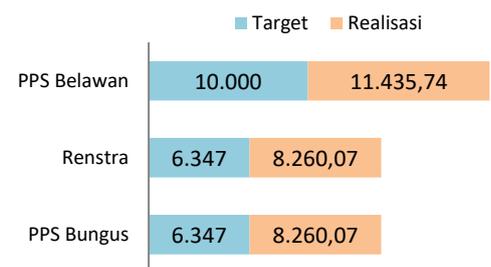
SK 2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Meningkat									
IK 2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus		
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
4.776,1	5.531,4	5.872,03	7.287,72	8.260,07	6.347	8.260,07	130,14	1.000	8.260,07	



Gambar 5. Capaian PPS Bungus Tahun 2020 – 2024

Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi volume produksi di PPS Bungus sebesar 3,84%. Ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja yang positif dalam hal produksi. Selain itu, dari sisi target yang ditetapkan, terlihat bahwa target volume produksi untuk tahun 2024 juga mengalami kenaikan sebesar $\pm 10\%$ dibandingkan dengan target tahun sebelumnya. Peningkatan target ini mencerminkan keyakinan terhadap kemampuan PPS Bungus untuk terus meningkatkan produksinya.

Berdasarkan data capaian produksi, terdapat perbedaan signifikan antara PPS Bungus dan PPS Belawan. Realisasi produksi di PPS Bungus mencapai 8.260,07 ton, melampaui target sebesar 6.347 ton, dengan peningkatan sekitar 30%. Sementara itu, PPS Belawan mencatat realisasi yang lebih tinggi, yaitu 11.435,74 ton, melampaui targetnya sebesar 10.000 ton dengan peningkatan sekitar 14,4%. Meskipun PPS Bungus menunjukkan pencapaian yang lebih besar secara persentase dibandingkan target, PPS Belawan memiliki volume produksi yang jauh lebih tinggi secara absolut. Hal ini menunjukkan bahwa PPS Belawan memiliki kapasitas produksi yang lebih besar, sedangkan PPS Bungus menunjukkan efisiensi yang signifikan dalam melampaui targetnya. Kedua lokasi ini mencerminkan kinerja yang baik, namun PPS Belawan berkontribusi lebih besar terhadap total produksi.



Gambar 6. Perbandingan Capaian

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan realisasi volume produksi di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus tidak terlepas dari sinergi yang efektif antara Kelompok Kerja Kesyahbandaran dan Kelompok Kerja Operasional. Kolaborasi ini menciptakan alur kerja yang efisien dan terintegrasi, memungkinkan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab masing-masing pihak secara optimal. Peran ini didukung oleh koordinasi yang solid, sehingga setiap hambatan operasional dapat segera diatasi.

Di samping itu, kontribusi petugas pendataan ikan juga memegang peranan penting. Dengan pemantauan lapangan dan dermaga secara konsisten, mereka tidak hanya memastikan kelancaran aktivitas bongkar muat, tetapi juga mencatat data hasil tangkapan dan nilai produksi dengan cermat. Ketelitian ini menjadi elemen kunci dalam mendukung validitas data dan perencanaan strategis untuk mencapai target volume produksi.

Peningkatan aktivitas kapal penangkapan ikan di wilayah PPS Bungus turut memperkuat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) volume produksi. Tingginya jumlah trip penangkapan

ikan, terutama pada Triwulan III, dengan puncaknya di bulan Agustus, menunjukkan intensitas operasional yang signifikan. Aktivitas yang intensif ini memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian volume produksi yang bahkan mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan realisasi volume produksi di PPS Bungus pada tahun 2024, beberapa tantangan eksternal perlu diantisipasi. Salah satu hambatan utama adalah kondisi cuaca yang tidak menentu, yang sering kali mengganggu operasional kapal penangkap ikan. Selain itu, fase terang bulan juga memengaruhi perilaku ikan, sehingga mengurangi efektivitas penangkapan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi adaptasi yang terencana dan fleksibel. Misalnya, penyusunan jadwal operasional yang mempertimbangkan prediksi cuaca dan fase bulan, serta penggunaan teknologi penangkapan yang lebih efisien. Dengan pendekatan yang tepat, dampak dari faktor eksternal dapat diminimalkan, sehingga target produksi tetap tercapai secara optimal tanpa mengorbankan aspek keberlanjutan sumber daya perikanan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator volume produksi pada tahun 2024 adalah :

- 1 **Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan serta Statistik Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap:** Program ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data statistik terkait produksi perikanan tangkap, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan berbasis data yang lebih akurat dan efektif;
- 2 **Pelaksanaan Pendataan Produksi Perikanan untuk Menunjang PNBP Pasca Produksi:** Dengan sistem pendataan yang lebih akurat dan terintegrasi, diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan PNBP pasca produksi, sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan hasil tangkapan;
- 3 **Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas Pelabuhan Perikanan:** Upaya ini mencakup pembangunan serta modernisasi infrastruktur pelabuhan guna meningkatkan kapasitas layanan bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Dengan fasilitas yang lebih memadai, efektivitas distribusi hasil tangkapan dapat meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan volume produksi;
- 4 **Koordinasi Antar-Stakeholder dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap:** Kerja sama yang erat antara pemerintah, nelayan, akademisi, dan pelaku industri perikanan sangat penting dalam menciptakan sistem perikanan tangkap yang lebih berkelanjutan. Melalui koordinasi yang baik, berbagai tantangan di sektor ini dapat diatasi dengan solusi yang lebih terarah dan berbasis kolaborasi;
- 5 **Sosialisasi dan Penerapan Kebijakan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan:** Untuk menjaga kelangsungan sumber daya ikan, sosialisasi kebijakan perikanan berkelanjutan dilakukan secara intensif kepada para nelayan dan pelaku usaha. Penerapan kebijakan ini mencakup pengelolaan kuota tangkapan, zona perlindungan, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
- 6 **Penguatan Program Pemberdayaan Nelayan dan Kelompok Usaha Perikanan:** Dukungan terhadap nelayan dan kelompok usaha perikanan menjadi aspek penting dalam meningkatkan produksi. Program ini mencakup pelatihan keterampilan, bantuan permodalan, serta fasilitasi akses pasar, sehingga nelayan dapat lebih mandiri dan memiliki daya saing yang lebih baik di industri perikanan.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, diperlukan sumber daya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya ini mencakup anggaran untuk mendukung operasional serta sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam mengelola layanan dan fasilitas pelabuhan. Dengan sinergi yang baik antara keduanya, diharapkan target volume produksi dapat tercapai secara optimal.

Anggaran

Tabel 10. Analisa Efisiensi IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus	130,14%	149.640.000	110.614.153	194.741.496	84.127.343
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				56,22%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{56,22\%}{20} \times 50 \right)$				190,55%	

Realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus mencapai 73,92% dari total alokasi sebesar Rp. 149.640.000,-. Tingkat penyerapan ini mencerminkan efektivitas penggunaan dana dalam mendukung operasional serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan produksi perikanan tangkap di PPS Bungus. Selain itu, efisiensi penggunaan anggaran tercatat sebesar 56,22%, menunjukkan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Bahkan, nilai efisiensi yang mencapai 190,55% menegaskan bahwa realisasi anggaran tidak hanya sesuai dengan perencanaan, tetapi juga mampu menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Capaian ini membuktikan bahwa alokasi dana yang tersedia telah dimanfaatkan secara efektif dalam meningkatkan volume produksi perikanan tangkap di PPS Bungus.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari petugas pendataan produksi, pengelola data perikanan, dan verifikator data produksi. Seluruh SDM ini tergabung dalam tim kerja operasional pelabuhan, sehingga memungkinkan koordinasi yang lebih efektif serta sinkronisasi data produksi yang lebih akurat. Dengan adanya sinergi antarpetugas, proses pencatatan, pengelolaan, dan verifikasi data dapat berjalan dengan lancar, mendukung penyajian informasi produksi yang valid dan terpercaya. Hal ini berkontribusi pada peningkatan akurasi pelaporan serta pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan perikanan tangkap di PPS Bungus.

Sasaran Kinerja (SK) 3: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing

Sasaran kinerja keenam (SK-3) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja (IK) 3 – Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Fungsi pengusahaan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan Perikanan. Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNPB yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa laha/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisis atau evaluasi permohonan pengusahaan.

Target dan Realisasi

Indikator Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi merupakan perhitungan dari usulan pengusahaan baik baru ataupun perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi dibandingkan dengan total jumlah usulan pengusahaan yang masuk di PPS Bungus. Realisasi indikator ini disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 11 Capaian Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing									
IK 3 Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	100	100	100	100	100	-	-

Realisasi capaian indikator persentase permohonan pengusahaan yang dianalisis dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, terdapat sebanyak 18 permohonan pengusahaan, baik berupa permohonan baru maupun perpanjangan izin, yang diajukan di PPS Bungus. Capaian 100% ini menunjukkan bahwa seluruh permohonan yang masuk telah diproses secara menyeluruh, mulai dari tahap verifikasi berkas administrasi, analisis kelayakan teknis dan ekonomi, hingga evaluasi akhir sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini mencerminkan komitmen PPS Bungus dalam memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan transparan kepada para pelaku usaha perikanan, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selain itu, keberhasilan ini juga menjadi bukti dari efektivitas koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti tim evaluasi teknis, petugas administrasi, dan pemangku kebijakan di PPS Bungus. Proses yang terstruktur dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan permohonan, seperti sistem elektronik untuk memantau status permohonan, turut berkontribusi terhadap pencapaian ini.



Gambar 7. Perbandingan dengan Satker Lain

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian tahun 2024 di PPS Bungus tetap konsisten, yaitu mencapai 100%. Konsistensi ini menunjukkan bahwa PPS Bungus mampu mempertahankan kinerja optimal dalam memproses, menganalisis, dan mengevaluasi seluruh permohonan pengusahaan, baik yang baru maupun perpanjangan. Apabila dibandingkan dengan unit kerja lainnya, capaian realisasi PPS

Bungus pada tahun 2024 setara dengan PPS Belawan, yang juga berhasil mencapai tingkat realisasi 100%. Artinya, seluruh permohonan pengusahaan yang diajukan di PPS Belawan pada tahun 2024 telah dianalisis dan/atau dievaluasi secara menyeluruh. Kesamaan ini mencerminkan komitmen bersama antarunit kerja di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk memberikan pelayanan prima kepada pelaku usaha perikanan di wilayah masing-masing. Keberhasilan tersebut

tidak hanya menunjukkan konsistensi dalam pencapaian target, tetapi juga mengindikasikan standar operasional yang merata dan penerapan prosedur evaluasi yang efektif di seluruh unit kerja.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase permohonan perusahaan yang dianalisis dan/atau dievaluasi di PPS Bungus didukung oleh beberapa faktor utama:

1 Faktor Pendukung:

- Peluang Investasi yang Tinggi
 - PPS Bungus memiliki daya tarik investasi yang besar, didukung oleh ketersediaan lahan strategis untuk pengolahan dan pengembangan usaha.
 - Potensi ini mendorong minat pelaku usaha dalam mengajukan permohonan perusahaan.
- Optimalisasi Sistem Pelayanan
 - Tim pelayanan usaha terus berupaya meningkatkan sistem pelayanan dan pengelolaan agar lebih efisien.
 - Proses evaluasi dan analisis permohonan dilakukan secara profesional dan transparan.

2 Tantangan yang Dihadapi:

- Masih terdapat lahan dan bangunan di kawasan pelabuhan yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang berpotensi memengaruhi capaian indikator kinerja di masa mendatang.

3 Upaya Mengatasi Tantangan:

- Sosialisasi kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha
 - Dilakukan melalui berbagai media informasi serta kegiatan langsung seperti survei indeks kepuasan konsumen.
 - Bertujuan untuk meningkatkan animo stakeholder, menyampaikan informasi terkini, serta menampung saran atau keluhan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan PPS Bungus dapat terus meningkatkan efektivitas pelayanan dan memaksimalkan pemanfaatan kawasan pelabuhan secara optimal.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja juga tidak lepas dari pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang mencakup aspek tata kelola yang baik serta operasional perusahaan yang efektif. Tata kelola yang baik diwujudkan melalui penerapan prosedur yang jelas, terstruktur, dan efisien untuk memastikan setiap permohonan perusahaan dianalisis dan dievaluasi secara tepat waktu dan akurat. Dalam pelaksanaannya, PPS Bungus mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) yang detail, memberikan pelatihan berkala kepada staf untuk meningkatkan kompetensi mereka, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses pengelolaan. Penggunaan sistem informasi berbasis digital memungkinkan pelacakan status permohonan secara real-time, mengurangi risiko kesalahan administratif, serta meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pengelolaan data.

Di sisi lain, operasional perusahaan yang efektif memastikan kelancaran seluruh proses di pelabuhan. Hal ini dilakukan melalui pengawasan yang ketat terhadap setiap tahapan evaluasi, koordinasi yang harmonis antarunit kerja, dan evaluasi berkala terhadap kinerja operasional. Penilaian rutin ini penting untuk mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang muncul, sehingga langkah korektif dapat segera diambil. Dengan pendekatan ini, PPS Bungus berhasil menciptakan sinergi antara tata kelola dan operasional, yang menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan permohonan perusahaan.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 12 Analisa Efisiensi Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi	100%	1.072.873.000	860.368.571	1.072.873.000	212.504.429
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				19,81%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{19,81\%}{20} \times 50 \right)$				99,53%	

Realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase permohonan perusahaan yang dianalisis dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus mencapai 80,19% dari total alokasi anggaran tahun 2024. Tingkat penyerapan ini mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung proses analisis dan evaluasi permohonan perusahaan di sektor perikanan. Berdasarkan hasil analisis efisiensi, diperoleh efisiensi sebesar 19,81%, dengan nilai efisiensi mencapai 99,53%. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah dimanfaatkan dengan optimal, menghasilkan kinerja yang efisien dalam mendukung kelancaran pengelolaan dan evaluasi permohonan perusahaan di PPS Bungus.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian indikator ini didukung dengan komitmen dan sinergi tim pelayanan usaha yang di support satu orang ketua tim kerja dengan tiga orang pegawai terdiri dari: satu orang penelaah pengembangan usaha, satu orang AP3T dan satu orang P3T yang bertanggungjawab terhadap urusan perusahaan di pelabuhan.

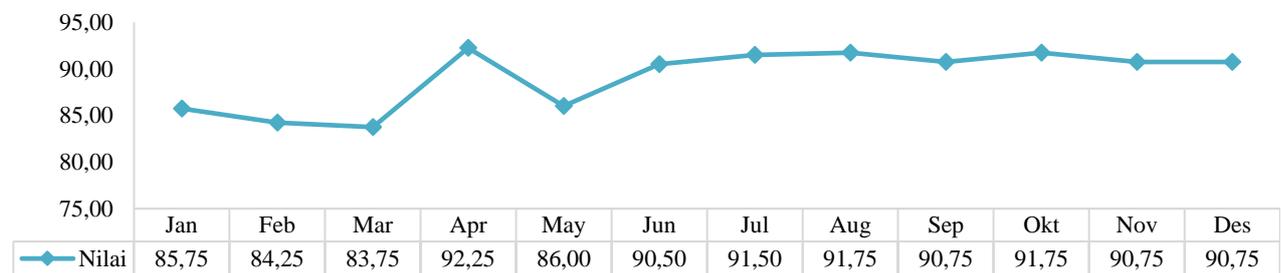
Indikator Kinerja (IK) 4 – Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan penilaian kegiatan operasional pelabuhan perikanan sesuai keputusan Dirjen No 20/2015 tentang pedoman evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan yang ada pada aplikasi PIPP. Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri.

IKU ini juga merupakan nilai atas capaian tingkat operasional laporan yang mendukung kegiatan-kegiatan operasional UPT PPS Bungus berupa pengumpulan data, informasi, publikasi, dan kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan yang di nilai setiap bulan dari eselon I DJPT (EVKIN) yang meliputi 27 jenis kriteria yaitu: Frekuensi Pengiriman Data (PIPP), ELogbook, Aplikasi SPB-online, SHTI, Realisasi Penyerapan Anggaran, Pendapatan Pelabuhan, Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan, Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan, Panjang Dermaga, Kedalaman Kolam, Sarana Perbaikan (Docking, bengkel), Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan, Ketersediaan Lahan Pelabuhan, Pelayanan Tambat Labuh, Produksi Perikanan, Frekuensi Kunjungan Kapal, STBLKK, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis, Fasilitas Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi, Pelaksanaan K5,

Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan), Penyaluran Es (kapal), Penyaluran BBM (kapal), Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP, Pemanfaatan Lahan Pelabuhan, Penyerapan Tenaga Kerja, Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan.

Target dan Realisasi



Gambar 8 Capaian Tingkat Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan data capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, analisis per triwulan menunjukkan pola fluktuasi yang cukup signifikan sepanjang tahun. Pada triwulan pertama (Januari–Maret), capaian kinerja mengalami sedikit penurunan dari 85,75 di Januari menjadi 83,75 di Maret. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan faktor eksternal seperti kondisi cuaca yang kurang mendukung aktivitas perikanan atau faktor internal terkait optimalisasi operasional awal tahun.

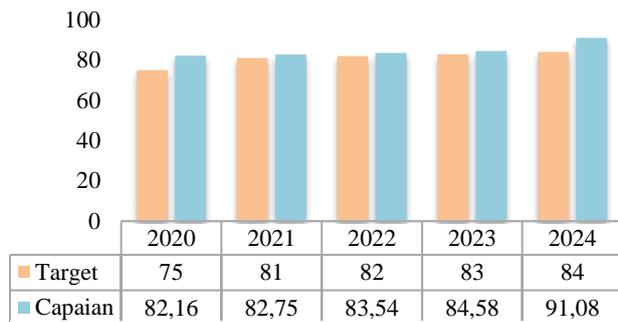
Memasuki triwulan kedua (April–Juni), terjadi lonjakan signifikan pada April dengan capaian tertinggi dalam tahun tersebut, yaitu 92,25. Peningkatan ini kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas penangkapan seiring dengan kondisi perairan yang lebih kondusif. Namun, capaian kembali menurun ke 86,00 di Mei sebelum mengalami kenaikan menjadi 90,50 di Juni, yang mengindikasikan adanya faktor musiman dalam pola produksi dan aktivitas pelabuhan. Pada triwulan ketiga (Juli–September), capaian kinerja relatif stabil, berkisar antara 90,75 hingga 91,75. Konsistensi ini menunjukkan bahwa pengelolaan operasional berjalan dengan baik, dengan tingkat produksi dan layanan yang tetap terjaga. Stabilitas ini dapat mencerminkan keberhasilan strategi operasional dan manajemen sumber daya yang diterapkan selama periode ini.

Perhatian utama dalam analisis ini tertuju pada triwulan keempat (Oktober–Desember), di mana capaian kinerja menunjukkan kestabilan yang tinggi. Pada Oktober, capaian mencapai 91,75, kemudian sedikit menurun menjadi 90,75 di November dan Desember. Meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan dengan puncak capaian di April, triwulan keempat tetap menunjukkan performa yang kuat dengan angka di atas 90. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan operasional di PPS Bungus tetap berjalan optimal menjelang akhir tahun, dengan tingkat pencapaian yang konsisten dan efisien.

Secara keseluruhan, pola fluktuasi ini memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi capaian kinerja PPS Bungus, baik dari sisi operasional, kondisi perairan, maupun faktor eksternal lainnya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap pola ini, strategi pengelolaan dapat disesuaikan untuk mengoptimalkan capaian di setiap periode, memastikan peningkatan produktivitas yang lebih merata sepanjang tahun.

Tabel 13. Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

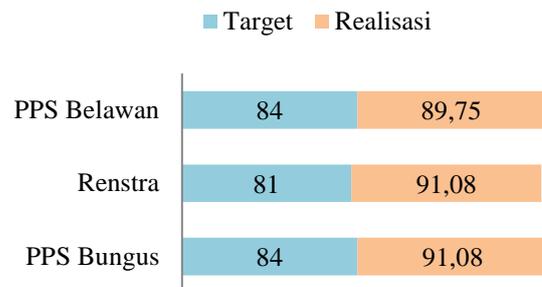
SK 3		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing								
IK 4		Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus		
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
82,16	82,75	83,54	84,58	91,08	84	91,08	108,43	81	91,08	



Gambar 10. Capaian PPS Bungus tahun 2020-2024

juga menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pengelolaan dan optimalisasi operasional di PPS Bungus dalam mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Kemudian dapat dilihat juga bahwa capaian tingkat kinerja PPS Bungus pada tahun 2024 tidak hanya melampaui target tahunan, tetapi juga telah melebihi target akhir dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024, dengan pencapaian 108,43%. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan pelabuhan perikanan serta efektivitas program yang diterapkan. Jika dibandingkan dengan satuan kerja (satker) lainnya, PPS Bungus juga menunjukkan performa yang lebih unggul, dengan selisih capaian sebesar 1,58% lebih tinggi dibandingkan PPS Belawan. Keberhasilan ini menegaskan bahwa PPS Bungus terus mengalami peningkatan dalam kinerja operasional dan pengelolaan sumber daya, sehingga mampu mencapai serta melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian indikator kinerja tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus menunjukkan tren peningkatan setiap tahun dalam periode 2020–2024. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, persentase pencapaian tahun 2024 lebih tinggi, yakni mencapai 108,43% dari target yang ditetapkan sebesar 84. Sementara itu, capaian tahun 2023 sebesar 101,90% dari target sebesar 83, yang



Gambar 9. Perbandingan Capaian

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan realisasi indikator tingkat kinerja pelabuhan didukung oleh kedisiplinan tim dalam melakukan penginputan data setiap bulannya, serta adanya monitoring dan evaluasi yang rutin dilakukan oleh pimpinan. Pembagian tugas penginputan dan monitoring oleh setiap petugas dalam tim kerja OPK, TKPU, dan Tim Kerja Dukungan Manajerial yang juga turut berkontribusi dalam pencapaian ini. Meskipun demikian, terdapat permasalahan yang harus diatasi, yaitu frekuensi pengiriman data di aplikasi PIPP (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan) yang masih belum maksimal. Upaya peningkatan diperlukan untuk mencapai nilai optimal. Walaupun terdapat kendala ini, sinergitas dalam penginputan data telah dilaksanakan dengan baik, sehingga realisasi indikator tetap dapat dicapai meski belum mencapai nilai maksimal.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Pelaksanaan tata kelola dan operasional Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) merupakan salah satu kegiatan yang menunjang tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat operasional pelabuhan perikanan. PIPP berperan sebagai pusat data dan informasi yang mendukung pengambilan keputusan, baik bagi pengelola pelabuhan, nelayan, maupun pemangku kepentingan lainnya. Dalam operasionalnya, PIPP mencakup berbagai aspek, seperti pencatatan data produksi perikanan, pemantauan aktivitas kapal, pengelolaan sistem informasi perikanan, serta penyediaan informasi terkini terkait cuaca, harga ikan, dan regulasi yang berlaku. Tata kelola yang baik dalam pengelolaan PIPP memastikan tersedianya data yang akurat dan real-time, yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi layanan dan operasional pelabuhan. Selain itu, optimalisasi PIPP juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan operasional

pelabuhan perikanan. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, koordinasi antara berbagai pihak dapat berjalan lebih efektif, sehingga mendukung kelancaran aktivitas di pelabuhan, meningkatkan produktivitas, serta memastikan pencapaian IKU secara optimal.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 14. Analisa Efisiensi Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	108,43%	59.198.000	53.121.835	64.188.391	11.066.556
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				18,69%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{18,69\%}{20} \times 50 \right)$				96,73%	

Realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus pada tahun 2024 mencapai 89,74% dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 59.198.000,-. Tingginya tingkat penyerapan ini mencerminkan efektivitas dalam pemanfaatan anggaran untuk mendukung berbagai aspek operasional dan pengelolaan pelabuhan. Berdasarkan analisis efisiensi, diperoleh efisiensi sebesar 18,69%, dengan nilai efisiensi mencapai 96,73%. Angka ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara optimal, dengan pengeluaran yang tetap terkendali namun tetap mampu mencapai hasil yang maksimal. Keberhasilan ini menegaskan bahwa PPS Bungus tidak hanya berhasil merealisasikan anggaran dengan baik, tetapi juga memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efisien untuk mendukung pencapaian target kinerja pelabuhan.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian IKU Tingkat Operasional pelabuhan didukung oleh tim penginput PIPP yang bertugas untuk melakukan input data pada masing-masing kriteria yang dinilai pada aplikasi PIPP, setiap kriteria pada aplikasi PIPP memiliki penanggungjawab yang bisa berasal dari kelompok kerja yang berbeda, disesuaikan dengan kriteria tersebut.

Indikator Kinerja (IK) 5 – Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

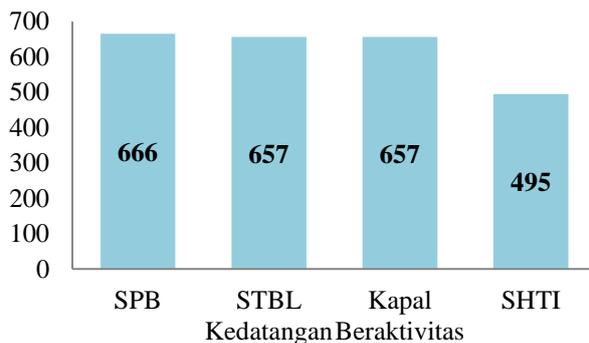
Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan indikator yang menunjukkan :

- 1** Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (SPB), yaitu jumlah persetujuan berlayar / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan.
- 2** Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan, yaitu jumlah kapal yang diterbitkan STBLK / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan.
- 3** Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan, yaitu jumlah permintaan verifikasi SHTI dibagi dengan jumlah SHTI yang diterbitkan.

Target dan Realisasi

Tabel 15 Capaian Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 3		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing								
IK 5		Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus		
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
-	-	-	93,75	100,55	81	100,55	124,14	-	-	



Gambar 11. Pelayanan Kesyahbandaran Tahun 2024

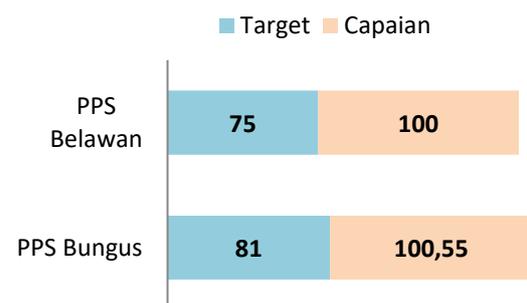
Namun, secara persentase capaian, PPS Belawan justru mencatatkan hasil yang lebih tinggi dengan selisih 9,19% dibandingkan PPS Bungus pada tahun 2024. Tingginya selisih capaian tersebut disebabkan oleh perbedaan target antara kedua pelabuhan, di mana target PPS Belawan lebih kecil dibandingkan dengan target PPS Bungus untuk tahun 2024. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi capaian tersebut adalah kelengkapan dokumen kapal yang beroperasi di PPS Belawan. Di PPS Belawan, kelengkapan dokumen kapal yang beraktivitas sangat mendukung kelancaran pelayanan kesyahbandaran, sehingga seluruh kapal yang beroperasi dapat diterbitkan Surat Perintah Berlayar (SPB)-nya tanpa kendala. Meskipun capaian PPS Bungus tidak setinggi PPS Belawan secara persentase, kinerja PPS Bungus tetap mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kesyahbandaran, terutama dengan melebihi target yang telah ditetapkan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator tingkat pelayanan kesyahbandaran pelabuhan Perikanan Samudera Bungus di dukung dengan kinerja tim kesyahbandaran dalam menghimbau para pemilik ataupun pengurus kapal perikanan yang akan melakukan docking di kolam pelabuhan untuk mengurus dan melengkapi surat perizinan dengan lengkap. Realisasi ini juga didukung dengan adanya kesadaran pemilik kapal dalam mengajukan permohonan SPB, STBLK kedatangan kapal dan SHTI yang semakin meningkat.

Sementara dalam upaya pencapaian realisasi indikator ini, yang menjadi penghambat keberhasilan adalah masih ada kapal-kapal di kolam pelabuhan yang akan Docking namun belum memiliki dokumen yang lengkap.

Realisasi indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus tahun 2024 mencapai 100,55%, dengan persentase capaian sebesar 124,14% dari target yang ditetapkan sebesar 81. Capaian ini menunjukkan bahwa PPS Bungus berhasil melampaui target yang telah ditentukan, mencerminkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat pelayanan kesyahbandaran. Dibandingkan dengan satuan kerja (satker) lainnya, yakni PPS Belawan, capaian PPS Bungus lebih tinggi sebesar 0,55%.



Gambar 12. Perbandingan dengan Satker Lain

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan tata kelola dan operasional kesyahbandaran di pelabuhan tersebut. Tata kelola yang baik melibatkan penerapan prosedur dan kebijakan yang jelas serta transparan, yang memastikan setiap aspek pelayanan kesyahbandaran berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, operasional kesyahbandaran yang efektif mencakup pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten, pemeliharaan infrastruktur yang memadai, serta penggunaan teknologi informasi untuk mendukung proses administrasi dan operasional. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, termasuk pihak pelabuhan, pengguna jasa, dan otoritas maritim, juga memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran operasional kesyahbandaran.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 16. Analisa Efisiensi Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	124,14%	24.710.000	21.681.951	30.674.994	8.993.043
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				36,39%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{36,39\%}{20} \times 50 \right)$				140,98%	

Realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus tahun 2024 mencapai 87,75% dari total alokasi anggaran sebesar Rp 24.710.000,-. Capaian ini mencerminkan penggunaan anggaran yang cukup optimal dalam mendukung berbagai aspek pelayanan kesyahbandaran, termasuk pengawasan keselamatan kapal, administrasi perizinan, serta peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan.

Berdasarkan analisis efisiensi, diperoleh efisiensi sebesar 36,39%, dengan nilai efisiensi mencapai 140,98%. Nilai efisiensi yang tinggi ini menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan tidak hanya berhasil digunakan untuk mencapai target, tetapi juga menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah anggaran yang dibelanjakan. Hal ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesyahbandaran di PPS Bungus.

Dengan efisiensi anggaran yang tinggi, pelabuhan dapat terus meningkatkan kinerja layanan tanpa memerlukan tambahan alokasi anggaran yang signifikan. Keberhasilan ini juga menunjukkan adanya perencanaan dan pengawasan keuangan yang baik, serta koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait dalam memastikan optimalisasi anggaran. Dengan demikian, pencapaian kinerja pelayanan kesyahbandaran di PPS Bungus pada tahun 2024 dapat terus meningkat, mendukung kelancaran operasional pelabuhan dan keselamatan pelayaran secara keseluruhan.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang handal dan terlatih. Tim kerja Kesyahbandaran di PPS Bungus terdiri dari 11 personil yang memiliki peran strategis dalam memastikan pelayanan berjalan optimal. Mereka bertanggung jawab atas berbagai aspek pelayanan, termasuk pengawasan keselamatan pelayaran, pemeriksaan dokumen kapal, serta penerbitan Surat Perintah Berlayar (SPB).

Dengan SDM yang kompeten dan sistem kerja yang terorganisir, proses pelayanan kesyahbandaran dapat berjalan lancar, efisien, dan tepat waktu. Selain itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkala juga berkontribusi dalam menjaga kualitas layanan. Dengan dukungan tim yang profesional dan berdedikasi, PPS Bungus mampu mencapai tingkat pelayanan yang tinggi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sekaligus mendukung keselamatan dan kelancaran aktivitas perikanan.

Sasaran Kinerja (SK) 4: Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal

Sasaran kinerja kelima (SS-4) yang akan dicapai adalah “Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja (IK) 6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan adalah kawasan yang mencakup daratan dan perairan di sekitarnya, dengan batas-batas tertentu, yang digunakan sebagai tempat untuk berbagai kegiatan pemerintahan dan sistem bisnis perikanan. Di dalam pelabuhan perikanan, kapal perikanan dapat bersandar, berlabuh, dan/atau melakukan bongkar muat ikan, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Untuk mendukung fungsi tersebut, setiap pelabuhan perikanan harus memiliki fasilitas yang terbagi dalam tiga kategori: fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang.

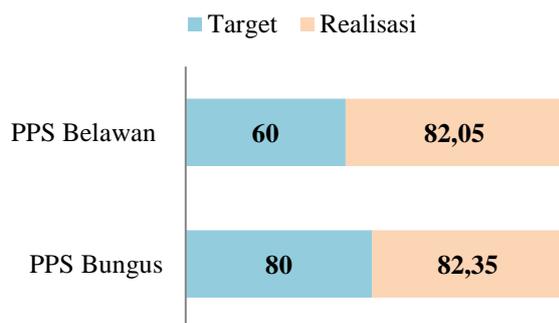
Dalam rangka menunjang operasi pelabuhan perikanan, pengembangan fasilitas menjadi sangat penting untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada. Realisasi indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus dihitung dengan membandingkan jumlah pengembangan fasilitas yang telah dilaksanakan dengan masterplan atau draft perubahan masterplan PPS Bungus. Dengan cara ini, dapat diketahui sejauh mana pengembangan fasilitas di PPS Bungus telah sesuai dengan rencana yang telah disusun dan memastikan pelabuhan ini dapat terus beroperasi dengan optimal untuk mendukung kegiatan perikanan.

Target dan Realisasi

Tabel 17 Capaian Indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 4		Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal							
IK 6		Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	80	100	57	100	175,44	-	-

Realisasi Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 mencapai 175,44%, melebihi target yang ditetapkan. Perhitungan ini didasarkan pada jumlah fasilitas yang telah dimanfaatkan di PPS Bungus hingga tahun 2024, dibandingkan dengan jumlah fasilitas yang tercantum dalam rewiu masterplan PPS Bungus tahun 2022. Beberapa fasilitas yang belum termanfaatkan sesuai dengan Masterplan 2022 antara lain pelayanan perbaikan perawatan kapal, sport and health education, SPBB non-subsidi, kantor karantina, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan bangunan edukasi bahari. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan, yakni lebih tinggi 72,5% dari capaian tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam pengembangan dan pemanfaatan fasilitas di PPS Bungus untuk mendukung operasional pelabuhan perikanan yang lebih efektif dan efisien.



Gambar 13. Perbandingan dengan Satker Lain

Dalam perbandingan dengan satuan kerja (satker) lain, seperti PPS Belawan, realisasi pengendalian pengembangan fasilitas di kedua pelabuhan tersebut sama-sama mencapai 100%. Namun, jika dilihat dari persentase capaian, PPS Bungus memiliki capaian yang lebih tinggi sebesar 8,77%. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan target yang ditetapkan, di mana target PPS Belawan lebih tinggi dibandingkan dengan PPS Bungus. Meskipun demikian, capaian PPS Bungus yang lebih tinggi menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas yang ada, serta komitmen dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan realisasi indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung oleh pelaksanaan pengembangan fasilitas yang sesuai dengan masterplan yang telah direview pada tahun 2022. Namun, salah satu faktor penghambat keberhasilan indikator ini adalah terbatasnya anggaran untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan yang diperlukan untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur. Meskipun terdapat tantangan dalam pencapaian indikator ini, PPS Bungus telah berupaya mengoptimalkan kegiatan pengembangan fasilitas dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian indikator persentase pengendalian pengembangan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sangat bergantung pada berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Salah satu faktor utama yang berperan adalah pelaksanaan pengembangan, perbaikan, serta rehabilitasi fasilitas pelabuhan perikanan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang tersedia mampu mendukung sistem Penangkapan Ikan Terukur secara optimal. Dengan adanya pengembangan yang tepat, fasilitas pelabuhan dapat memenuhi standar operasional yang lebih baik, meningkatkan efisiensi kegiatan perikanan, serta memberikan manfaat langsung bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Sebaliknya, jika program perbaikan dan rehabilitasi tidak berjalan dengan baik, maka dapat menghambat operasional pelabuhan, menurunkan efektivitas pengelolaan sumber daya perikanan, serta berdampak pada rendahnya pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program-program ini menjadi kunci dalam mencapai target pengendalian pengembangan fasilitas pelabuhan secara efektif dan berkelanjutan.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 18. Analisa Efisiensi Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	175,44%	592.884.000	443.286.462	1.040.155.689	596.869.227
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n (AARO_i \times CRO_i) - RARO_i}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				100,67%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{100,67\%}{20} \times 50 \right)$				301,68%	

Pencapaian Indikator Kinerja (IK) 6 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 592.884.000. Hingga akhir tahun 2024, jumlah anggaran yang telah terserap mencapai Rp 443.286.462, atau setara dengan 74,77% dari total anggaran yang tersedia. Selain itu, efisiensi anggaran mencapai 100,67%, dengan nilai efisiensi sebesar 301,68%, yang mengindikasikan pemanfaatan dana secara optimal tanpa terjadi pemborosan. Efisiensi yang tinggi ini mencerminkan keberhasilan dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, sehingga mendukung pelaksanaan program pengembangan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan secara maksimal guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian indikator kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, khususnya dari tim kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana. Tim ini terdiri dari delapan orang pegawai yang memiliki peran strategis dalam perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan pengembangan fasilitas pelabuhan. Dengan adanya tim ini, berbagai kegiatan seperti pengembangan, perbaikan, dan rehabilitasi infrastruktur pelabuhan dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja (IK) 7 – Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

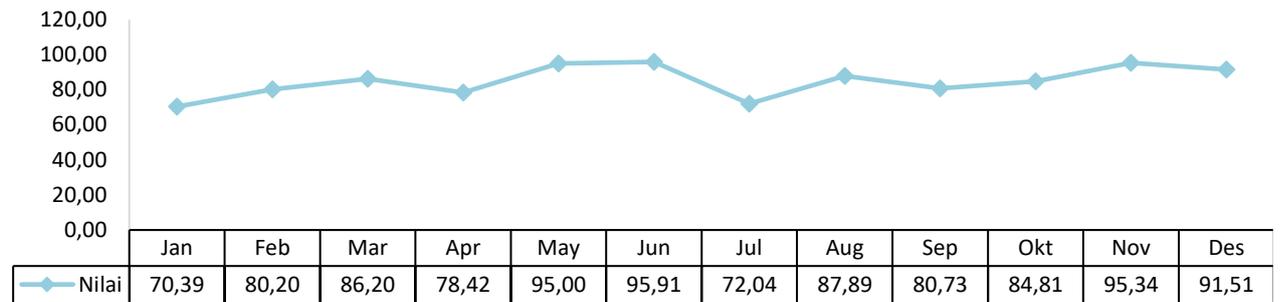
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang mengoperasikan pelabuhan perikanan harus 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.

Penilaian pengendalian lingkungan pelabuhan perikanan berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor Pelabuhan.

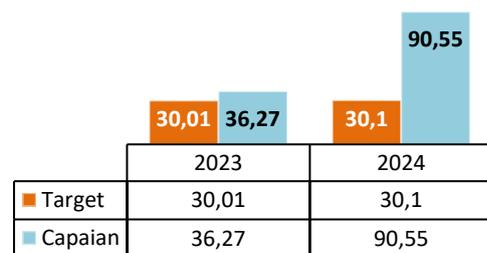
Target dan Realisasi

Tabel 19 Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 4	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal									
IK 7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus		
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
-	-	-	36,27	90,55	30,10	90,55	300,83	-	-	



Gambar 14. Skor Penilaian aplikasi SELARASKAN tahun 2024



Gambar 15. Perbandingan Capaian

tahunan secara signifikan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, hasil tahun 2024 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini terutama disebabkan oleh semakin optimalnya penginputan indikator dari program mandatory maupun voluntary dalam aplikasi SELARASKAN, yang memungkinkan perhitungan nilai lebih akurat dan maksimal. Selain itu, peningkatan capaian juga mencerminkan peningkatan efektivitas strategi pengelolaan lingkungan di pelabuhan, termasuk dalam aspek pemantauan, pengendalian, serta penerapan kebijakan lingkungan yang lebih ketat dan berbasis teknologi.

Jika dibandingkan dengan PPS Belawan, PPS Bungus menunjukkan capaian yang lebih unggul. Berdasarkan data yang ditampilkan, PPS Bungus memiliki capaian sebesar 90,55, sedangkan PPS Belawan mencatatkan capaian sebesar 66,49. Dengan target yang sama, yaitu 30,1, capaian PPS Bungus mencapai 300,83% dari target, sementara PPS Belawan mencapai 220,91% dari target. Artinya, PPS Bungus melampaui target hampir tiga kali lipat, sementara PPS Belawan mencapai lebih dari dua kali lipat dari targetnya. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti optimalisasi penginputan data, di mana PPS Bungus telah lebih maksimal dalam memasukkan indikator program mandatory dan voluntary pada aplikasi SELARASKAN, sehingga perhitungan nilainya menjadi lebih akurat. Selain itu, implementasi kebijakan lingkungan yang lebih efektif di PPS Bungus juga menjadi faktor penunjang keberhasilan. Perbedaan kondisi operasional, seperti



Gambar 16. Perbandingan dengan Satker Lain

kapasitas pelabuhan, tingkat aktivitas perikanan, serta sarana dan prasarana pengendalian lingkungan, juga dapat mempengaruhi capaian yang lebih tinggi di PPS Bungus dibandingkan dengan PPS Belawan. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa upaya peningkatan kinerja lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah berjalan dengan baik, didukung oleh sistem pelaporan yang lebih transparan dan komprehensif. Dengan hasil yang sangat positif ini, diharapkan ke depan pengelolaan lingkungan di pelabuhan semakin berkelanjutan, serta dapat menjadi model bagi pelabuhan perikanan lainnya dalam menerapkan sistem pengendalian lingkungan yang efektif.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung oleh evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek yang berkontribusi dalam penilaian. Salah satu faktor pendukung utama adalah terbentuknya tim penginputan yang bertanggung jawab untuk mengisi setiap evidence dalam aplikasi SELARASKAN.

Setiap anggota tim memiliki peran dalam memastikan kelengkapan data terkait program mandatory dan program evidence, serta menginput hasilnya ke dalam aplikasi SELARASKAN. Dengan adanya sistem ini, terjadi perbaikan yang signifikan pada tahun 2024, sehingga nilai indikator kinerja dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Namun, pencapaian IK 7 masih menghadapi tantangan, terutama karena fluktuasi nilai yang dipengaruhi oleh kriteria dan data dukung dalam aplikasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut agar tim yang dibentuk dapat benar-benar mewakili dan mengelola setiap data dukung pada setiap kriteria yang digunakan dalam penilaian.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Pelaksanaan layanan dukungan Aplikasi SELARASKAN memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian IK 7 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Keberhasilan pencapaian didukung oleh evaluasi berkelanjutan yang memungkinkan pemantauan secara real-time, sehingga tim dapat segera melakukan perbaikan jika ditemukan kekurangan. Selain itu, adanya tim penginputan yang terorganisir dan mewakili masing-masing evidence mempermudah proses pengisian data secara akurat dan tepat waktu. Dengan sistem ini, akurasi data meningkat, dan evidence yang dibutuhkan dalam evaluasi lebih terdokumentasi dengan baik, sehingga target nilai dapat dicapai.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 20. Analisa Efisiensi Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	300,83%	202.459.000	202.392.063	609.057.409	406.665.346
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				200,86%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{200,86\%}{20} \times 50 \right)$				552,15%	

Upaya mendukung indikator kinerja nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 202.459.000 dan sampai akhir tahun 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 202.392.063 atau 100% dengan efisiensi 200,86% dan nilai efisiensi 552,15%.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian IK 7 didukung oleh kontribusi SDM dari tim kerja sarana dan prasarana pelabuhan, yang berperan aktif dalam memastikan kelancaran operasional dan pengelolaan infrastruktur untuk mendukung target yang telah ditetapkan.

Sasaran Kinerja (SK) 5: Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran kinerja kelima (SK-5) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja (IK) 8 - Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

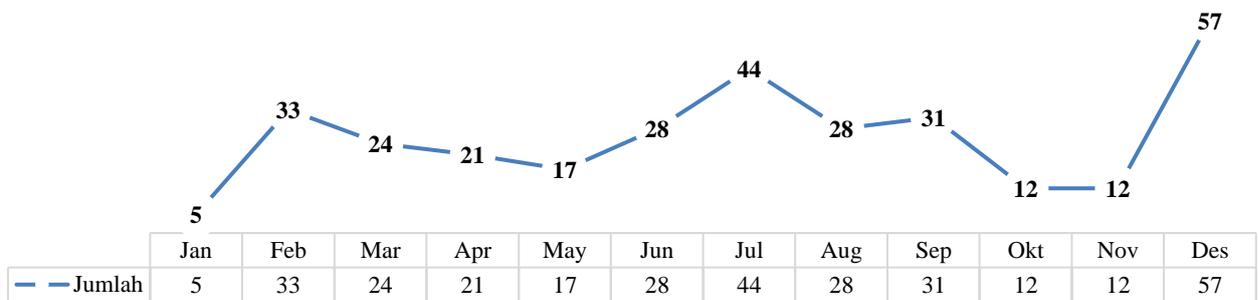
Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewenangan penerbitan Sertifikat Kelaikan dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan, sehingga dapat dioperasikan dengan aman dan sesuai regulasi. Setiap kapal perikanan yang akan beroperasi wajib memenuhi persyaratan kelaikan kapal perikanan, yang mencakup aspek teknis, operasional, dan keselamatan, guna memastikan efisiensi serta keberlanjutan aktivitas penangkapan ikan.

Sebagai bagian dari pengawasan dan administrasi kapal perikanan, salah satu indikator kinerja di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus adalah jumlah dokumen kapal perikanan yang diterbitkan. Indikator ini mengacu pada jumlah sertifikat atau dokumen resmi yang dikeluarkan sebagai bukti bahwa kapal telah memenuhi persyaratan kelaikan. Formula perhitungannya didasarkan pada nilai posisi akhir jumlah dokumen kapal perikanan yang diterbitkan dalam periode tertentu. Penerbitan dokumen ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan armada kapal perikanan, memastikan bahwa kapal-kapal yang beroperasi di wilayah pelabuhan telah memenuhi standar kelaikan, serta mendukung praktik perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Target dan Realisasi

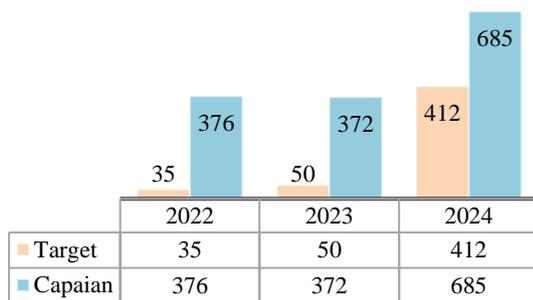
Tabel 21 Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

SK 5	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
IK 8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan								
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	376	372	685	412	685	166,26	-	-



Gambar 17. Capaian Kapal Perikanan Izin Daerah

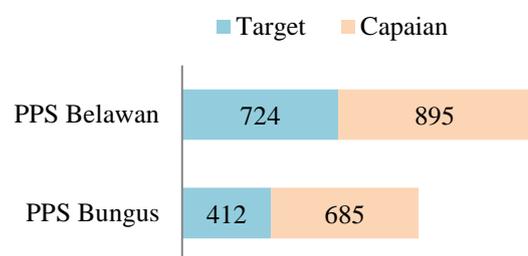
Hingga triwulan IV tahun 2024, capaian indikator kinerja utama kapal perikanan berizin daerah yang memenuhi ketentuan mencapai 685 unit, setara dengan 166,26% dari target tahun 2024. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus turut mendukung operasional kapal perikanan dengan menerbitkan SKKP untuk dua provinsi, yakni Sumatera Barat dan Bengkulu.



Gambar 18. Perbandingan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, baik target maupun capaian pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan mencapai 412, meningkat secara drastis dibandingkan target tahun 2022 yang hanya sebesar 35 dan tahun 2023 sebesar 50. Capaian pada tahun 2024 juga mencatat angka tertinggi, yaitu 685, yang jauh melampaui capaian tahun 2022 sebesar 376 dan capaian tahun 2023 sebesar 372. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya yang lebih optimal, baik dari segi manajemen maupun implementasi program, untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Jika dibandingkan dengan Satuan Kerja lain, yaitu PPS Belawan, dari segi jumlah capaian, PPS Bungus menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan PPS Belawan. Namun, jika dilihat dari persentase capaian terhadap target, PPS Bungus lebih unggul dengan persentase capaian sebesar 166,26%, sementara PPS Belawan hanya mencapai 123,62%. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan target yang ditetapkan antara PPS Bungus dan PPS Belawan. Meskipun jumlah capaian PPS Bungus lebih rendah, tingkat keberhasilan dalam memenuhi targetnya menunjukkan performa yang lebih efektif dan efisien dibandingkan PPS Belawan.



Gambar 19. Perbandingan dengan Satker Lain

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya keberhasilan Indikator Kinerja (IK) 8 mencakup: 1) tingginya antusiasme pemilik kapal perikanan dalam melaporkan pengajuan pemeriksaan kapal, yang berperan signifikan dalam memastikan realisasi indikator ini; dan 2) dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan penerbitan SKKP, yang memungkinkan pelaksanaan pengecekan dan pemeriksaan kapal perikanan dilakukan secara optimal. Namun, pada tahun 2024, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu tidak adanya petugas pengecekan di Area Bengkulu karena sedang menjalani tugas belajar. Situasi ini menyebabkan proses pengecekan kapal dan penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan di Bengkulu mengalami sedikit hambatan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Capaian indikator "Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan" sangat dipengaruhi oleh keberhasilan implementasi kebijakan di bidang perkapalan perikanan. Salah satu bentuk implementasinya adalah pelaksanaan kegiatan teknis seperti pemeriksaan kelaikan, pengukuran dimensi, pengujian fungsi peralatan, serta inspeksi menyeluruh terhadap kapal perikanan.

Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa setiap kapal perikanan yang diajukan untuk perizinan telah memenuhi standar keamanan, kelayakan operasional, dan regulasi teknis yang berlaku. Dengan adanya proses verifikasi yang ketat dan menyeluruh, dokumen perizinan hanya diterbitkan bagi kapal yang layak, sehingga dapat menjamin keselamatan pelayaran, menjaga kelestarian sumber daya ikan, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keberhasilan atau kendala dalam pencapaian indikator ini erat kaitannya dengan kualitas dan konsistensi pelaksanaan program pemeriksaan dan pengawasan teknis di lapangan.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 22. Analisa Efisiensi Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	166,26%	18.750.000	18.745.820	31.173.750	12.427.930
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n (AARO_i \times CRO_i) - RARO_i}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				66,28%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{66,28\%}{20} \times 50 \right)$				215,70%	

Pencapaian indikator kinerja kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan menunjukkan hasil yang sangat baik, didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 18.750.000. Hingga akhir tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 18.745.820, atau 99,97% dari total anggaran yang dialokasikan, yang mencerminkan optimalisasi penggunaan dana secara efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, tingkat efisiensi anggaran yang dicapai mencapai 66,28%, dengan nilai efisiensi sebesar 215,70%, menandakan bahwa program ini telah dijalankan dengan pendekatan yang hemat dan optimal. Capaian efisiensi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran tidak hanya berhasil mencapai target yang ditetapkan, tetapi juga mampu memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan.

Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, di antaranya strategi pengelolaan anggaran yang efektif, pemanfaatan sumber daya yang efisien, serta sistem pengawasan dan pelaporan yang transparan, sehingga memastikan setiap pengeluaran sesuai dengan kebutuhan operasional. Dengan pencapaian ini, dapat disimpulkan bahwa program sertifikasi kapal perikanan izin daerah di PPS Bungus telah berjalan dengan sangat baik, tidak hanya dalam hal pemenuhan ketentuan regulasi, tetapi juga dalam pengelolaan anggaran yang efisien. Ke depan, diharapkan efisiensi ini tetap terjaga dan semakin ditingkatkan untuk mendukung keberlanjutan serta peningkatan pelayanan bagi pelaku usaha perikanan di wilayah Pelabuhan.

Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait kelaikan kapal perikanan, telah ditetapkan 9 (sembilan) orang petugas Kelaikan Kapal yang bertugas dalam proses pemeriksaan dan sertifikasi kapal. Seluruh petugas ini merupakan pegawai yang telah mengikuti Diklat Petugas Kelaikan Kapal Perikanan, sehingga memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai terkait standar kelaikan kapal, baik dari aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, maupun kelaiksimpanan.

Namun, perlu dicatat bahwa kesembilan petugas tersebut berasal dari jabatan dan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) yang berbeda-beda, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, mereka juga memiliki tanggung jawab di bidang lain. Kondisi ini menyebabkan adanya rangkap tugas, yang berpotensi menambah beban kerja serta menuntut efektivitas dalam pembagian waktu dan tugas.

Meskipun demikian, sistem kerja yang diterapkan tetap berorientasi pada kolaborasi dan efisiensi, sehingga proses sertifikasi kapal tetap dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan pencapaian IKU ini juga menunjukkan bahwa meskipun dengan keterbatasan jumlah petugas khusus, kinerja tim tetap optimal dalam menjalankan tugasnya. Ke depan, diharapkan adanya penyesuaian dalam distribusi tugas atau penambahan sumber daya manusia yang lebih spesifik, sehingga proses pemeriksaan dan penerbitan sertifikat kelaikan kapal dapat berjalan lebih optimal dan efisien, tanpa mengganggu tugas utama masing-masing petugas.

Sasaran Kinerja (SK) 6: Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran Kinerja keenam (SK-6) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja (IK) 9 – Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan, kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut yaitu melalui pengendalian usaha subsektor penangkapan ikan dan usaha subsektor pengangkutan ikan, khususnya tata kelola Kapal Perikanan, alat penangkapan ikan, dan pengawakan Kapal Perikanan agar sesuai dengan daya dukung lingkungan dan potensi sumber daya ikan. Kapal Perikanan sebagai sarana produksi memiliki dua elemen, yakni elemen fisik dan elemen personel.

Kegiatan pemenuhan kompetensi kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan bagi awak kapal perikanan, selain dilaksanakan melalui diklat, dapat juga dilaksanakan melalui bimbingan teknis dengan dasar hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan Pasal 146 sampai dengan pasal 149. Pada tahun 2024 pelaksanaan IK Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan serta yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Metode penghitungan IK 9 dengan membandingkan jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-Pkl/PKL dan sudah tersertifikasi dibagi jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-PKL/PKL.

Target dan Realisasi

Tabel 23 Capaian Indikator Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan

SK 6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
IK 9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan								
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	30,36	39,81	30,15	39,81	132,04	-	-

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja terkait persentase peningkatan pengetahuan, kompetensi, dan perlindungan nelayan serta awak kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus mencapai 39,81%, atau sebesar 132,04% dari target yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi, PPS Bungus telah menerbitkan 103 Pas Kecil Laut (PKL) bagi awak kapal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 41 awak kapal telah tersertifikasi, yang terdiri dari 16 nahkoda, 16 kepala kamar mesin (KKM), dan 9 anak buah kapal (ABK).

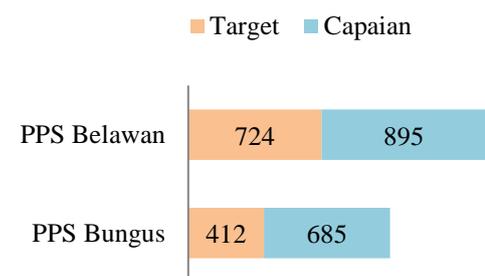


Gambar 20. Perbandingan Dengan Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, kinerja tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, dengan selisih persentase sebesar 9,45%. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas program pembinaan, optimalisasi regulasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor perikanan, khususnya bagi para awak kapal dan pemilik kapal yang beroperasi di PPS Bungus. Selain itu, pencapaian ini juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap standar kelaikan kapal, yang didukung oleh

berbagai kebijakan strategis dan upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan serta sosialisasi yang lebih intensif

Jika dibandingkan dengan satuan kerja lain, seperti Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, capaian PPS Bungus masih lebih rendah dengan selisih sebesar 5,76%. PPS Belawan mencatat capaian sebesar 45,57%, yang lebih tinggi dibandingkan PPS Bungus. Perbedaan ini disebabkan oleh jumlah nelayan yang telah memperoleh Pas Kecil Laut (PKL) dan sertifikasi di PPS Belawan yang lebih besar. Tingginya angka sertifikasi di PPS Belawan mencerminkan cakupan program pembinaan yang lebih luas serta potensi jumlah awak kapal yang lebih banyak dibandingkan dengan PPS Bungus. Meskipun demikian, capaian PPS Bungus tetap menunjukkan tren positif dengan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan efektivitas program peningkatan kompetensi dan perlindungan awak kapal perikanan di wilayahnya.



Gambar 21. Perbandingan dengan Satker Lain

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Capaian indikator kinerja ini didukung oleh dua faktor utama. Pertama, meningkatnya kesadaran awak dan pemilik kapal perikanan tentang pentingnya kompetensi, asuransi jiwa, dan pelaksanaan

Pas Kecil Laut (PKL), yang mendorong partisipasi dalam program sertifikasi dan perlindungan. Kedua, sosialisasi dan pendekatan langsung yang terus dilakukan turut memperkuat pemahaman serta keterlibatan mereka. Dengan faktor-faktor ini, diharapkan pencapaian indikator kinerja terus meningkat seiring optimalisasi program pembinaan dan perlindungan awak kapal perikanan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan pengetahuan, kompetensi, dan perlindungan nelayan serta awak kapal perikanan sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan fasilitas dan program pembinaan peningkatan kompetensi. Program ini mencakup berbagai kegiatan, seperti pelatihan teknis bagi awak kapal, sosialisasi terkait keselamatan kerja dan perlindungan asuransi, serta pemberian sertifikasi bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan. Fasilitas yang memadai, termasuk akses terhadap pelatihan dan kemudahan dalam proses perizinan serta sertifikasi, berperan penting dalam meningkatkan capaian indikator kinerja. Sebaliknya, jika fasilitas dan program pembinaan tidak berjalan optimal—baik karena keterbatasan sumber daya, kurangnya partisipasi nelayan, atau kendala administratif—maka pencapaian indikator dapat terhambat. Oleh karena itu, keberlanjutan dan efektivitas program pembinaan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kompetensi serta perlindungan bagi nelayan dan awak kapal perikanan.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 24. Analisa Efisiensi Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan	132,04%	8.700.000	8.630.300	11.487.480	2.857.180
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				32,84%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{32,84\%}{20} \times 50 \right)$				132,1%	

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 8.700.000, dengan realisasi penyerapan hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp 8.630.300 atau sebesar 99,20% dari total anggaran yang tersedia. Tingginya tingkat penyerapan ini mencerminkan efektivitas dalam penggunaan anggaran untuk mendukung berbagai program peningkatan pengetahuan, kompetensi, dan perlindungan nelayan serta awak kapal perikanan. Selain itu, efisiensi penggunaan anggaran juga menunjukkan hasil yang optimal, dengan tingkat efisiensi sebesar 32,84% dan nilai efisiensi mencapai 132,1%. Hal ini menandakan bahwa sumber daya yang dialokasikan telah dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kompetensi serta perlindungan awak kapal, sekaligus menunjukkan tata kelola keuangan yang baik dalam mendukung pencapaian indikator kinerja.

Sumber Daya Manusia

Upaya pencapaian indikator kinerja ini dilaksanakan oleh tim kerja kesyahbandaran pelabuhan yang berjumlah 11 orang, dengan peran dan tugas yang saling mendukung dalam memastikan kepatuhan

terhadap regulasi dan standar operasional di PPS Bungus. Tim ini terdiri dari 3 (tiga) orang Syahbandar Pelabuhan Perikanan, yang bertanggung jawab dalam pengawasan keselamatan pelayaran serta memastikan kelaikan kapal sebelum beroperasi. Selain itu, terdapat 3 (tiga) orang pengelola syahbandar, yang berperan dalam administrasi dan pengelolaan dokumen terkait syahbandaran, serta 1 (satu) analis kesyahbandaran, yang bertugas dalam menganalisis serta mengevaluasi kebijakan dan implementasi aturan kesyahbandaran.

Selain itu, tim juga diperkuat oleh 3 (tiga) orang P3T Pertama, yang memiliki peran dalam melakukan inspeksi teknis dan uji kelaikan kapal perikanan, serta 1 (satu) orang AP3T, yang membantu dalam proses pemeriksaan dan verifikasi aspek teknis kapal. Dengan struktur tim kerja yang terdiri dari berbagai kompetensi dan keahlian, pelaksanaan tugas dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini dapat berjalan dengan lebih efektif dan terintegrasi.

Meskipun jumlah personel terbatas, sinergi dan koordinasi yang baik dalam tim memungkinkan pencapaian yang optimal dalam pelaksanaan tugas kesyahbandaran, termasuk dalam hal sertifikasi kelaikan kapal, pengawasan operasional kapal perikanan, serta peningkatan keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi pelayaran. Ke depan, diharapkan adanya penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik melalui peningkatan jumlah personel maupun pelatihan lanjutan, guna semakin meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengawasan di PPS Bungus.

Sasaran Kinerja (SK) 7: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran Kinerja ketujuh (SK-7) yang akan dicapai adalah “Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan pelabuhan perikanan samudera bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja (IK) 10 – Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar aspek manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis, predikat ini merupakan hasil penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Unit kerja yang mendapatkan predikat WBK harus memenuhi sebagian besar kriteria tersebut, termasuk manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Target dan Realisasi

Tabel 25 Capaian Indikator Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan

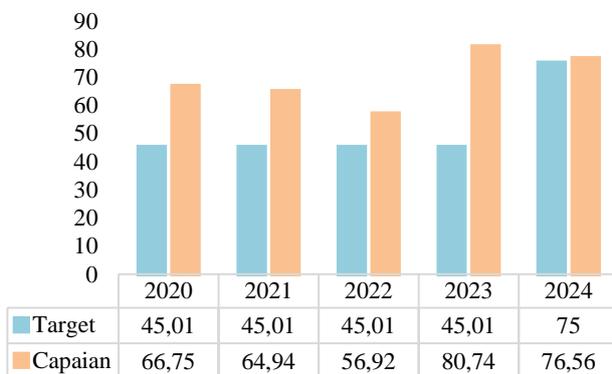
SK 7		Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
IK 10		Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan							
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
66,75	64,94	56,92	80,74	76,56	75	76,56	102,08	85	76,56

No.	Komponen	Bobot	Kriteria Bobot WBK	Nilai Perolehan	% Capaian
A.	Pengungkit (Pemenuhan & Reform)	60			
1	Manajemen Perubahan	8	4,8	2,76	34,49%
2	Penataan Tatalaksana	7	4,2	3,72	53,19%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	10	6	8,52	85,23%
4	Penguatan Akuntabilitas	10	6	7,9	79,05%
5	Penguatan Pengawasan	15	9	11,69	77,93%
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10	6	7,15	71,57%
Total Pengungkit				40,56	67,61%
B.	Hasil	40			
I.	Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	22,5	≥ 18,25	22,20	89,78%
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	17,5	≥ 15,75	16,45	94,00%
2	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5	≥ 2,50	3,75	75,00%
II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,5		15,79	90,25%
	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik/IPKP)	17,5	≥ 14,00	15,79	90,25%
Total Hasil				35,99	89,98%
Total Nilai		100		76,56%	

TERBILANG: TUJUH PULUH ENAM KOMA LIMA ENAM

Tabel 26. Hasil Penilaian LKE WBK PPS Bungus

Lembar Kerja Evaluasi (LKE), yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen Pengungkit (60%) dan komponen Hasil (40%). Komponen Pengungkit mencakup berbagai aspek strategis seperti manajemen perubahan, tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas, serta pengawasan. Sementara itu, komponen Hasil menilai dampak nyata dari implementasi reformasi birokrasi, termasuk kepuasan masyarakat dan efektivitas layanan yang diberikan oleh PPS Bungus.



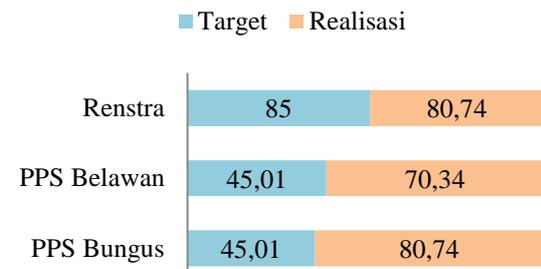
Gambar 22. Capaian PPS Bungus Tahun 2020-2024

dicanangkan sebagai unit kerja yang menjadi bagian dari program WBK. Dengan pencaangan tersebut, target tahunan mengalami peningkatan signifikan menjadi 75, sejalan dengan tingginya ekspektasi terhadap perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada tahun ini, capaian berhasil mencapai 76,56, melampaui target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini didasarkan pada hasil evaluasi melalui proses asistensi dan pendampingan yang dilakukan bersama Inspektorat Jenderal V KKP, sehingga memberikan validasi yang lebih terukur dan komprehensif. Sebaliknya, capaian pada tahun-tahun sebelumnya (2020–2023) dihitung melalui mekanisme penilaian mandiri yang dilakukan bersama tim Ortala DJPT. Penilaian tersebut berfokus pada pemenuhan indikator-indikator awal pembangunan Zona Integritas, yang mencakup berbagai aspek seperti tata kelola organisasi, akuntabilitas, dan penguatan budaya kerja yang berintegritas. Tren capaian yang melampaui target sejak tahun 2020 hingga 2023 mencerminkan komitmen berkelanjutan PPS Bungus dalam membangun Zona Integritas, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal.

Nilai capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus pada tahun 2024 mencapai 76,56, atau setara dengan 102,08% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan keberhasilan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam melampaui target yang telah direncanakan, mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Nilai tersebut diperoleh melalui proses asistensi bersama dengan Tim Inspektorat Jenderal V Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang melakukan pendampingan serta evaluasi secara mendalam. Penilaian Zona Integritas ini mengacu pada

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terlihat bahwa sejak tahun 2020 hingga 2023, PPS Bungus masih berada dalam tahap awal pembangunan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Oleh karena itu, target tahunan selama periode tersebut tetap ditetapkan pada angka 45,01. Target ini mencerminkan fokus PPS Bungus pada pembentukan dasar-dasar tata kelola yang baik, seperti penguatan sistem pengawasan internal dan peningkatan kapasitas organisasi.

Pada tahun 2024, PPS Bungus resmi



Gambar 23. Perbandingan Capaian

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2024, capaian PPS Bungus pada tahun 2024 baru mencapai 90,07% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam mencapai target Renstra secara penuh. Sementara itu, jika dibandingkan dengan satuan kerja (Satker) lain, seperti PPS Belawan, capaian PPS Bungus lebih rendah sebesar 68,52%. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan target yang telah ditetapkan antara kedua Satker tersebut. PPS Belawan masih berada pada tahap awal perencanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK, dengan target tahunan sebesar 45,10. Sebaliknya, PPS Bungus sudah berada pada tahap yang lebih lanjut, dengan target yang lebih tinggi, yaitu 75 pada tahun 2024.

Hal ini mencerminkan bahwa masing-masing Satker memiliki konteks dan fokus pengembangan yang berbeda sesuai dengan tahapan pembangunan Zona Integritas yang sedang dilaksanakan. PPS Bungus, yang sudah berada pada tahap penganangan WBK, menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam memenuhi target yang lebih ambisius dibandingkan dengan PPS Belawan, yang masih dalam tahap awal perencanaan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan dari kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Terlaksananya Asistensi WBK: Proses asistensi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) telah berhasil dilaksanakan dengan pendampingan dari Tim Inspektorat Jenderal V Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui asistensi ini, diperoleh hasil penilaian mandiri yang dilakukan bersama tim asistensi. Hal ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai aspek-aspek yang telah memenuhi standar serta area yang masih memerlukan perbaikan.
2. Sinergitas dan Kolaborasi Antarbagian: Keberhasilan lainnya ditandai dengan adanya sinergitas yang kuat antara seluruh bagian dalam upaya pelaksanaan kegiatan. Seluruh dokumen yang dibutuhkan telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga proses evaluasi dan penilaian dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
3. Efektivitas Tim dan Kepatuhan terhadap SOP: Tim yang terlibat dalam kegiatan ini telah bekerja secara efektif dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini berkontribusi terhadap penyelesaian sebagian besar rekomendasi yang diberikan oleh tim asistensi dari Ortala DJPT. Kepatuhan terhadap SOP juga memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berlangsung sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memenuhi kriteria evaluasi yang ditentukan.

Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja, khususnya terkait dengan Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Kendala utama yang dihadapi adalah belum adanya inovasi yang dapat diterapkan di pelabuhan ini. Inovasi menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan zona integritas, baik dalam bentuk digitalisasi layanan, peningkatan transparansi, maupun efisiensi operasional.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus sangat

dipengaruhi oleh berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Salah satu komponen utama yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah kegiatan persiapan penetapan zona integritas menuju WBK, yang mencakup pemenuhan dokumen pendukung WBK, penguatan komitmen bersama dalam pembangunan zona integritas, serta peningkatan sistem pengawasan internal yang transparan. Selain itu, pelaksanaan evaluasi dan penetapan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga berperan dalam memperkuat implementasi tata kelola yang bersih dan akuntabel. PPS Bungus juga mengadakan berbagai kegiatan pendukung, seperti Forum Konsultasi Publik, yang menjadi wadah interaksi antara PPS Bungus dengan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mengakomodasi masukan untuk perbaikan sistem. Selain itu, dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan Zona Integritas guna memastikan efektivitas penerapan kebijakan dan keberlanjutan reformasi birokrasi. Keseluruhan program ini bertujuan untuk memperkuat transparansi, meningkatkan kualitas layanan publik, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan akuntabilitas.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 27. Analisa Efisiensi Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan	102,08%	76.287.000	76.024.197	77.873.769	1.849.572
$\text{Efisiensi RO Satker} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				2,43%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{2,43\%}{20} \times 50 \right)$				56,1%	

Pencapaian indikator kinerja dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Pelabuhan Perikanan didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 76.287.000. Hingga akhir tahun 2024, tingkat penyerapan anggaran telah mencapai Rp 76.287.000 atau sekitar 99,66%, menunjukkan optimalisasi dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Selain itu, pelaksanaan program ini juga berhasil mencapai efisiensi sebesar 2,43%, dengan nilai efisiensi mencapai 56,1%. Capaian ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel, serta komitmen dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan berorientasi pada peningkatan integritas di lingkungan pelabuhan. Keberhasilan ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung implementasi reformasi birokrasi dan peningkatan layanan kepada masyarakat.

Sumber Daya Manusia

Dalam upaya mendukung pencapaian indikator kinerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Pelabuhan Perikanan, Kepala Pelabuhan mengambil langkah strategis dengan membentuk tim pendukung yang terdiri dari 44 pegawai PPS Bungus, yang mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga Pramubakti. Optimalisasi sumber daya manusia ini dilakukan secara efisien dengan menerapkan sistem kerja yang fleksibel, di mana setiap pegawai tidak hanya menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), tetapi juga melaksanakan tanggung jawab tambahan dalam pemenuhan dokumen WBK. Pendekatan ini memungkinkan percepatan proses administratif dan memastikan bahwa seluruh persyaratan dapat terpenuhi dengan baik tanpa memerlukan tambahan tenaga kerja. Selain itu, keterlibatan aktif

seluruh pegawai dalam proses ini juga mendorong budaya kerja kolaboratif, meningkatkan rasa tanggung jawab bersama, serta memperkuat komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi.

Indikator Kinerja (IK) 11 – Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada audit, reuiu, dan evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada triwulan IV 2023 s.d. triwulan IV tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Formula penghitungan yaitu persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang diberikan.

Target dan Realisasi

Tabel 28 Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja” Tahun 2024

SK 7	Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
IK 11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	92	88	80	88	110	-	-

Capaian indikator kinerja terkait persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif. Persentase pemanfaatan rekomendasi mencapai 88%, atau setara dengan 110% dari target yang telah ditetapkan, mencerminkan efektivitas dalam menindaklanjuti temuan pengawasan untuk peningkatan kualitas layanan dan operasional pelabuhan. Secara keseluruhan, terdapat 25 rekomendasi yang diterbitkan selama tahun 2024, dengan rincian 22 rekomendasi telah diselesaikan secara tuntas, sementara 3 rekomendasi masih dalam status pending.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor penyebab keberhasilan Indikator Kinerja (IK) 11 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dapat dijelaskan dengan beberapa poin utama. Pertama, adanya tindak lanjut yang konsisten terhadap rekomendasi yang muncul dari laporan Survei Kepuasan Masyarakat. Ini mencerminkan komitmen pelabuhan untuk merespons dan memperbaiki layanan berdasarkan umpan balik langsung dari pengguna jasa. Kedua, pelaksanaan kebijakan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi memberikan insentif positif yang mendorong peningkatan kinerja. Kriteria penilaian yang komprehensif, mencakup aspek kinerja, kehadiran, kerjasama, inovasi/kreativitas, serta rekam jejak yang bebas dari komplek personal, memberikan landasan yang jelas untuk memotivasi dan menghargai kontribusi positif pegawai.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian indikator kinerja ini antara lain meliputi pembentukan tim-tim kerja yang bersinergi lintas unit, serta pemenuhan dokumen tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan. Pembentukan tim kerja yang solid dan terkoordinasi menjadi dasar penting dalam pelaksanaan program, karena memungkinkan distribusi tugas yang lebih efisien dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

Sementara itu, penyusunan dokumen tindak lanjut atas hasil pengawasan tidak hanya menjadi bentuk akuntabilitas, tetapi juga merupakan instrumen utama dalam proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dokumen ini memastikan bahwa setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara konkret dan tepat waktu. Di samping itu, kegiatan-kegiatan yang secara langsung mendukung tercapainya indikator kinerja juga dilaksanakan secara strategis, seperti penguatan pengawasan di lapangan untuk memastikan kepatuhan dan ketertiban operasional, peningkatan koordinasi antar-unit kerja guna meminimalisir tumpang tindih atau kesenjangan pelaksanaan tugas, serta optimalisasi sistem administrasi dan pencatatan dokumen kapal perikanan agar lebih akurat, terintegrasi, dan mudah diakses.

Dengan demikian, sinergi antar-tim kerja dan pemenuhan terhadap dokumen tindak lanjut hasil pengawasan menjadi dua pilar utama yang saling melengkapi dalam menjamin efektivitas implementasi program. Upaya ini tidak hanya bertujuan mencapai indikator kinerja secara optimal, tetapi juga menjamin keberlanjutan pencapaian di masa mendatang.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 29. Analisa Efisiensi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	110%	74.823.000	74.788.267	82.305.300	7.517.033
$\text{Efisiensi RO Satker} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				10,05%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{10,05\%}{20} \times 50 \right)$				75,13%	

Dalam upaya mencapai indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dukungan anggaran memainkan peran penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaannya. Pada tahun 2024, alokasi anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 74.823.000,- dengan realisasi hingga akhir tahun mencapai Rp 74.788.267,- atau setara dengan 99,95% dari total yang direncanakan. Tingginya tingkat realisasi ini mencerminkan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang efisien, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, efisiensi anggaran dalam pelaksanaan rekomendasi pengawasan juga tercermin dari tingkat efisiensi sebesar 10,05%, dengan nilai efisiensi mencapai 75,13%. Capaian ini menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan tidak hanya terserap dengan baik, tetapi juga dikelola secara efektif dan akuntabel, sehingga memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja pelabuhan serta memperkuat transparansi dan tata kelola yang lebih baik.

Sumber Daya Manusia

Dalam upaya menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP), Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial didukung oleh sumber daya manusia dari berbagai bagian, termasuk keuangan, Barang Milik Negara (BMN), tim Tata Kelola Sarana dan Prasarana, serta tim kerja Pelayanan Usaha. Setiap bagian memiliki peran

strategis dalam memastikan bahwa rekomendasi hasil pengawasan dapat diterapkan dengan baik dan tepat waktu.

Tim keuangan berperan dalam pengelolaan dan pelaporan anggaran, memastikan bahwa setiap penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim BMN bertanggung jawab atas pengelolaan aset pelabuhan, termasuk pemeliharaan serta pencatatan Barang Milik Negara agar lebih transparan dan akuntabel. Tim Tata Kelola Sarana dan Prasarana berfokus pada pemeliharaan serta pengoptimalan infrastruktur pelabuhan, guna mendukung operasional yang lebih efisien dan berdaya guna. Sementara itu, tim kerja Pelayanan Usaha memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran layanan kepada para pelaku usaha perikanan, baik dalam aspek perizinan, fasilitas, maupun regulasi yang diterapkan di pelabuhan.

Seluruh tim bekerja secara sinergis dan terintegrasi, memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan oleh Itjen KKP dapat ditindaklanjuti secara optimal. Implementasi yang tepat atas rekomendasi ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mendorong efisiensi, transparansi, serta perbaikan tata kelola pelabuhan secara menyeluruh. Dengan pendekatan ini, PPS Bungus dapat terus meningkatkan kinerja pelayanan, efektivitas pengelolaan sumber daya, serta daya saing pelabuhan dalam mendukung sektor perikanan yang berkelanjutan.

Indikator Kinerja (IK) 12 – Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan turunan dari Indikator kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan merupakan penilaian Kementerian PAN & RB atas akuntabilitas kinerja KKP. Rekonsiliasi kinerja adalah proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pengelola kinerja, menjadi sasaran bersama untuk mengidentifikasi perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja, serta sebagai sarana pendampingan untuk mengawal SAKIP yang lebih baik. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sarana/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Terdapat 4 (empat) aspek penilaian rekonsiliasi kinerja, yakni aspek kepatuhan (bobot 25%), aspek kesesuaian (bobot 25%), aspek ketercapaian (bobot 30%), dan aspek ketepatan (bobot 20%). Nilai rekonsiliasi kinerja PPS Bungus diukur dari hasil penilaian atas implementasi SAKIP di PPS bungus yang di hitung menggunakan kertas kerja rekonsiliasi yang sesuai ketentuan.

Target dan Realisasi

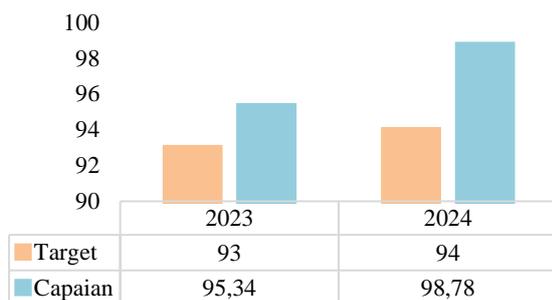
Tabel 30 Capaian Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 7 Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
IK 12 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	95,34	98,78	94	98,78	105,09	-	-

Tabel 31. Aspek Penilaian Lembar Kerja Rekonsiliasi

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	Kepatuhan	Kesesuaian	Ketercapaian	Ketepatan
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per Aspek	100	100	115,13	100
Skor dikali Bobot	25	25	28,78	20
Total Skor	98,78			

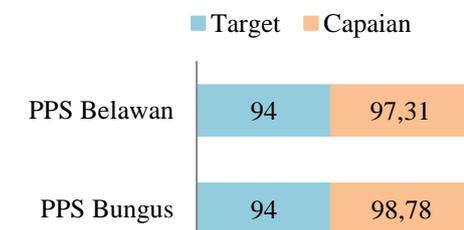
Capaian nilai rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan skor sebesar 98,78 atau setara dengan 105,09% dari target yang telah ditetapkan. Nilai tersebut diperoleh melalui proses pengisian lembar kerja rekonsiliasi kinerja tahun 2024 dalam kegiatan rekonsiliasi yang dilaksanakan bersama Eselon I Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan dan pelaporan kinerja yang berbasis data serta komitmen terhadap peningkatan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, pencapaian ini juga menjadi bukti sinergi yang baik antara berbagai unit kerja dalam memastikan setiap aspek operasional pelabuhan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan hasil yang melampaui target, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus diharapkan dapat terus memperkuat sistem manajemen kerjanya, meningkatkan efisiensi layanan, serta mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.



Gambar 24. Perbandingan Tahun Sebelumnya

rekonsiliasi dan optimalisasi tata kelola, memberikan dampak positif terhadap pencapaian target yang lebih tinggi. Dengan tren peningkatan ini, diharapkan pelabuhan dapat terus melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan guna mempertahankan serta meningkatkan kualitas layanan dan operasional di masa mendatang.

Apabila dibandingkan dengan capaian satuan kerja (satker) lainnya, kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan PPS Belawan. Selisih capaian antara kedua satker tersebut mencapai 1,57%, yang mengindikasikan bahwa PPS Bungus berhasil mencatat prestasi yang lebih baik dalam hal efisiensi atau produktivitas.



Gambar 25. Perbandingan dengan Satket Lain

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor utama yang mendukung keberhasilan Indikator Kinerja (IK) Nilai Rekonsiliasi Kinerja di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus mencakup beberapa aspek penting yang memastikan efektivitas pengelolaan dan pelaporan kinerja pelabuhan.

1

Sinergi Tim Pengelola AKIP

Keberhasilan IK ini didukung oleh kerja sama yang solid antara tim pengelola Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam melakukan pelaporan dan pemantauan kinerja. Sinergi ini memungkinkan kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan, keselarasan antara data dan informasi yang disampaikan, serta pencapaian target yang telah ditetapkan. Dengan adanya koordinasi yang baik, proses pelaporan menjadi lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

2

Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja

Faktor penting lainnya adalah adanya perencanaan yang matang serta implementasi kinerja yang terstruktur. Tahapan ini mencakup penyusunan strategi pencapaian IK, alokasi sumber daya yang tepat, serta pemantauan progres untuk memastikan bahwa setiap indikator kinerja

dapat dicapai secara optimal. Perencanaan yang baik memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kinerja pelabuhan.

3 Pelaporan AKIP yang Bersinergi dengan Tim Teknis Pelabuhan

Keberhasilan IK ini juga dipengaruhi oleh kualitas pelaporan AKIP, yang dilakukan secara sinergis antara tim pengelola kinerja dan tim teknis pelabuhan. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap aspek operasional yang dilaporkan telah melalui verifikasi teknis yang akurat, sehingga laporan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi kinerja pelabuhan secara riil. Dengan koordinasi yang baik, penyampaian laporan menjadi lebih kredibel, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan standar akuntabilitas yang telah ditetapkan.

Dengan adanya sinergi antar tim, perencanaan yang terstruktur, serta koordinasi yang erat dalam pelaporan AKIP, PPS Bungus dapat terus meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja, sehingga mendorong peningkatan pelayanan dan pengelolaan pelabuhan secara keseluruhan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program atau kegiatan yang berperan dalam menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja (IK) 12 adalah pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap implementasi program serta penggunaan anggaran. Monitoring yang dilakukan secara berkala memungkinkan identifikasi dini terhadap kendala yang muncul, sehingga langkah perbaikan dapat segera diterapkan untuk memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Evaluasi berperan dalam menilai efektivitas program serta efisiensi penggunaan sumber daya, sementara pelaporan yang transparan dan akuntabel memastikan seluruh proses terdokumentasi dengan baik dan dapat menjadi bahan perbaikan di masa mendatang. Dengan penerapan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang optimal, diharapkan pencapaian IK 12 dapat terus meningkat, mendukung tata kelola yang lebih baik, serta mengurangi risiko kegagalan dalam pelaksanaan program.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 32. Analisa Efisiensi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	115,09%	20.762.000	20.760.701	23.894.985	3.134.284
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				15,1%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{15,1\%}{20} \times 50 \right)$				87,75%	

Pencapaian indikator kinerja nilai rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 20.762.000. Hingga akhir tahun, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 20.760.701 atau setara dengan 99,99% dari total anggaran yang dialokasikan. Tingginya tingkat penyerapan ini menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan anggaran serta optimalisasi sumber daya yang tersedia. Selain itu, efisiensi pelaksanaan program juga tercermin dari tingkat efisiensi sebesar 15,1% dengan nilai efisiensi mencapai 87,75%. Capaian

ini mencerminkan komitmen kuat dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pelabuhan secara keseluruhan. Dengan hasil yang positif ini, diharapkan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dapat terus meningkatkan efektivitas program serta mempertahankan efisiensi dalam pengelolaan anggaran di tahun-tahun mendatang.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang berperan dalam mendukung tercapainya indikator kinerja ini tergabung dalam Tim Pengelola Kinerja PPS Bungus, yang terdiri dari 10 orang anggota tim kerja. Selain itu, terdapat juga dukungan dari pegawai yang tergabung dalam Tim PM SAKIP Pelabuhan, yang berjumlah 6 orang. Para pegawai yang terlibat dalam kedua tim ini diberikan tugas tambahan di luar tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), sebagai bentuk optimalisasi sumber daya yang tersedia. Meskipun tugas yang dijalankan tidak sepenuhnya sesuai dengan tupoksi utama mereka, komitmen dan sinergi yang kuat dari seluruh anggota tim memungkinkan pencapaian kinerja yang optimal. Dengan adanya keterlibatan SDM yang berdedikasi, pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, sehingga mendukung peningkatan tata kelola pelabuhan secara keseluruhan.

Indikator Kinerja (IK) 13 – Indeks Profesionalitas ASN di PPS Bungus

IKU ini adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas diukur menggunakan standar profesionalitas ASN yang terdiri dari empat dimensi, yaitu:

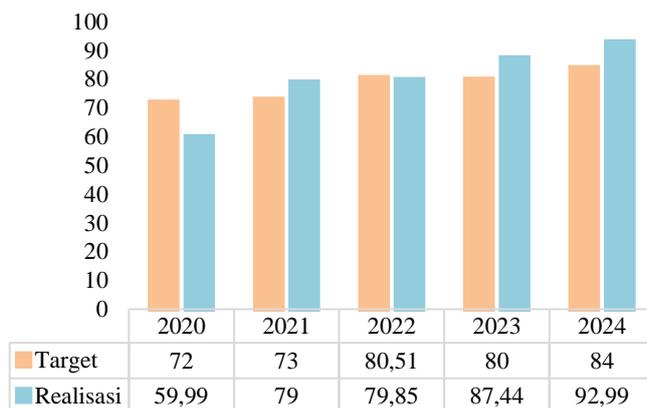
- 1 **Kualifikasi**, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
- 2 **Kompetensi**, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis);
- 3 **Kinerja**, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
- 4 **Disiplin**, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

Target dan Realisasi

Tabel 33 Capaian Indikator IP ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 7 Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
IK 13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
59,99	80,51	79,85	87,44	92,99	84	92,99	110,70	72	92,99

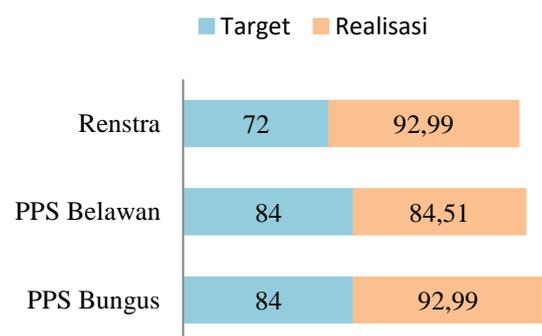
Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan skor sebesar 92,99 atau setara dengan 110,70% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini mencerminkan meningkatnya kualitas dan kompetensi ASN dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya, baik dalam aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, maupun kedisiplinan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya pengembangan SDM, termasuk peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pembinaan, serta penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih efektif. Dengan indeks profesionalitas yang terus meningkat, diharapkan ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dapat semakin berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi layanan, tata kelola yang lebih baik, serta mewujudkan lingkungan kerja yang profesional dan berintegritas.



Gambar 26. Capaian PPS Bungus Tahun 2020 - 2024

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terjadi peningkatan yang signifikan dalam Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Pada tahun 2020, capaian masih berada di bawah target, dengan skor 59,99 dari target 72. Namun, sejak tahun 2021, kinerja terus mengalami perbaikan dengan capaian yang secara konsisten melampaui target. Hal ini terlihat pada tahun 2021, di mana indeks mencapai 79 dari target 73, kemudian meningkat pada tahun 2022 dengan capaian 79,85 dari target 80,51, serta tahun 2023 dengan capaian 87,44 dari target 80.

Tren peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai upaya dalam meningkatkan profesionalitas ASN di PPS Bungus, baik melalui pengembangan kompetensi, pembinaan, maupun sistem manajemen kinerja yang lebih efektif. Dengan capaian tahun 2024 yang mencapai 92,99 menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa strategi dan program yang diterapkan telah memberikan dampak positif yang signifikan. Keberhasilan ini menjadi landasan yang kuat untuk terus memperkuat profesionalisme aparatur dalam mendukung tata kelola pelabuhan yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan yang optimal. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024, capaian Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah mencapai 129,15% dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas strategi peningkatan profesionalitas ASN yang telah diterapkan secara konsisten selama beberapa tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan satuan kerja (Satker) lain, seperti Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, capaian PPS Bungus juga menunjukkan hasil yang lebih unggul. Pada tahun 2023, capaian PPS Belawan berada pada angka 84,51 atau 100,61% dari target yang ditetapkan, sedangkan capaian PPS Bungus lebih tinggi dengan selisih sebesar 10,09%. Perbedaan ini menegaskan bahwa upaya peningkatan profesionalitas ASN di PPS Bungus telah memberikan hasil yang lebih optimal. Keberhasilan ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan kapasitas SDM, implementasi kebijakan yang lebih efektif, serta pengelolaan kinerja yang semakin baik untuk mendukung tata kelola pelabuhan yang profesional dan berintegritas.



Gambar 27. Perbandingan Capaian

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Beberapa usaha yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah dengan: 1) memberikan kesempatan ASN untuk menempatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Webinar/Seminar/Workshop/Magang/Sejenis; 2) memberikan himbauan dari bagian kepegawaian terkait pengembangan kompetensi pegawai, khususnya himbauan bagi pegawai yang belum mencapai 20 JP; 3) partisipasi aktif dari seluruh pegawai untuk mengikuti diklat/seminar/pelatihan guna meningkatkan kompetensi pegawai.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah perencanaan, pengembangan dan pembinaan Disiplin Pegawai. Selain itu kegiatan monitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai melalui seminar, diklat, maupun bimbingan teknis baik secara online maupun *offline*.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 34. Analisis Efisiensi Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	110,70%	30.545.000	29.791.874	33.813.315	4.021.441
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				13,17%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{13,17\%}{20} \times 50 \right)$				82,93%	

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.545.000. Hingga akhir tahun, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 29.791.874 atau 97,57% dari total anggaran yang dialokasikan. Tingkat penyerapan yang tinggi ini menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan anggaran serta pemanfaatan sumber daya secara optimal. Selain itu, efisiensi dalam pelaksanaan program juga tercermin dari tingkat efisiensi sebesar 13,17%, dengan nilai efisiensi mencapai 82,93%. Pencapaian ini mencerminkan komitmen dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk mendukung peningkatan profesionalitas ASN. Dengan efisiensi yang baik dan capaian kinerja yang melampaui target, diharapkan PPS Bungus dapat terus meningkatkan efektivitas program pengembangan SDM, mempertahankan kinerja ASN yang profesional, serta memperkuat tata kelola pelabuhan yang lebih berkualitas di masa mendatang.

Sumber Daya Manusia

Dalam upaya mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas (IP) ASN, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus didukung oleh seluruh pegawai yang berjumlah 36 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Setiap pegawai dihimbau untuk secara aktif mengikuti berbagai

macam pelatihan yang sesuai dengan jenis jabatan masing-masing. Partisipasi dalam pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai, khususnya dalam memenuhi standar dimensi pendidikan dan pelatihan (diklat) minimal 20 Jam Pelajaran (JP). Dengan adanya pelatihan yang berkelanjutan, pegawai diharapkan dapat mengembangkan keterampilan yang lebih relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mendukung peningkatan kualitas layanan, efektivitas kerja, serta pencapaian kinerja yang lebih optimal di PPS Bungus.

Indikator Kinerja (IK) 14 – Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%).
- 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
- 3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
- 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Target dan Realisasi

Tabel 35 Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 7		Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
IK 14		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus		
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
-	88,4	93,35	86,70	96,29	80	96,29	120,36	72,5	96,29	



Gambar 28. Capaian PPS Bungus Tahun 2021-2024

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 mencapai 96,29 atau 120,29% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini diperoleh berdasarkan nilai capaian Eselon I (DJPT). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar 8,42%. Selain itu, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024, capaian PPS Bungus telah mencapai 132,81%,

menunjukkan pencapaian yang signifikan melampaui target yang direncanakan. Namun, karena nilai capaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa pada tahun 2024 sepenuhnya mengacu pada nilai capaian DJPT, maka seluruh satuan kerja (Satker) memiliki capaian yang sama, sehingga perbandingan antar Satker tidak dapat dilakukan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus merupakan hasil dari implementasi sistem pengadaan yang terstruktur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan, memastikan bahwa setiap tahapan berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel.

Setiap kegiatan pengadaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang, yang mencakup identifikasi kebutuhan, analisis anggaran, serta penyusunan strategi pengadaan yang tepat. Dengan

adanya perencanaan yang sistematis, pelaksanaan PBJ dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan target operasional pelabuhan. Selain itu, setiap proses pengadaan didukung dengan kelengkapan dokumen administratif dan teknis, seperti dokumen perencanaan, dokumen kontrak, berita acara serah terima, serta laporan evaluasi, yang memastikan kesesuaian dengan standar yang ditentukan serta meminimalisir risiko ketidaksesuaian dalam pelaksanaan.

Selain aspek perencanaan dan dokumentasi, keberhasilan indikator ini juga didukung oleh pengawasan dan evaluasi yang ketat, baik dari tim internal PPS Bungus maupun pihak eksternal yang berwenang. Pengawasan yang efektif memastikan bahwa setiap pengadaan dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kompetitif, sehingga menghindari praktik yang tidak sesuai dengan regulasi dan menjaga kualitas barang/jasa yang diperoleh.

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam bidang pengadaan barang/jasa. Melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi secara berkala, tim PBJ di PPS Bungus dapat memahami dan menerapkan mekanisme pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengadaan.

Dengan adanya perencanaan yang sistematis, kelengkapan dokumen yang sesuai standar, pengawasan yang ketat, serta SDM yang profesional, PPS Bungus dapat memastikan kepatuhan yang tinggi dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga mendukung peningkatan operasional pelabuhan serta pelayanan kepada stakeholder perikanan secara lebih optimal.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Keberhasilan ataupun kendala dalam pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Salah satu faktor pendukung keberhasilan adalah adanya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana internal yang menunjang operasional secara optimal. Selain itu, pada tahun 2024, pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi turut berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam proses pengadaan barang/jasa. Namun, tantangan dalam pelaksanaan pengadaan juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi pencapaian indikator, seperti keterlambatan proses pengadaan, kendala administratif, atau faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu, optimalisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan menjadi kunci utama dalam memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 36. Analisa Efisiensi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	120,36%	482.302.000	481.712.920	580.498.687	98.785.767
$\text{Efisiensi RO Satker} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				20,48%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{20,48\%}{20} \times 50 \right)$				101,2%	

Indikator kinerja tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 482.302.000. Hingga akhir tahun, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 481.712.920 atau 99,88% dari total anggaran yang dialokasikan. Tingkat efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa juga menunjukkan hasil yang positif, dengan efisiensi sebesar 20,48% dan nilai efisiensi mencapai 101,2%. Capaian ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang optimal dalam mendukung pelaksanaan program pengadaan, sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif dan tepat guna.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh lima orang tim pengadaan, yang terdiri dari satu pejabat pengadaan dan empat orang panitia pengadaan yang mendapatkan penugasan tambahan dari atasan, karena bukan berasal dari jabatan pengelola PBJ.

Indikator Kinerja (IK) 15 – Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator kinerja ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan Barang Milik Negara lingkup Unit Eselon I yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2019-2024 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Target dan Realisasi

Tabel 37 Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 7		Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
IK 15		Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus		
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
-	87,5	97,5	97,5	90	80	90	112,50	72,5	90	

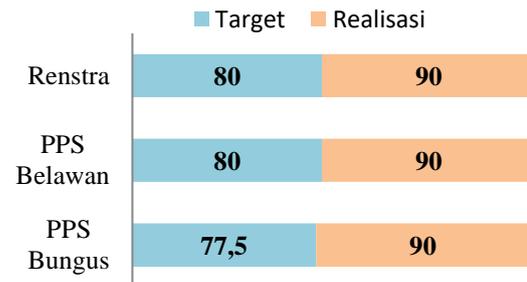


Gambar 29. Capaian PPS Bungus Tahun 2021-2024

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 mencapai 90% atau 112,50% dari target tahunan yang telah ditetapkan. Capaian ini diperoleh berdasarkan nilai capaian dari Eselon I (DJPT). Namun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 13,31% dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2023. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kebijakan, tantangan dalam pengelolaan aset, atau faktor administratif lainnya yang memengaruhi kepatuhan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi serta langkah

strategis untuk meningkatkan kembali tingkat kepatuhan dan optimalisasi pengelolaan BMN di tahun-tahun mendatang.

Jika dibandingkan dengan target akhir (2024) Renstra, capaian tahun 2024 mencapai 116,13%. Namun, karena nilai capaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN pada tahun 2024 sepenuhnya mengacu pada nilai capaian DJPT, maka seluruh satuan kerja (Satker) memiliki capaian yang sama, sehingga perbandingan antar Satker tidak dapat dilakukan.



Gambar 30. Perbandingan Capaian

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung oleh pembentukan tim pengelola BMN yang bertugas dalam perencanaan, pencatatan, pemeliharaan, dan pelaporan aset secara sistematis. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku turut berperan dalam memastikan kepatuhan yang tinggi. Penerapan prosedur yang tertib dan akuntabel dalam setiap tahapan pengelolaan aset menjadi faktor kunci dalam menjaga efisiensi serta transparansi dalam pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di PPS Bungus.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja (IK) 15 dipengaruhi oleh berbagai program dan kegiatan, salah satunya adalah pelaporan keuangan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). Pelaporan keuangan yang tertib, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi faktor kunci dalam memastikan tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Ketepatan dalam pencatatan, validasi, dan pelaporan aset sangat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 38. Analisa Efisiensi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	112,50%	2.880.000	2.880.000	3.240.000	360.000
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				12,5%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right)$ $= 50\% + \left(\frac{12,5\%}{20} \times 50\right)$				81,25%	

Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang sangat baik, didukung oleh alokasi

anggaran sebesar Rp 2.880.000. Hingga akhir tahun, anggaran tersebut telah terserap sepenuhnya, dengan tingkat penyerapan mencapai 100%. Selain itu, aspek efisiensi dalam pengelolaan anggaran juga menunjukkan hasil yang positif, dengan tingkat efisiensi sebesar 12,5% dan nilai efisiensi mencapai 81,25%. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program kepatuhan pengelolaan BMN telah dilakukan dengan optimal, menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan tepat sasaran.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari perencanaan yang matang serta implementasi yang disiplin dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Setiap tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan, pencatatan, pemanfaatan, hingga penghapusan BMN, dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pendokumentasian aset secara akurat dan transparan juga menjadi faktor penting dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan.

Selain itu, pengawasan dan evaluasi berkala turut berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BMN di PPS Bungus. Dengan adanya mekanisme kontrol yang efektif, pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan prosedur, meminimalkan potensi penyimpangan, serta memastikan bahwa setiap aset digunakan secara maksimal untuk mendukung operasional pelabuhan.

Ke depan, PPS Bungus akan terus meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan BMN, termasuk melalui penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi dalam pencatatan aset, serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan kepatuhan dalam pengelolaan BMN dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, guna mendukung pengelolaan pelabuhan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus terdiri dari tiga personel utama, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim ini meliputi satu orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Pengelola BMN, yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pencatatan, pemanfaatan, serta penghapusan aset BMN di PPS Bungus. Selain itu, terdapat dua orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan jabatan Pranata Komputer, yang berperan dalam pengelolaan sistem informasi BMN, termasuk pemrosesan data, digitalisasi pencatatan aset, serta pengembangan sistem pelaporan berbasis teknologi.

Dengan adanya tenaga yang kompeten, terstruktur, dan memiliki spesialisasi masing-masing, proses pencatatan, pemeliharaan, serta pelaporan BMN dapat dilakukan lebih efektif dan akuntabel. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan data BMN juga menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam pencatatan dan pelaporan aset pelabuhan. Keberadaan tim yang solid ini memungkinkan PPS Bungus untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi BMN, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aset, serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pelabuhan. Dengan dukungan SDM yang profesional, diharapkan pengelolaan BMN di PPS Bungus dapat terus meningkat dan berkontribusi pada efisiensi operasional serta akuntabilitas pelabuhan secara keseluruhan.

Indikator Kinerja (IK) 16 – Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Kinerja merupakan prestasi kerja yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Untuk menilai efektivitas suatu program, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). Salah satu dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja adalah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

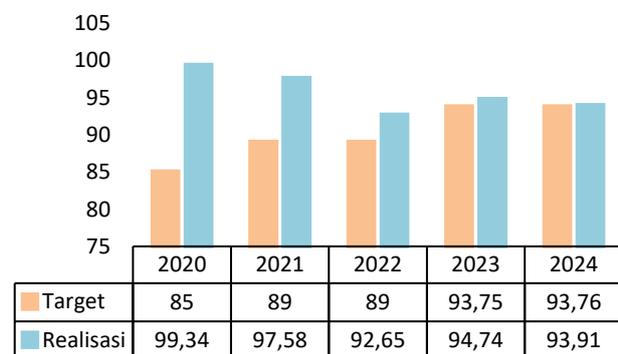
Salah satu indikator yang digunakan dalam evaluasi kinerja adalah Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja suatu Kementerian atau Lembaga. Pengukuran ini dilakukan dengan menilai kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Penilaian IKPA didasarkan pada 12 indikator utama yang mencerminkan berbagai aspek dalam pelaksanaan anggaran, yaitu: Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekonsiliasi LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus. Dengan adanya indikator-indikator ini, pelaksanaan anggaran dapat dipantau secara komprehensif, sehingga memungkinkan identifikasi potensi perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara.

Target dan Realisasi

Tabel 39 Capaian Kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 7		Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
IK 16		Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus		
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
-	99,34	97,58	92,65	93,91	93,76	93,91	100,16	89	93,91	



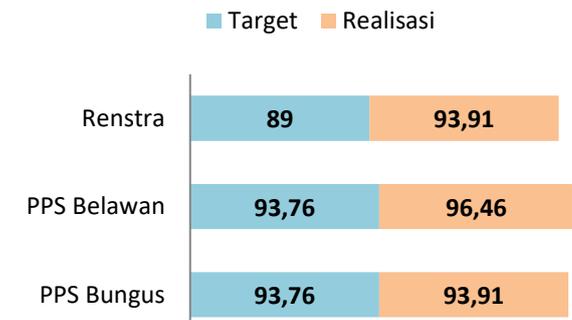
Gambar 31. Capaian PPS Bungus Tahun 2020-2023

Capaian Indikator Kinerja Nilai IKPA di PPS Bungus pada tahun 2024 mencapai 93,91 atau sebesar 100,16% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi target, realisasi capaian tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, nilai capaian IKPA PPS Bungus tercatat sebesar 94,74 dengan persentase pencapaian sebesar 101,06%.

Penurunan ini mencerminkan adanya beberapa faktor yang mungkin memengaruhi efektivitas pelaksanaan anggaran, seperti perubahan kebijakan, efisiensi dalam pengelolaan keuangan, atau kendala administratif yang dihadapi dalam proses pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab penurunan serta strategi perbaikan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di tahun-tahun mendatang.

Jika dibandingkan dengan target akhir (2024) Renstra, capaian Indikator Kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 telah mencapai 105,52%, yang menunjukkan pencapaian melampaui target yang telah ditetapkan.

Namun, jika dibandingkan dengan satuan kerja lain, seperti Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, capaian PPS Bungus masih lebih rendah sebesar 2,72%. Capaian IKPA PPS Belawan tercatat sebesar 96,46 atau 102,88% dari target yang telah ditetapkan. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti tingkat penyerapan anggaran dan deviasi pada Halaman III DIPA, di mana PPS Bungus memiliki angka yang lebih rendah dibandingkan dengan PPS Belawan. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap selisih capaian IKPA antar satuan kerja, sehingga diperlukan optimalisasi dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan keuangan untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya.



Gambar 32. Perbandingan Capaian

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja pelaksanaan anggaran PPS Bungus adalah dengan menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu; ketepatan waktu revolving UP; ketepatan penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari return SP2D, memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah kegiatan dukungan manajemen internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, dengan komponen layanan dukungan manajemen internal untuk kegiatan layanan perkantoran.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 40. Analisa Efisiensi Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	100,16%	12.982.960.000	12.987.260.618	13.003.732.736	16.472.118
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n (AARO_i \times CRO_i) - RARO_i}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				0,13%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{0,13\%}{20} \times 50 \right)$				50,33%	

Indikator Kinerja Nilai IKPA di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus pada tahun 2024 menunjukkan capaian yang optimal, didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 12.982.960.000. Hingga akhir tahun, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 12.987.260.618 atau 100% dari total anggaran yang dialokasikan. Selain itu, tingkat efisiensi dalam pelaksanaan anggaran menunjukkan efisiensi sebesar 0,13%, dengan nilai efisiensi mencapai 50,33%. Capaian ini

menegaskan bahwa pengelolaan anggaran di PPS Bungus telah dilakukan secara optimal, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun tingkat efisiensi anggaran relatif kecil, keberhasilan realisasi anggaran yang mencapai 100% mencerminkan bahwa perencanaan dan eksekusi anggaran telah berjalan secara efektif dan terstruktur. Setiap tahapan penggunaan anggaran telah mempertimbangkan aspek prioritas, kebutuhan operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berlaku, sehingga mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran, tanpa menimbulkan pemborosan atau deviasi dari rencana yang telah ditetapkan.

Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, didukung 6 (enam) orang pegawai yang terdiri dari 2 (dua) orang pengelola keuangan, 1 (satu) orang analis keuangan, 1 (satu) orang Pranata Keuangan APBN Terampil, 1 (satu) orang Analis Pengelola Keuangan APBN Muda, dan 1 (satu) orang Analis Pengelola Keuangan APBN Madya.

Indikator Kinerja (IK) 17 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Perlu menetapkan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) atau biasa disebut Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagai Indikator Kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) diperoleh dari penggabungan 50% nilai kinerja perencanaan anggaran dan 50% nilai kinerja pelaksanaan anggaran.

- Nilai Kinerja Anggaran > 90 persen sampai dengan 100 persen dikategorikan Sangat Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran > 80 persen sampai dengan 90 persen dikategorikan Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran > 60 persen sampai dengan 80 persen dikategorikan Cukup atau Normal;
- Nilai Kinerja Anggaran > 50 persen sampai dengan 60 persen dikategorikan Kurang;
- Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50 persen dikategorikan Sangat Kurang;

Target dan Realisasi

Tabel 41 Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 7		Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
IK 17		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	-	90	71	90	126,76	-	-



Gambar 33. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

dalam metode pengukuran ini menyebabkan data tahun sebelumnya tidak dapat dijadikan acuan untuk analisis tren atau evaluasi peningkatan dan penurunan kinerja secara langsung. Jika dibandingkan dengan satuan kerja lainnya, seperti Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, baik target maupun capaian yang diperoleh PPS Bungus berada pada posisi yang setara. Hal ini menunjukkan bahwa dalam aspek perencanaan anggaran, kedua satuan kerja memiliki performa yang seimbang, mencerminkan adanya keselarasan dalam penerapan kebijakan dan strategi perencanaan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus tidak terlepas dari adanya sinergi yang baik antara tim pengelola anggaran dan petugas pelaporan online. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam menjaga akurasi, ketepatan waktu, serta kesesuaian data yang dilaporkan.

Salah satu bentuk implementasinya adalah pelaksanaan penginputan capaian output secara rutin melalui aplikasi SAKTI yang dilakukan setiap awal bulan. Selain itu, kegiatan sinkronisasi data capaian output juga secara aktif dilakukan antara tim keuangan dan tim teknis, guna memastikan konsistensi data antara realisasi fisik dan realisasi anggaran.

Dengan sistem kerja yang terkoordinasi dan disiplin pelaporan yang baik, PPS Bungus mampu mempertahankan kualitas pelaporan anggaran yang transparan, akuntabel, dan mendukung evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Capaian indikator kinerja dalam pelaporan keuangan sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan pelaporan keuangan di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Pelaporan yang tepat waktu, akurat, dan transparan menjadi elemen krusial dalam memastikan pengelolaan aspek finansial Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus berjalan optimal.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian ini meliputi pemutakhiran data secara berkala, pemantauan realisasi anggaran, serta koordinasi intensif antara tim teknis, keuangan, dan pelaporan. Kinerja pelaporan yang baik tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi keuangan, tetapi juga menjadi landasan pengambilan keputusan yang efektif dalam pengelolaan pelabuhan.

Sebaliknya, keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam pelaporan dapat menghambat pencapaian indikator ini, serta berpotensi menimbulkan deviasi anggaran yang berdampak pada akuntabilitas lembaga secara keseluruhan.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 42. Analisa Efisiensi Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	126,76%	35.855.000	35.853.560	45.449.798	9.596.238
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				26,76%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{26,76\%}{20} \times 50 \right)$				116,9%	

Pencapaian Indikator Kinerja (IK) 17 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 35.855.000. Hingga akhir tahun, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 35.853.560 atau 100% dari total anggaran yang dialokasikan. Selain itu, tingkat efisiensi dalam pelaksanaan anggaran menunjukkan efisiensi sebesar 26,76% dengan nilai efisiensi mencapai 116,9%. Capaian ini mencerminkan bahwa penggunaan anggaran dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Tingginya nilai efisiensi menunjukkan adanya strategi yang efektif dalam pengelolaan anggaran, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara maksimal dengan pemanfaatan sumber daya yang lebih hemat dan efisien.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus turut didukung oleh ketersediaan dan kinerja sumber daya manusia yang kompeten. Saat ini, pelaksanaan pelaporan dan pemantauan anggaran di PPS Bungus ditopang oleh 2 (dua) orang pegawai, masing-masing memiliki peran strategis dalam pengelolaan data keuangan.

Pertama, seorang Aparatur Pengelola Keuangan (APK) APBN Muda bertugas melakukan input realisasi capaian output secara rutin melalui Aplikasi SAKTI, yang merupakan sistem pelaporan keuangan utama pemerintah. Kedua, seorang pegawai PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) ditugaskan sebagai operator aplikasi SMART DJA, yang berfungsi untuk mendukung pelaporan kinerja anggaran secara digital dan terintegrasi dengan Kementerian Keuangan.

Kombinasi peran keduanya menjadi komponen penting dalam memastikan data anggaran tersaji secara akurat, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan PPS Bungus.

Indikator Kinerja (IK) 18 – Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera

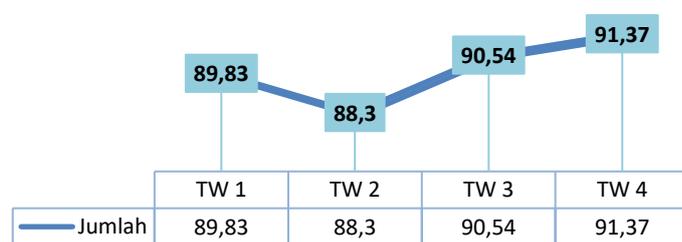
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/ Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/ Sarana, U9

Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

Target dan Realisasi

Tabel 43. Capaian Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera

SK 7 Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
IK 18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	88,61	91,37	88,3	91,37	103,48	-	-



Gambar 34. Capaian Nilai SKM PPS Bungus Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 mencapai 91,37 atau 103,48% dari target yang telah ditentukan. Grafik capaian SKM menunjukkan tren perkembangan dalam empat triwulan sepanjang tahun 2024, mencerminkan tingkat kepuasan pengguna

layanan yang stabil dan meningkat. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,03% dibandingkan dengan tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas pelayanan yang diberikan di PPS Bungus, baik dari segi fasilitas, efisiensi pelayanan, maupun respons terhadap kebutuhan pengguna jasa. Selain itu, jika dibandingkan dengan satuan kerja lain, yaitu PPS Belawan, capaian SKM PPS Bungus juga sedikit lebih tinggi dengan selisih 0,24%. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa secara umum, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan di kedua pelabuhan relatif setara, dengan PPS Bungus memiliki keunggulan tipis dalam penilaian kepuasan pengguna. Keberhasilan ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui upaya perbaikan layanan secara berkelanjutan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera antara lain melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pengguna jasa terkait Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan harapan dapat meningkatkan jumlah pengguna jasa yang mengisi survey.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus meliputi pengukuran Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) dan Key Performance Indicators (KPI). Pengukuran IKP berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memahami tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan yang diberikan oleh pelabuhan. Data yang diperoleh dari survei ini tidak hanya menggambarkan persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan, tetapi juga memberikan masukan penting untuk perbaikan dan pengembangan layanan ke depan.

Selain itu, pengukuran KPI menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa setiap aspek layanan di PPS Bungus dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan memanfaatkan

data IKP dan KPI secara optimal, manajemen pelabuhan dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan layanan, melakukan tindakan perbaikan yang berbasis data, serta meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan harapan pengguna jasa.

Keberhasilan pencapaian IKU ini juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kompetensi sumber daya manusia, efektivitas sistem pelayanan, serta responsivitas terhadap masukan pelanggan. Oleh karena itu, PPS Bungus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan melalui perbaikan prosedur, peningkatan fasilitas, serta penguatan komunikasi dengan pengguna jasa. Dengan strategi yang tepat, diharapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pelabuhan dapat terus meningkat, sehingga mendukung keberlanjutan dan daya saing PPS Bungus sebagai pelabuhan perikanan yang berkualitas.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 44. Analisa Efisiensi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) -RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) – (4)
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera	103,48%	28.061.000	28.061.000	29.037.522	976.522
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				3,48%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{3,48\%}{20} \times 50 \right)$				58,7%	

Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus pada tahun 2024 mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan anggaran dan peningkatan kualitas layanan. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 28.061.000, realisasi penyerapan mencapai 100% dari total anggaran yang telah dialokasikan. Selain itu, tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran menunjukkan efisiensi sebesar 3,48% dengan nilai efisiensi mencapai 58,7%, yang menandakan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara optimal dan tepat sasaran.

Keberhasilan pencapaian SKM ini menunjukkan bahwa program peningkatan kepuasan masyarakat telah dijalankan secara efektif, baik dari aspek perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Anggaran yang tersedia dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperbaiki aspek yang menjadi perhatian pengguna jasa, serta menjalankan survei kepuasan masyarakat secara berkala guna memperoleh umpan balik yang akurat. Dengan adanya sistem evaluasi yang berbasis data, PPS Bungus dapat menyusun langkah-langkah strategis untuk terus meningkatkan pelayanan di masa mendatang.

Selain itu, capaian ini juga mencerminkan komitmen PPS Bungus dalam menjaga kualitas layanan dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan berdampak langsung pada peningkatan kepuasan pengguna jasa. Dengan tingkat efisiensi yang cukup baik, pengelolaan anggaran dalam program peningkatan kepuasan masyarakat tetap berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa PPS Bungus terus berinovasi dan beradaptasi dalam memberikan layanan terbaik, sehingga mampu mempertahankan kepercayaan serta kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa pelabuhan.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian Indikator Kinerja (IK) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat di lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus tidak terlepas dari peran berbagai tim kerja yang terlibat langsung dalam pemberian layanan kepada stakeholder dan pengguna jasa. Tim-tim ini berfungsi sebagai pilar utama dalam memastikan bahwa setiap aspek pelayanan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Tim kerja yang mendukung pencapaian indikator ini meliputi tim kerja dukungan manajerial, tim kerja operasional pelayanan usaha, tim kerja kesyahbandaran, tim kerja pelayanan usaha, serta tim kerja sarana dan prasarana. Tim kerja dukungan manajerial memiliki peran dalam mengkoordinasikan strategi pelayanan, administrasi, dan pengelolaan sumber daya guna menciptakan sistem pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Tim kerja operasional pelayanan usaha bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas bisnis dan operasional usaha di pelabuhan, memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan kepada pengguna jasa dapat berjalan tanpa hambatan.

Sementara itu, tim kerja kesyahbandaran berperan dalam menjaga keselamatan dan kelancaran aktivitas kepelabuhanan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga aspek keamanan dan kepatuhan operasional tetap terjaga. Tim kerja pelayanan usaha lebih berfokus pada interaksi langsung dengan pengguna jasa, memastikan bahwa pelayanan diberikan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sedangkan tim kerja sarana dan prasarana bertugas dalam pemeliharaan, peningkatan, dan pengelolaan infrastruktur serta fasilitas pelabuhan, sehingga lingkungan pelabuhan tetap dalam kondisi yang baik dan layak digunakan.

Dukungan dari seluruh tim ini menciptakan sinergi yang kuat, yang pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas layanan di PPS Bungus. Kerja sama yang efektif antar tim menjadi faktor kunci dalam menjaga mutu layanan, memastikan bahwa setiap aspek operasional berjalan sesuai dengan standar, dan meningkatkan kepuasan masyarakat sebagaimana tercermin dalam hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Dengan sistem kerja yang terintegrasi dan berbasis evaluasi berkelanjutan, PPS Bungus terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan sehingga mampu menjaga kepercayaan pengguna jasa serta mendukung pengembangan sektor perikanan secara lebih luas.

Akuntabilitas Keuangan

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 16.155.295.000,-** sesuai dengan DIPA PPS Bungus Tangkap TA. 2024 **Nomor: SP DIPA-032.03.2.531488/2024 tanggal 24 November 2023**, alokasi anggaran tersebut untuk 5 (lima) kegiatan yakni :

1. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
3. Pengelolaan perizinan dan Kenelayanan;
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan.

Realisasi anggaran sampai Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 16.150.300.768,-** atau sebesar **99,97%** dari pagu sebesar **Rp. 16.155.295.000,-**.

Tabel 45. Realisasi Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan PPS Bungus Tahun 2024

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi Anggaran Triwulan IV 2024	Persentase Realisasi Anggaran (%)
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.495.548.000,-	2.487.895.536,-	99,69%
1 Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	27.450.000,-	27.376.420,-	99,73%
2 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2.400.965.000,-	2.395.153.963,-	99,76%
3 Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	1.000.000,-	990.000,-	99%
4 Pengelolaan Sumber Daya Ikan	66.133.000,-	64.375.153,-	97,34%
Program Dukungan Manajemen	13.659.747.000,-	13.662.405.232,-	100,02%
5 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	13.659.747.000,-	13.662.405.232,-	100,02%



2024

BAB 4

STRUKTUR ORGANISASI

PELABUHAN PERIKANAN

- 4.1. ORGANISASI DAN TATA KERJA**
- 4.2. LANDASAN HUKUM**
- 4.3. STRUKTUR ORGANISASI**
- 4.4. KOMPOSISI PEGAWAI**
- 4.5. PENDIDIKAN DAN DIKLAT PEGAWAI**
- 4.6. MUTASI PEGAWAI DAN PENSIUN**
- 4.7. HUBUNGAN KELEMBAGAAN**

Organisasi dan Tata Kerja PPS Bungus

Landasan Hukum

Perundang-undangan dan Peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- 2) Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/Kepmen-Kp/2014 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2006, tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan;
- 4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan;
- 5) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan.
- 6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan.

Struktur Organisasi



Gambar 35. Struktur Tim Kerja PPS Bungus 2024

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan secara optimal, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus memiliki struktur organisasi yang tersusun secara sistematis berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan. Struktur organisasi ini dirancang untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pelabuhan, sehingga seluruh

aktivitas operasional, pelayanan, dan pengawasan dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu pelabuhan perikanan strategis, PPS Bungus berperan penting dalam mendukung sektor perikanan nasional, terutama dalam fasilitasi aktivitas perikanan tangkap, pelayanan perizinan, hingga pengelolaan infrastruktur perikanan. Untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi ini berjalan dengan baik, diperlukan organisasi yang solid, koordinatif, dan berbasis pada prinsip tata kelola yang baik.

Struktur organisasi PPS Bungus dibangun dengan pendekatan yang terintegrasi, di mana setiap unit kerja memiliki peran dan tanggung jawab yang saling mendukung dalam menciptakan ekosistem pelabuhan yang aman, tertib, dan produktif. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, diharapkan pelabuhan dapat meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat perikanan. Adapun struktur organisasi PPS Bungus mencakup beberapa unsur utama, yaitu:

Kepala Pelabuhan

Sebagai pimpinan tertinggi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Kepala Pelabuhan Perikanan memiliki peran strategis dalam mengawasi, mengoordinasikan, serta memastikan seluruh aktivitas pelabuhan berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Kepala pelabuhan bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan operasional, mengelola sumber daya, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kinerja pelabuhan dalam mendukung sektor perikanan nasional.

Sebagai pemimpin, Kepala Pelabuhan memiliki tugas utama, antara lain:

- 1 **Perencanaan dan Pengambilan Keputusan Strategis** : Menyusun kebijakan serta strategi pengelolaan pelabuhan perikanan guna mendukung operasional yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
- 2 **Pengawasan dan Evaluasi Kinerja** : Memastikan setiap unit kerja di pelabuhan menjalankan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan target kinerja yang telah ditetapkan.
- 3 **Pengelolaan Sumber Daya** : Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran agar pelabuhan dapat berfungsi secara maksimal.
- 4 **Koordinasi dan Sinergi dengan Stakeholder** : Menjalinkan komunikasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, pelaku usaha perikanan, komunitas nelayan, serta pihak swasta dalam rangka pengembangan pelabuhan dan peningkatan layanan.
- 5 **Pengendalian dan Kepatuhan Regulasi** : Mengawasi pelaksanaan kegiatan di pelabuhan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk pengelolaan lingkungan, keselamatan kerja, serta standar pengelolaan pelabuhan perikanan.
- 6 **Inovasi dan Pengembangan Pelabuhan** : Menginisiasi berbagai program inovatif untuk meningkatkan efisiensi operasional, layanan kepada pengguna jasa, serta keberlanjutan sektor perikanan.

Sebagai pemimpin, Kepala Pelabuhan tidak hanya bertugas sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam membangun budaya kerja profesional dan berorientasi pada pelayanan. Dengan kepemimpinan yang visioner dan sinergis, diharapkan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dapat terus berkembang menjadi pelabuhan yang kompetitif, ramah lingkungan, serta memberikan manfaat maksimal bagi sektor perikanan dan masyarakat nelayan.

Subbagian Umum

Subbagian Umum memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kelancaran administrasi dan operasional di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Unit ini bertanggung jawab atas

berbagai aspek tata kelola internal yang berkaitan dengan administrasi, kepegawaian, pengelolaan aset, serta hubungan kelembagaan.

Beberapa tugas utama yang dijalankan oleh Subbagian Umum, antara lain:

- 1 Hubungan Masyarakat (Humas) – Menjalin komunikasi dengan pihak eksternal, baik pemerintah, stakeholder, maupun masyarakat perikanan, guna membangun citra dan koordinasi yang baik.
- 2 Organisasi dan Tata Laksana – Mengelola sistem kerja organisasi agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku.
- 3 Kepegawaian – Mengelola administrasi sumber daya manusia, termasuk pengangkatan, mutasi, dan peningkatan kapasitas pegawai guna memastikan kinerja yang optimal.
- 4 Persuratan dan Kearsipan – Mengelola surat-menyurat, penyimpanan dokumen, serta sistem arsip yang terorganisir untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.
- 5 Dokumentasi dan Rumah Tangga – Mengurus kebutuhan operasional kantor serta dokumentasi berbagai kegiatan yang dilakukan di pelabuhan.
- 6 Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Perlengkapan – Bertanggung jawab atas pencatatan, pemeliharaan, dan pengelolaan aset negara yang digunakan dalam mendukung operasional pelabuhan.
- 7 Keuangan – Mengelola administrasi keuangan yang mencakup perencanaan, pencairan anggaran, pelaporan, serta pemantauan realisasi anggaran agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Subbagian Umum juga bertanggung jawab dalam pengelolaan gaji pegawai, pembayaran operasional, serta penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dengan fungsi-fungsi tersebut, Subbagian Umum berperan sebagai tulang punggung administrasi yang memastikan bahwa semua proses internal di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus berjalan tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan unit ini sangat krusial dalam menjaga stabilitas operasional, mulai dari pengelolaan kepegawaian, hubungan kelembagaan, administrasi keuangan, hingga pengelolaan aset negara.

Selain itu, Subbagian Umum juga berperan dalam menciptakan sistem tata kelola yang efisien, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan di pelabuhan dapat berjalan sesuai dengan regulasi dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya sistem administrasi yang kuat, segala bentuk dokumentasi dan pelaporan dapat tersusun dengan rapi dan akurat, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pelabuhan.

Hal ini secara langsung berdampak pada pencapaian kinerja pelabuhan secara keseluruhan, baik dalam hal layanan operasional, pelayanan kepada stakeholder, maupun manajemen sumber daya. Keberadaan administrasi yang profesional dan tertata memungkinkan setiap unit kerja di pelabuhan untuk lebih fokus pada tugas utama mereka, tanpa terganggu oleh kendala administratif yang dapat memperlambat kinerja.

Selain itu, sistem administrasi yang solid juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional, transparan, dan efisien. Setiap pegawai memiliki pedoman kerja yang jelas, didukung oleh mekanisme pengelolaan sumber daya yang optimal, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, PPS Bungus dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan operasional, serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Tim Kerja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (PPS Bungus) memiliki lima tim kerja utama yang bertanggung jawab atas berbagai aspek operasional dan manajerial pelabuhan. Setiap tim memiliki tugas dan peran khusus yang saling mendukung guna memastikan kelancaran seluruh kegiatan di pelabuhan serta pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Berikut adalah lima tim kerja di PPS Bungus beserta tugas dan tanggung jawabnya:

1

Tim Kerja Dukungan Manajerial

Tim ini bertanggung jawab dalam mendukung aspek administrasi, tata kelola organisasi, dan pengelolaan sumber daya manusia di pelabuhan. Tugas utama mereka mencakup pengelolaan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, penyusunan laporan kinerja, serta perencanaan strategis yang mendukung efektivitas operasional pelabuhan. Selain itu, tim ini juga berperan dalam menyediakan layanan pendukung manajemen guna memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan secara terencana dan sesuai regulasi.

2

Tim Kerja Operasional Pelabuhan

Tim ini berperan dalam mengkoordinasikan seluruh aktivitas operasional di pelabuhan, termasuk penerimaan dan pelepasan kapal perikanan, pemantauan aktivitas bongkar muat, serta pengawasan arus barang dan logistik perikanan. Dengan peran ini, tim kerja operasional pelabuhan memastikan bahwa seluruh proses berjalan efisien, aman, dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

3

Tim Kerja Kesyahbandaran

Keselamatan dan kelancaran lalu lintas kapal di pelabuhan merupakan tanggung jawab utama tim ini. Tim kerja kesyahbandaran bertugas mengawasi kelaikan kapal perikanan, menegakkan aturan keselamatan pelayaran, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi maritim dan perikanan. Selain itu, tim ini juga mengurus penerbitan dokumen kapal perikanan dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk meningkatkan keamanan pelayaran di kawasan PPS Bungus.

4

Tim Kerja Pelayanan Usaha

Tim ini bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa di pelabuhan, seperti pemilik kapal, nelayan, dan perusahaan perikanan. Layanan yang diberikan meliputi penyediaan fasilitas operasional, perizinan usaha, serta koordinasi dengan berbagai pihak guna meningkatkan efisiensi bisnis perikanan. Tim ini juga berperan dalam mengembangkan strategi peningkatan pelayanan, sehingga PPS Bungus dapat terus memberikan manfaat optimal bagi pelaku usaha perikanan.

5

Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana

Untuk memastikan fasilitas di pelabuhan selalu dalam kondisi optimal, tim ini bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengelolaan, serta pengembangan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan. Tugas mereka mencakup monitoring kondisi dermaga, perbaikan fasilitas umum, pengelolaan sistem kelistrikan dan air, serta perawatan gedung dan peralatan operasional lainnya. Tim ini juga berperan dalam perencanaan dan pengembangan sarana baru yang mendukung peningkatan kapasitas dan pelayanan pelabuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki peran strategis dalam menyediakan pelayanan fungsional yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Setiap anggota kelompok ini bekerja sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing, sehingga dapat memberikan kontribusi optimal dalam pelaksanaan berbagai program di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Dalam pelaksanaannya, dibentuk kelompok kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional, yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan di masing-masing bidang fungsional. Kelompok kerja ini memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta berjalan secara efektif, efisien, dan profesional. Dengan adanya koordinasi yang baik antar anggota, setiap unit fungsional dapat bekerja secara sinergis untuk mendukung pencapaian kinerja PPS Bungus.

Sebagai bagian dari struktur organisasi PPS Bungus, kelompok jabatan fungsional memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Komitmen ini diimplementasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), yang menjadi acuan dalam penyusunan target dan strategi pencapaian kinerja. Setiap hasil kinerja yang dicapai kemudian dievaluasi melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) guna memastikan bahwa seluruh program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata bagi pengelolaan pelabuhan dan sektor perikanan secara keseluruhan.

Komposisi Pegawai

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus terus berupaya mengoptimalkan dan memberdayakan seluruh sumber daya yang tersedia, baik dalam aspek sarana, prasarana, maupun sumber daya manusia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan operasional pelabuhan berjalan dengan efisien dan mendukung aktivitas perikanan secara berkelanjutan. Seiring dengan meningkatnya tuntutan pelayanan, pelabuhan terus beradaptasi dengan dinamika industri perikanan, termasuk dalam pengelolaan tenaga kerja yang menjadi tulang punggung kelancaran operasional.

Pada tahun 2024, jumlah personel yang terlibat dalam operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mencapai 92 orang dengan komposisi yang beragam. Dari jumlah tersebut, 36 orang (39,13%) merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berperan dalam berbagai aspek administratif dan teknis. Selain itu, terdapat 17 orang (18,48%) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta 9 tenaga pramubakti (9,78%) yang turut mendukung berbagai tugas operasional. Di sisi lain, terdapat 2 tenaga PJLP (2,17%) dan 2 tenaga pendataan ikan (2,17%) yang berkontribusi dalam aspek tertentu yang mendukung kelancaran kegiatan di pelabuhan. Untuk memastikan kebersihan dan keamanan pelabuhan tetap terjaga, 26 tenaga outsourcing (28,26%) turut serta dalam operasional harian.

Tabel 46. Komposisi PNS, TTK dan Outsourcing Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

JENIS KELAMIN	JABATAN						Jumlah
	PNS	PPPK	TKK	PJLP	Petugas Pendataan	Outsourcing	
Laki-Laki	23	3	7	2	2	23	60
Perempuan	13	14	2	-	-	3	32
Jumlah	36	17	9	2	2	26	92

Pembinaan pegawai di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus difokuskan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan melalui berbagai latihan dan kursus. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan para pegawai dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi pegawai serta membentuk kader yang tangguh dalam melaksanakan tugasnya. Selain dari itu, program pembinaan juga memberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan karier mereka melalui berbagai peluang, seperti mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil. Selain dari aspek peningkatan kemampuan, pembinaan pegawai juga mencakup upaya dalam mewujudkan kesejahteraan pegawai, seperti penyediaan rumah dinas bagi yang belum memiliki tempat tinggal, kewajiban bagi pegawai dan

keluarganya untuk mengikuti asuransi kesehatan, dan dorongan untuk terus meningkatkan kemampuan melalui pendidikan lebih lanjut serta berbagai diklat dan kursus. Dengan demikian, program pembinaan pegawai ini dirancang secara komprehensif untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan pegawai Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh Kepala Pelabuhan, baik itu dalam kegiatan seperti apel pagi, forum briefing, rapat pertemuan, maupun tanya jawab setelah apel dan senam kesegaran jasmani, memiliki tujuan-tujuan yang penting. Pertama, pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan dan memantapkan kemampuan para staf/pelaksana tugas di berbagai tingkatan fungsional, baik itu fungsional umum, fungsional tertentu, maupun tingkat struktural (Eselon II dan IV). Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Selanjutnya, pembinaan tersebut juga bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman akan pentingnya tugas yang dilaksanakan dengan penuh dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tanggung jawab. Dengan memperkuat pemahaman ini, diharapkan setiap pegawai akan lebih termotivasi untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan kontribusi yang maksimal. Selain itu, pembinaan juga menjadi wadah untuk mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dan mengkoordinasikan tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Melalui evaluasi yang rutin, manajemen dapat mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan serta mengarahkan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Selain itu, koordinasi tugas-tugas yang dilakukan melalui pembinaan ini juga memastikan bahwa setiap bagian dari organisasi berjalan secara sinergis menuju pencapaian tujuan bersama. Dengan demikian, pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh Kepala Pelabuhan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan kinerja seluruh tim, serta memastikan keselarasan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pendidikan dan Diklat Pegawai

Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014, setiap ASN memiliki hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi guna meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Pengembangan kompetensi ini diwujudkan melalui berbagai bentuk pelatihan dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja, baik secara individu maupun dalam tim, serta meningkatkan daya saing organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu aspek penting dalam pengembangan kompetensi pegawai adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai berperan dalam menentukan kemampuan mereka dalam memahami dan melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya. Pendidikan yang lebih tinggi umumnya memberikan wawasan yang lebih luas, keterampilan analitis yang lebih baik, serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebijakan, regulasi, dan teknologi yang relevan dengan bidang pekerjaannya. Oleh karena itu, peningkatan tingkat pendidikan menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kerja.

Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, tingkat pendidikan pegawai bervariasi berdasarkan status kepegawaian masing-masing. Untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan, berbagai upaya dilakukan, seperti memberikan kesempatan bagi pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mengikutsertakan mereka dalam pelatihan yang relevan. Berikut adalah tabel yang menggambarkan tingkat pendidikan pegawai di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus berdasarkan status kepegawaianya.

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan tingkat pendidikan pegawai PPS Bungus berdasarkan status kepegawaian:

Tabel 47. Tingkat pendidikan pegawai di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan								Total
	S2		S1		D3		SMA		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
PNS	2	2	9	6	1	1	12	3	36
PPPK	-	-	6	3	3	-	5	-	17
TKK	-	-	6	2	-	-	1	-	9
PJLP	-	-	1	-	1	-	-	-	2
Petugas Pendataan	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Outsourcing	-	-	-	-	-	-	23	3	26
Total	2	2	24	11	5	1	41	6	92

Tabel tingkat pendidikan pegawai di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus menunjukkan variasi latar belakang pendidikan berdasarkan status kepegawaian. Dari total 92 pegawai, mayoritas berpendidikan SMA, sedangkan jumlah pegawai dengan pendidikan tinggi (S1 dan S2) masih terbatas. Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki latar pendidikan paling beragam, terdiri dari 4 orang S2, 15 orang S1, 2 orang D3, dan 15 orang SMA, mencerminkan peluang pengembangan kompetensi yang lebih besar di kelompok ini.

Sementara itu, dari 17 orang PPPK, sebagian besar lulusan S1 (9 orang), diikuti 3 orang D3 dan 5 orang SMA, tanpa lulusan S2. Kelompok TKK berjumlah 9 orang, dengan 8 orang berpendidikan S1/D3 dan 1 orang SMA. PJLP berjumlah 2 orang dengan pendidikan S1 dan D3, sedangkan Petugas Pendataan Ikan (2 orang) seluruhnya lulusan S1. Pegawai outsourcing merupakan kelompok terbesar setelah PNS, berjumlah 26 orang, seluruhnya lulusan SMA.

Secara keseluruhan, 47 pegawai masih berpendidikan SMA, 35 orang S1, 6 orang D3, dan hanya 4 orang S2. Komposisi ini menunjukkan perlunya peningkatan akses pendidikan lanjutan, terutama bagi pegawai dengan latar SMA, agar kompetensi dan profesionalisme kerja di lingkungan PPS Bungus semakin meningkat.

Mutasi Pegawai dan Pensiun

Mutasi Pegawai

Mutasi pegawai merupakan salah satu strategi penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, yang tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, tetapi juga mendukung pengembangan karier serta pemetaan kompetensi pegawai secara berkelanjutan. Melalui mutasi, organisasi dapat memastikan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan strategis, tantangan operasional, dan potensi individu yang dimiliki.

Sepanjang tahun 2024, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus telah melaksanakan mutasi terhadap 12 pegawai sebagai bagian dari penyesuaian struktur dan peningkatan kinerja organisasi. Dari jumlah tersebut, 9 pegawai dimutasi ke unit kerja lain guna mengoptimalkan kinerja lintas fungsi, 2 pegawai mengalami perubahan jabatan dalam unit yang sama sebagai bagian dari penyegaran dan redistribusi tugas, serta 1 pegawai dipindahkan masuk ke PPS Bungus dari unit kerja lain dalam instansi yang sama.

Kebijakan mutasi ini dilaksanakan berdasarkan evaluasi kinerja, kebutuhan organisasi, dan potensi pengembangan karier pegawai, serta tetap mengacu pada prinsip transparansi, keadilan, dan profesionalisme. Diharapkan, proses mutasi ini dapat memberikan dampak positif terhadap motivasi kerja pegawai, memperkuat kapasitas organisasi, serta mendukung pencapaian tujuan strategis PPS Bungus secara menyeluruh.

1 Pegawai yang Dimutasi ke Unit Kerja Lain

Sebanyak 9 pegawai dipindahkan ke berbagai unit kerja di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Berikut daftar pegawai yang dimutasi ke unit kerja lain:

Tabel 48. Daftar Pegawai Mutasi ke Unit Kerja Lain

No	Nama Pegawai	Jabatan	Unit Kerja Tujuan
1	Fitria Wahyu. Andriani, S.H., M.H., M.Si	P3T Pertama	Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
2	Yulian Toni, S.St.Pi	P3T Muda	Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
3	Dede Juarna, S.ST	Syahbandar Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
4	Akmala Dwi Nugraha, S.Pi, M.Si	P3T Madya	Direktorat Kepelabuhanan Perikanan
5	Ariska Febrina Simatupang, S.Psi	Analisis SDM Aparatur Pertama	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
6	Eko Marda Saputra, S.St.Pi	Syahbandar Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
7	Fajar Aguntoyo, S.St.Pi	Syahbandar Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
8	Julio Ika Putri	Pengelola Kesyahbandaran	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir & Laut Padang
9	Martiin Ramadan Nur Amanu, A.Md.	AP3T Terampil	Balai Besar Penangkapan Ikan

2 Pegawai yang Mengalami Perubahan Jabatan dalam Unit Kerja yang Sama

Selain mutasi ke unit kerja lain, terdapat 2 pegawai yang mengalami perubahan jabatan di lingkungan PPS Bungus:

No	Nama Pegawai	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Mol Isral Mahadia, S.E	Penelaah Pengembangan Usaha	Penata Perizinan Ahli Pertama
2	Gazali, S.Ak	Pengelola Keuangan	APK APBN Ahli Pertama

3 Pegawai yang Dimutasi ke PPS Bungus dari Unit Kerja Lain

Selain mutasi keluar, terdapat 1 pegawai yang dipindahkan ke PPS Bungus dari unit kerja lain dalam instansi yang sama, yaitu:

No	Nama Pegawai	Jabatan	Unit Kerja Asal	Unit Kerja Tujuan
1	Wisnu Syafriansyah, S.St.Pi	Syahbandar Pelabuhan Perikanan	PPS Belawan	PPS Bungus

Mutasi pegawai merupakan strategi pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan untuk menyesuaikan kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, mutasi juga berperan dalam meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan pengalaman kerja pegawai di berbagai bidang. Dengan adanya rotasi jabatan, pegawai dapat memperoleh wawasan baru serta memahami berbagai aspek operasional organisasi secara lebih luas.

Selain sebagai upaya pengembangan individu, mutasi juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan pemerataan tenaga kerja di seluruh unit. Proses ini membantu memastikan bahwa setiap unit memiliki SDM yang kompeten dan sesuai dengan tugas serta tanggung jawabnya. Selain itu, mutasi dapat mengatasi kejenuhan dalam bekerja dan memberikan tantangan baru bagi pegawai, sehingga mereka tetap termotivasi dan berkontribusi secara optimal. Dengan perencanaan yang baik, mutasi tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pegawai Pensiun

Pada tahun 2024, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus mencatat satu pegawai yang memasuki masa pensiun, yaitu Hanifan Nasrul. Beliau terakhir menjabat sebagai Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana dengan pangkat Penata Muda Tk. I (Golongan III/B).

Pensiun merupakan tahap akhir dari perjalanan karier seorang pegawai, yang menandai selesainya masa pengabdian dalam organisasi. Sebagai bagian dari penghormatan atas dedikasi dan kontribusi pegawai yang telah bekerja selama bertahun-tahun, PPS Bungus memberikan apresiasi serta memastikan proses pensiun berjalan lancar sesuai regulasi yang berlaku.

Dengan berakhirnya masa tugas seorang pegawai, instansi juga perlu melakukan evaluasi dan perencanaan pengisian jabatan agar kelancaran operasional tetap terjaga. Ke depan, PPS Bungus berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan SDM guna memastikan kesinambungan pelayanan dan pengelolaan pelabuhan secara optimal.

Hubungan Kelembagaan

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus menjalin hubungan kelembagaan yang erat dengan berbagai instansi terkait untuk mendukung kelancaran operasional serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat perikanan, termasuk nelayan dan pengusaha sektor perikanan. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan pelabuhan yang efektif, efisien, serta berdaya saing dalam mendukung sektor perikanan nasional.

Hubungan kelembagaan di PPS Bungus didasarkan pada prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, yang memungkinkan setiap program dan kebijakan berjalan secara harmonis serta saling melengkapi. Sinergi yang kuat antara PPS Bungus dan berbagai lembaga pemerintah maupun non-pemerintah berperan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, pengelolaan sumber daya perikanan, pengembangan infrastruktur, hingga kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Dalam operasionalnya, PPS Bungus bekerja sama dengan sejumlah instansi strategis, baik di tingkat pusat maupun daerah, antara lain:

Kelembagaan/intansi terkait yang ada di lingkungan kerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Polisi Air (Polda Sumbar); | 8. KPLP; |
| 2. Satwas PSDKP Padang; | 9. KAMLA (TNI AL); |
| 3. Navigasi (Kementerian Perhubungan); | 10. Badan Kekarantinaan Kesehatan; |
| 4. BBLPMHP (Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Sumbar); | 11. SPSI; |
| 5. Koperasi Unit Desa Mina Padang; | 12. Badan Karantina Indonesia; |
| 6. BPPSDM LRSDKP; | 13. BPPMHKP Padang; |
| 7. KSOP Teluk Bayar; | 14. PT. Semen Padang |
| | 15. PT. Pegadaian Indonesia. |

Dengan adanya kerja sama yang erat antara PPS Bungus dan berbagai instansi ini, diharapkan operasional pelabuhan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat perikanan. Integrasi peran masing-masing lembaga ini juga mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.



2
0
2
4

BAB 5

KERAGAAN PELABUHAN

- 5.1. PRODUKSI IKAN**
- 5.2. PIPP DAN KEHUMASAN**
- 5.3. KEGIATAN EDUKASI**
- 5.4. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA**
- 5.5. PERSURATAN DAN KEARSIPAN**
- 5.6. PELAYANAN PUBLIK MASYARAKAT**
- 5.7. PELAYANAN JASA PELABUHAN**

Pelaksanaan Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) dan Kehumasan

Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)

Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) adalah sistem informasi yang berfungsi mendukung pengembangan pelabuhan perikanan dalam menciptakan kawasan strategis, produktif, dan berkembang pesat sebagai sentra produksi dan industri perikanan. Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data terkait operasional pelabuhan perikanan secara nasional.

PIPP menyajikan informasi terkini mengenai dinamika kegiatan pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia kepada para pemangku kepentingan di sektor perikanan dan kelautan melalui platform daring yang dapat diakses di <http://integrasi.djpt.kkp.go.id/PIPP>. Sistem ini didukung oleh data yang dikirim secara berkala dari setiap pelabuhan perikanan. Informasi yang dikelola oleh PIPP mencakup:

- Informasi kinerja operasional pelabuhan perikanan, termasuk jumlah kapal yang berlabuh, aktivitas bongkar muat, dan volume produksi perikanan;
- Informasi untuk kebutuhan evaluasi dan perencanaan, seperti tren produksi ikan, pola distribusi, dan efektivitas infrastruktur pelabuhan;
- Informasi untuk kebutuhan investasi, mencakup peluang investasi, sektor industri pendukung, dan proyeksi ekonomi kawasan pelabuhan perikanan.

Implementasi PIPP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Pelaksanaan sistem PIPP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus melibatkan beberapa kegiatan utama, antara lain:

- Entri data harian dan bulanan terkait aktivitas pelabuhan;
- Pengiriman rutin Laporan Monitoring Operasional Pelabuhan kepada instansi terkait;
- Entri dan pembaruan foto sarana dan prasarana pelabuhan;
- Entri data kelembagaan dan tenaga kerja di pelabuhan;
- Pengelolaan dan penyebarluasan data melalui platform daring dan media sosial.

Untuk mendukung akses informasi bagi stakeholder, data dan informasi mengenai Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dapat diakses melalui website resmi atau melalui email pps.bungus@kkp.go.id.

Data yang Dikelola dalam PIPP

Data yang dikelola dalam sistem PIPP meliputi aspek-aspek operasional yang menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis (UPT) pelabuhan perikanan, yaitu:

- Aktivitas kapal, termasuk data kedatangan, keberangkatan, serta kategori kapal yang beroperasi di pelabuhan;
- Produksi dan distribusi ikan, mencakup volume hasil tangkapan dan pola distribusi ke pasar domestik maupun ekspor;
- Penyaluran perbekalan kapal, seperti bahan bakar, air bersih, dan es batu;
- Industri yang beroperasi di pelabuhan, termasuk industri pengolahan dan distribusi perikanan;
- Pendapatan pelabuhan perikanan berdasarkan aktivitas bongkar muat dan layanan lainnya;
- Prasarana pendukung di pelabuhan, seperti dermaga, tempat pelelangan ikan (TPI), serta fasilitas penyimpanan dan distribusi ikan;
- Kelembagaan dan tenaga kerja, termasuk jumlah pekerja dan struktur organisasi pengelola pelabuhan;
- Data umum dan kondisi lingkungan fisik, seperti kualitas air, sedimentasi, dan faktor lingkungan lainnya yang mempengaruhi ekosistem pelabuhan.

Peran Kehumasan dalam Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Keberadaan unit kehumasan dalam sebuah lembaga atau instansi pemerintah sangat penting untuk menyebarluaskan informasi serta mempublikasikan berbagai kegiatan dan program kerja kepada masyarakat luas. Kehumasan juga berperan dalam membangun citra positif lembaga serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program perikanan dan kelautan. Secara umum, humas instansi pemerintah memiliki dua fungsi utama:

- **Fungsi eksternal:** Menyampaikan informasi, kebijakan, serta program pemerintah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk melalui publikasi di media massa dan digital;
- **Fungsi internal:** Menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat untuk disesuaikan dengan kebijakan instansi guna mencapai tujuan bersama.

Tujuan Pembentukan Bagian Humas di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Bagian Humas di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dibentuk dengan beberapa tujuan utama:

- Mempublikasikan dan mempromosikan kebijakan pemerintah khususnya di bidang kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
- Menyediakan informasi mengenai kebijakan, rencana, serta hasil kerja kegiatan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik;
- Mensosialisasikan kebijakan pemerintah melalui berbagai media, termasuk konferensi pers, siaran pers, pameran, serta pertemuan dengan masyarakat dan komunitas perikanan.

Media Komunikasi dan Informasi

Untuk mendukung transparansi dan keterbukaan informasi, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, antara lain:

Website resmi: <http://humasppsbungus.blogspot.com>

- Media sosial resmi:
- Twitter: @ppsbungus
- Instagram: @ppsbungus_
- Facebook: PPS Bungus

Dengan pengembangan dan peningkatan sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) serta optimalisasi peran kehumasan, diharapkan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (PPS Bungus) dapat menjadi pelabuhan yang lebih transparan, efisien, serta mampu berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sektor perikanan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas sistem informasi akan memungkinkan pemantauan aktivitas pelabuhan secara lebih akurat, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, serta meningkatkan keterbukaan informasi bagi para pemangku kepentingan, termasuk nelayan, investor, dan masyarakat luas.

Kegiatan Edukasi di PPS Bungus

Pendidikan dan pelatihan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di sektor perikanan dan kelautan. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (PPS Bungus) sebagai salah satu pelabuhan strategis di Indonesia berkomitmen untuk mendukung proses edukasi bagi mahasiswa, pelajar, dan lembaga pendidikan lainnya. Dengan membuka kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL), penelitian, dan kunjungan studi, PPS Bungus menjadi wadah pembelajaran yang menghubungkan teori akademik dengan praktik industri secara langsung.

Kegiatan edukasi di PPS Bungus dirancang untuk memberikan pengalaman lapangan yang mendalam dan membekali peserta dengan wawasan industri perikanan yang komprehensif. Melalui keterlibatan aktif dalam berbagai program pelatihan, mahasiswa dan pelajar dapat mengembangkan

keterampilan profesional, memahami tantangan sektor perikanan, serta memperluas jaringan dengan para praktisi industri dan pemerintah.

Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PPS Bungus

Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan program pendidikan yang memungkinkan mahasiswa dan pelajar untuk mendapatkan pengalaman kerja langsung. Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam menerapkan ilmu yang telah mereka pelajari di perguruan tinggi atau sekolah kejuruan ke dalam konteks dunia kerja nyata.

Manfaat PKL di PPS Bungus

- Mengasah keterampilan teknis dan manajerial di bidang perikanan dan kelautan.
- Meningkatkan pemahaman tentang operasional pelabuhan perikanan dan industri pendukungnya.
- Membangun jaringan profesional dengan praktisi industri dan pihak terkait.
- Meningkatkan kedisiplinan dan etos kerja melalui pengalaman kerja langsung.
- Mendukung penelitian dan inovasi dalam bidang perikanan serta mendorong lahirnya solusi bagi tantangan industri perikanan.

Peran PPS Bungus dalam Kegiatan Edukasi

Sebagai bagian dari instansi pemerintah, PPS Bungus berkomitmen untuk menyediakan lingkungan belajar yang kondusif bagi mahasiswa dan pelajar. PPS Bungus menawarkan berbagai program edukasi yang meliputi:

Jenis Kegiatan Edukasi

- PKL dan Magang – Memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dan pelajar dalam pengelolaan pelabuhan perikanan, mulai dari logistik hingga manajemen sumber daya.
- Penelitian Akademik – Mendukung penelitian ilmiah dengan menyediakan data dan akses ke fasilitas pelabuhan untuk riset terkait perikanan dan kelautan.
- Kunjungan Studi – Memfasilitasi kunjungan lapangan untuk memperkenalkan operasional pelabuhan dan industri pendukungnya kepada pelajar dan mahasiswa.
- Workshop dan Pelatihan – Menyenggarakan seminar dan lokakarya guna meningkatkan keterampilan dan wawasan terkait sektor perikanan.

Institusi Pendidikan yang Bekerja Sama dengan PPS Bungus

PPS Bungus telah bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan dalam rangka mendukung kegiatan edukasi. Berikut adalah beberapa institusi yang telah mengirimkan mahasiswa dan pelajar untuk melaksanakan PKL, penelitian, serta kunjungan studi:

Perguruan Tinggi

Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor
 Universitas Diponegoro Semarang
 Universitas Andalas (UNAND), Padang
 Universitas Riau (UNRI), Riau
 Universitas Jambi (UNJA), Jambi
 Universitas Dharma Andalas, Padang

Universitas Bung Hatta, Padang
 Universitas Taman Siswa, Padang
 Universitas Nahdlatul Ulama (UNU),
 Sekolah Tinggi Perikanan (STP), Jakarta
 STPK Matauli, Sibolga
 Politeknik Kelautan dan Perikanan, Pariaman

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

SMK Maritim Nusantara
 SMK Negeri 3, Pariaman
 SMK Nusatama, Padang

SMK Negeri 10, Padang
 SMK Negeri 1, Tanjung Jabung Timur
 SMK Negeri 4, Kota Bengkulu.

Pengembangan Kegiatan Edukasi di PPS Bungus

Untuk meningkatkan kualitas program edukasi, PPS Bungus terus melakukan inovasi dan pengembangan melalui:

- Memperluas kerja sama dengan lebih banyak perguruan tinggi dan sekolah kejuruan.
- Meningkatkan kualitas pembinaan dan pendampingan bagi mahasiswa dan pelajar selama PKL dan penelitian.
- Mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran, seperti penggunaan sistem informasi dan aplikasi berbasis data untuk mendukung riset di bidang perikanan.
- Menyelenggarakan seminar dan lokakarya yang melibatkan praktisi industri dan akademisi untuk berbagi wawasan terkait sektor perikanan.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di PPS Bungus agar lebih siap dalam membimbing peserta PKL dan penelitian.
- Melalui berbagai pengembangan ini, PPS Bungus berharap dapat terus menjadi pusat edukasi dan pelatihan unggulan dalam bidang perikanan dan kelautan, mencetak generasi yang kompeten, serta berkontribusi pada kemajuan industri perikanan di Indonesia secara berkelanjutan.

Dengan demikian, PPS Bungus tidak hanya menjadi pusat kegiatan operasional perikanan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas melalui program edukasi yang inovatif dan berkelanjutan.

Pengelolaan Barang Milik Negara

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan suatu bentuk keputusan resmi yang dikeluarkan oleh pengelola barang, pengguna barang, atau kuasa pengguna barang sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang telah ditetapkan. Keputusan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai penggunaan BMN yang berada dalam tanggung jawab satuan kerja di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Dengan adanya penetapan ini, BMN yang diperoleh melalui beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun perolehan sah lainnya dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga terkait.

Penetapan status penggunaan ini juga berperan penting dalam memastikan bahwa aset negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pengelolaan yang baik, BMN dapat berkontribusi dalam meningkatkan kinerja operasional pelabuhan serta mendukung pelayanan publik yang lebih baik bagi stakeholder di sektor perikanan dan kelautan. Selain itu, penetapan ini juga membantu dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan aset, sehingga dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan atau pemborosan sumber daya negara.

Sebagai bentuk legalitas dan kepastian administratif, Penetapan Status Penggunaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor: 3453/PPSB/PL.820/X/2018 yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2018. Keputusan ini menjadi dasar bagi satuan kerja dalam mengelola dan memanfaatkan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga aset negara dapat memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan operasional pelabuhan dan pembangunan sektor perikanan secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, pelaksanaan penetapan status penggunaan BMN ini juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola aset negara. Dengan adanya keputusan ini, setiap unit kerja di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus memiliki

pedoman yang jelas dalam menggunakan dan memelihara BMN, termasuk dalam hal pencatatan, pemeliharaan, serta pelaporan kondisi aset secara berkala. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara serta mendukung pembangunan sektor perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penetapan status penggunaan BMN tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi satuan kerja terkait, tetapi juga memastikan bahwa aset negara dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelayanan yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, serta mendukung program strategis di bidang perikanan dan kelautan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Kegiatan Administrasi Persuratan dan Kearsipan

Administrasi persuratan dan kearsipan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan pemerintahan. Ketatalaksanaan pemerintahan sendiri merupakan pengaturan tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan instansi pemerintah. Salah satu aspek utama dalam administrasi pemerintahan adalah tata naskah dinas dan kearsipan, yang berfungsi untuk menjaga keteraturan dalam pengelolaan dokumen serta memastikan bahwa setiap informasi yang dikeluarkan maupun diterima dapat diproses dan didokumentasikan dengan baik.

Tata Naskah Dinas

Tata naskah dinas merupakan sistem pengelolaan dokumen resmi yang digunakan dalam komunikasi internal maupun eksternal instansi pemerintahan. Tata kelola naskah dinas mencakup beberapa aspek penting, di antaranya:

- Jenis naskah dinas yang digunakan dalam komunikasi resmi antarunit kerja maupun dengan pihak eksternal.
- Pengamanan dan penyampaian surat agar informasi yang terkandung dalam naskah dinas tetap terjaga kerahasiaannya dan sampai kepada pihak yang dituju dengan tepat waktu.
- Pencantuman alamat, pemberian nomor, tanggal, dan kode sebagai bagian dari sistem penomoran yang membantu dalam identifikasi dan penelusuran dokumen.
- Kewenangan penandatanganan, di mana hanya pihak yang memiliki wewenang tertentu yang dapat menandatangani dan menerbitkan dokumen resmi.
- Penggunaan cap jabatan dan cap dinas untuk memberikan keabsahan pada dokumen resmi.
- Kelengkapan naskah dinas, yang mencakup berbagai elemen penting agar dokumen dapat diproses dan digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tata Kelola Kearsipan

Selain tata naskah dinas, pengelolaan arsip juga merupakan bagian integral dari administrasi pemerintahan. Tata kelola kearsipan meliputi penciptaan, penggunaan, perawatan, dan penyusunan dokumen, baik yang bersifat aktif maupun inaktif. Pengelolaan arsip yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan dapat digunakan secara optimal serta mudah diakses saat dibutuhkan.

Pengelolaan arsip juga harus dilakukan sesuai dengan prinsip kearsipan yang benar, termasuk dalam hal klasifikasi, penyimpanan, dan pemusnahan dokumen yang sudah tidak lagi diperlukan. Dengan adanya sistem arsip yang tertata dengan baik, instansi dapat menjaga akuntabilitas serta mendukung transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Landasan Hukum dalam Administrasi Persuratan dan Kearsipan

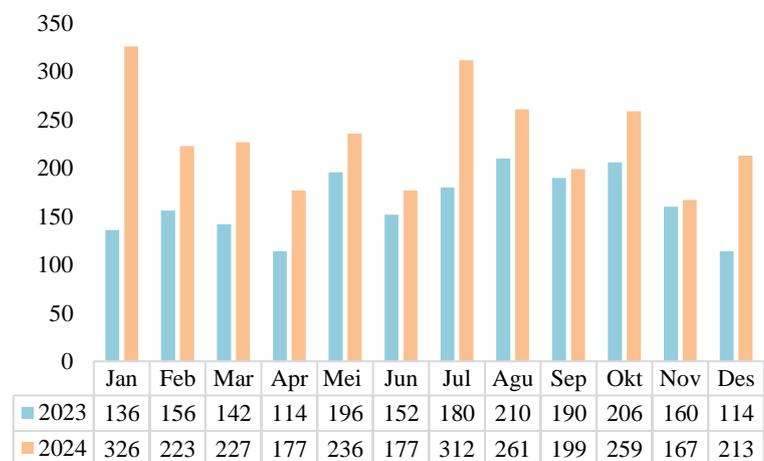
Penyelenggaraan administrasi persuratan dan kearsipan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (PPS Bungus) mengacu pada berbagai regulasi yang berlaku, salah satunya adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Inpres ini bertujuan untuk menunjang efektivitas komunikasi pemerintahan, menyerap aspirasi masyarakat, serta mempercepat penyampaian informasi terkait kebijakan dan program pemerintah. Inpres ini juga menginstruksikan seluruh instansi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung komunikasi publik yang lebih baik dan transparan.

Statistik Persuratan di PPS Bungus

Sebagai salah satu indikator efektivitas administrasi persuratan, jumlah surat masuk dan keluar di PPS Bungus terus mengalami peningkatan. Berikut adalah data jumlah surat masuk dan keluar dalam dua tahun terakhir:

Tabel 49. Jumlah Surat Tahun 2023 dan 2024

No	Bulan	2023	2024
1	Januari	136	326
2	Februari	156	223
3	Maret	142	227
4	April	114	177
5	Mei	196	236
6	Juni	152	177
7	Juli	180	312
8	Agustus	210	261
9	September	190	199
10	Oktober	206	259
11	November	160	167
12	Desember	114	213
Total		1956	2777



Gambar 37. Jumlah Surat Tahun 2023 dan 2024

Dari data tersebut, terlihat adanya peningkatan jumlah surat masuk dan keluar pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas administrasi di PPS Bungus semakin berkembang, seiring dengan peningkatan koordinasi dan komunikasi dalam pengelolaan pelabuhan.

Dengan sistem administrasi persuratan dan kearsipan yang baik, PPS Bungus dapat memastikan bahwa setiap dokumen yang dikelola tetap tertib, aman, dan terorganisir. Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dalam mendukung pengelolaan sektor perikanan secara berkelanjutan.

Kegiatan Pelayanan Publik Masyarakat Perikanan

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hal-hal sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya, serta menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurang transparan, kurang informatif, kurang konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang

kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Untuk mengukur kinerja aparatur di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat (*stakeholder*) perihal kebutuhan dan harapan, maka diadakanlah “SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT”.

Pelaksanaan pelayanan publik (*public service*) pada Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Dari seluruh data yang dihimpun dari 70 responden, didapatkan Nilai Interval (NI) Per Unsur untuk PPS Bungus Semester II adalah 3.54 dengan IKM = 88.61 dengan mutu pelayanan A (sangat baik). Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (*top manager*), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Pelayanan Jasa Pelabuhan Perikanan

Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat perikanan, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah menerapkan penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sejak tahun 2021. SOP ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan berjalan dengan sistematis, efisien, transparan, serta sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Dengan adanya SOP, diharapkan seluruh proses operasional dapat lebih terstruktur, meningkatkan efisiensi kerja, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Pelayanan jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu pelayanan jasa yang berkaitan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pelayanan kepada masyarakat perikanan yang tidak berkaitan dengan PNBP. Kedua jenis pelayanan ini dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas di pelabuhan, baik dalam aspek komersial maupun dalam pelayanan publik yang bersifat non-komersial.

Pelayanan Jasa yang Berkaitan dengan PNBP

Pelayanan ini mencakup berbagai jasa yang dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PPS Bungus. Jenis layanan yang tersedia bertujuan untuk mendukung aktivitas operasional pelabuhan serta memastikan keberlangsungan pengelolaan aset negara secara optimal. Layanan ini juga berperan penting dalam mendukung kelangsungan industri perikanan serta memberikan fasilitas terbaik bagi para pengguna pelabuhan. Adapun jenis layanan tersebut adalah sebagai berikut:

- **Jasa Bengkel** : Penyediaan layanan perawatan dan perbaikan kapal perikanan guna menjaga kelayakan operasional armada.
- **Jasa Docking Kapal** : Fasilitas perbaikan dan perawatan kapal dengan standar keselamatan yang tinggi.
- **Jasa Forklift** : Penyewaan alat berat untuk memudahkan bongkar muat barang dan hasil perikanan.
- **Jasa Kebersihan** : Layanan pembersihan area pelabuhan guna menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja.
- **Jasa Listrik** : Penyediaan sumber daya listrik untuk keperluan operasional kapal dan fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.

- **Jasa Tambat Kapal** : Penyediaan tempat sandar kapal dengan fasilitas yang mendukung keamanan dan kenyamanan nelayan.
- **Pas Masuk Bulanan/Berlangganan** : Akses masuk pelabuhan bagi pengguna jasa yang berlangganan secara rutin.
- **Pas Masuk Harian** : Tiket masuk harian bagi pengguna jasa pelabuhan.
- **Jasa Penggunaan Kendaraan Berpendingin** : Penyewaan kendaraan dengan sistem pendingin untuk menjaga mutu hasil perikanan.
- **Jasa Penggunaan Dump Truck** : Penyewaan armada pengangkutan guna mendukung distribusi hasil tangkapan.
- **Sewa Tangki BBM** : Penyediaan fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak untuk kapal dan alat operasional lainnya.
- **Jasa Peralatan** : Penyewaan berbagai peralatan operasional untuk mendukung kegiatan perikanan.
- **Jasa Instalasi Air Bersih** : Penyediaan akses air bersih bagi kapal dan fasilitas lainnya.
- **Sewa Mess** : Penyewaan tempat tinggal sementara bagi nelayan atau pekerja pelabuhan.
- **Sewa Lahan/Tanah** : Penyewaan lahan untuk kegiatan usaha yang mendukung operasional perikanan.
- **Sewa Bangunan** : Penyewaan fasilitas bangunan untuk berbagai keperluan bisnis dan operasional di area pelabuhan.
- **Penjualan Air** : Penyediaan air bersih untuk kebutuhan operasional kapal dan lainnya.

Pelayanan kepada Masyarakat Perikanan yang Tidak Berkaitan dengan PNPB

Layanan ini diberikan tanpa dipungut biaya sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan perikanan di PPS Bungus. Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional kapal, mendukung produktivitas nelayan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Jenis layanan yang tersedia meliputi:

- **Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)** : Dokumen resmi yang diperlukan kapal sebelum berlayar, sebagai bentuk pengawasan dan keselamatan.
- **Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK)** : Proses pencatatan kapal yang masuk ke pelabuhan guna keperluan monitoring dan pengelolaan data.
- **Laporan Keberangkatan Kapal (STBLKK)** : Dokumentasi kapal yang berangkat dari pelabuhan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur operasional.
- **Logbook Perikanan** : Catatan resmi yang digunakan untuk mendokumentasikan aktivitas penangkapan ikan serta data operasional kapal.
- **Inspeksi Pembongkaran Ikan** : Pemeriksaan hasil tangkapan guna memastikan kualitas dan kesesuaian dengan regulasi perikanan.
- **Penerbitan SHTI-LA (Lembar Awal)** : Dokumen legal yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi hasil perikanan.

Dengan diterapkannya SOP ini, diharapkan setiap layanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dapat berjalan lebih profesional, efektif, dan akuntabel. Standar operasional ini juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan, mengoptimalkan pemanfaatan aset negara, serta memberikan manfaat maksimal bagi seluruh stakeholder di sektor perikanan dan kelautan. Selain itu, adanya SOP ini juga berperan dalam meningkatkan daya saing pelabuhan dalam mendukung industri perikanan nasional dan internasional.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian SOP secara berkala. Hal ini dilakukan guna memastikan

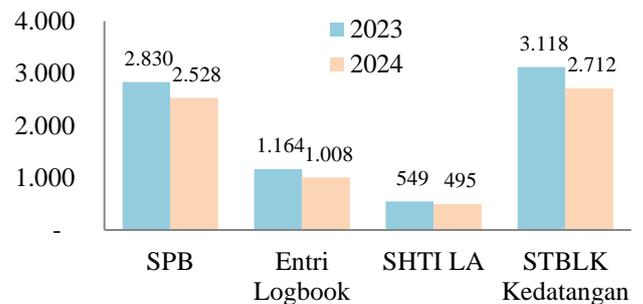
bahwa layanan yang diberikan tetap relevan dengan perkembangan industri perikanan, kebutuhan nelayan, serta dinamika regulasi yang berlaku. Ke depan, diharapkan PPS Bungus dapat semakin berkontribusi dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan serta mendukung kesejahteraan masyarakat perikanan secara menyeluruh.

Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Data Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2023 dan 2024

Tabel 50. Jenis dan Jumlah Pelayanan Kesyahbandaran di PPS Bungus

Tahun	Jenis Pelayanan			
	SPB	Entri Logbook	SHTI LA	STBLK Kedatangan
2020	3817	2438	120	4049
2021	3576	1153	184	3753
2022	2882	1106	503	3160
2023	2830	1164	549	3118
2024	2528	1008	495	2712



Gambar 38. Grafik Pelayanan Kesyahbandaran di PPS Bungus 2023 dan 2024

Pelayanan kesyahbandaran merupakan aspek fundamental dalam operasional pelabuhan perikanan. Layanan ini memastikan kelancaran dan kepatuhan operasional kapal perikanan terhadap regulasi yang berlaku. Kesyahbandaran tidak hanya mengawasi lalu lintas kapal, tetapi juga berperan dalam menjamin keselamatan pelayaran, mengawasi kepatuhan terhadap regulasi perikanan, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya laut.

Dalam ekosistem pelabuhan, pelayanan kesyahbandaran menjadi kunci dalam pengawasan pergerakan kapal, memastikan pemenuhan dokumen pelayaran, serta meningkatkan transparansi aktivitas perikanan. Selain itu, semakin ketatnya regulasi perikanan bertujuan untuk mencegah praktik ilegal fishing, memastikan kelengkapan data hasil tangkapan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan sumber daya ikan dengan keberlanjutan ekosistem laut.

Beberapa layanan utama yang diberikan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus dalam bidang kesyahbandaran meliputi:

1 Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen wajib bagi setiap kapal sebelum meninggalkan pelabuhan. Dokumen ini memastikan kapal telah memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan keselamatan, sehingga dapat berlayar dengan aman serta mematuhi regulasi perikanan. Selain sebagai pengawas kelayakan kapal, SPB juga berperan dalam mencegah praktik perikanan ilegal serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Dalam periode 2023–2024, jumlah penerbitan SPB di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus mengalami penurunan dari 2.830 kapal menjadi 2.528 kapal, berkurang 302 kapal atau 10,7%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti cuaca ekstrem yang membatasi aktivitas pelayaran, regulasi yang lebih ketat terkait perizinan dan keselamatan, serta faktor ekonomi seperti kenaikan biaya operasional dan fluktuasi harga ikan yang mempengaruhi keputusan nelayan untuk melaut.

Dampak dari penurunan penerbitan SPB cukup signifikan. Berkurangnya jumlah kapal yang berlayar dapat menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi di pelabuhan, mengurangi jumlah tangkapan ikan yang didistribusikan ke pasar, serta mempengaruhi pendapatan nelayan dan sektor pendukung lainnya. Namun, di sisi lain, pengurangan ini juga bisa mencerminkan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, di mana hanya kapal yang memenuhi standar yang diizinkan beroperasi, sehingga menciptakan sistem pelayaran yang lebih aman dan tertib.

Untuk mengatasi tren ini, beberapa langkah dapat diterapkan, seperti meningkatkan sosialisasi kepada nelayan terkait prosedur SPB, menyederhanakan proses perizinan melalui digitalisasi, serta memberikan insentif bagi kapal yang patuh terhadap regulasi. Dengan strategi yang tepat, diharapkan sistem penerbitan SPB tetap berjalan optimal, mendukung aktivitas perikanan yang berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan antara kepatuhan regulasi dan efisiensi operasional kapal perikanan.

2 Entri Logbook Perikanan.

Logbook perikanan adalah pencatatan wajib yang memuat informasi detail mengenai aktivitas penangkapan ikan, termasuk lokasi, jenis ikan yang ditangkap, serta alat tangkap yang digunakan. Dokumen ini berfungsi sebagai alat monitoring yang mendukung pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional. Selain itu, logbook juga berperan dalam pengumpulan data perikanan yang akurat untuk analisis kebijakan dan pengambilan keputusan di sektor kelautan dan perikanan.

Dalam periode 2023–2024, jumlah entri logbook di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus mengalami penurunan dari 1.164 menjadi 1.008, berkurang sebanyak 156 entri atau sekitar 13,4%. Penurunan ini dapat mengindikasikan beberapa faktor, seperti berkurangnya jumlah kapal yang aktif menangkap ikan, perubahan regulasi yang lebih ketat terkait pelaporan, atau kendala administratif dalam pencatatan logbook oleh awak kapal. Selain itu, tingkat kepatuhan nelayan dalam mengisi logbook juga bisa menjadi faktor utama yang memengaruhi angka ini.

Dampak dari penurunan entri logbook cukup signifikan karena dapat memengaruhi kualitas data yang digunakan untuk kebijakan perikanan. Jika pelaporan tidak akurat atau tidak lengkap, pengelolaan sumber daya ikan menjadi kurang optimal dan dapat menimbulkan risiko eksploitasi berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran nelayan tentang pentingnya logbook, termasuk melalui sosialisasi dan pelatihan. Selain itu, sistem pencatatan yang lebih sederhana dan digitalisasi logbook dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi serta kepatuhan dalam pelaporan aktivitas perikanan.

3 Surat Hasil Tangkapan Ikan - Lembar Awal (SHTI-LA)

Surat Hasil Tangkapan Ikan - Lembar Awal (SHTI LA) merupakan dokumen resmi yang mencatat jumlah dan jenis ikan hasil tangkapan sebelum didistribusikan atau dipasarkan. Dokumen ini memiliki peran penting dalam menjaga transparansi perdagangan hasil laut, mendukung pelaporan stok ikan secara akurat, serta mencegah terjadinya pencatatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Selain itu, SHTI LA juga berfungsi sebagai bagian dari sistem pengawasan terhadap aktivitas perikanan guna memastikan keberlanjutan sumber daya laut.

Pada periode 2023–2024, jumlah penerbitan SHTI LA mengalami penurunan dari 549 menjadi 495, atau berkurang sebanyak 54 dokumen (-9,8%). Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti berkurangnya aktivitas penangkapan ikan akibat kondisi cuaca, perubahan kebijakan terkait pencatatan hasil tangkapan, atau penyesuaian dalam sistem pelaporan oleh pihak terkait. Selain itu, kemungkinan adanya peralihan metode pencatatan yang lebih ketat atau digitalisasi juga bisa menjadi faktor yang memengaruhi jumlah penerbitan dokumen ini.

Dampak dari penurunan jumlah SHTI LA perlu diperhatikan, karena dapat berpengaruh terhadap validitas data stok ikan dan transparansi perdagangan perikanan. Jika pencatatan hasil tangkapan tidak optimal, hal ini dapat berdampak pada perencanaan dan pengelolaan sumber daya ikan yang kurang akurat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan kelancaran proses pencatatan, termasuk peningkatan kesadaran nelayan dan pemilik kapal mengenai pentingnya dokumen ini, serta optimalisasi sistem pencatatan agar lebih mudah diakses dan diterapkan di lapangan.

4 Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLK Kedatangan)

Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLK Kedatangan) adalah dokumen wajib yang mencatat setiap kapal yang tiba di pelabuhan. Dokumen ini berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap aktivitas kapal, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta membantu otoritas pelabuhan dalam mengelola arus lalu lintas kapal perikanan secara efektif. Dengan adanya STBLK Kedatangan, pelabuhan dapat memantau data kapal yang masuk, memperkirakan kebutuhan layanan pelabuhan, dan memastikan bahwa setiap kapal telah memenuhi ketentuan operasional sebelum melakukan aktivitas di pelabuhan.

Berdasarkan data, jumlah penerbitan STBLK Kedatangan mengalami penurunan dari 3.118 kapal pada tahun 2023 menjadi 2.712 kapal pada tahun 2024, atau turun sebanyak 406 kapal (-13%). Penurunan ini menunjukkan adanya pengurangan intensitas kedatangan kapal di pelabuhan, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang mempengaruhi aktivitas perikanan, kebijakan pemerintah terkait perizinan kapal, serta efisiensi operasional pemilik kapal dalam mengatur jadwal kedatangan dan keberangkatan bisa menjadi penyebab utama tren ini. Selain itu, faktor cuaca ekstrem atau pergeseran lokasi tangkapan ikan juga dapat memengaruhi keputusan kapal untuk singgah di pelabuhan tertentu.

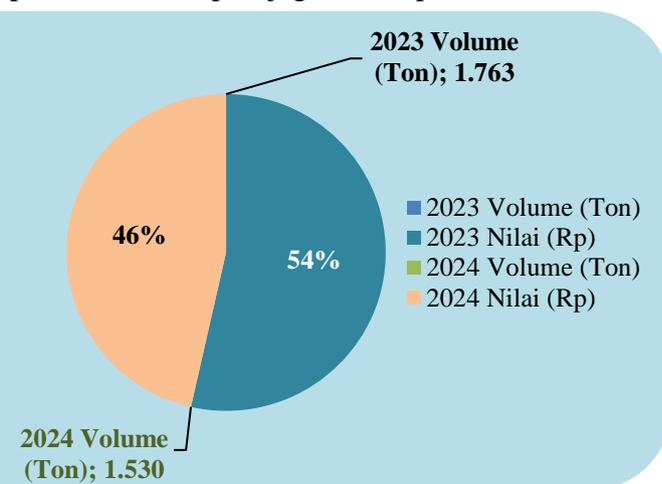
Dampak dari berkurangnya kedatangan kapal perlu dicermati, terutama terkait dengan pendapatan pelabuhan, distribusi hasil tangkapan, serta ketersediaan layanan bagi nelayan dan pemilik kapal. Untuk mengatasi potensi dampak negatif, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti optimalisasi layanan pelabuhan, peningkatan koordinasi dengan pemilik kapal, serta kebijakan yang lebih fleksibel namun tetap mengedepankan prinsip kepatuhan dan keselamatan dalam operasional perikanan.

Penyaluran Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan vital dalam operasional pelabuhan perikanan, mendukung aktivitas kapal perikanan, kapal non-perikanan, dan berbagai fasilitas lainnya. Ketersediaan dan kecukupan air bersih di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus dipengaruhi oleh sistem pengelolaan, distribusi, serta pola pemanfaatan oleh pengguna jasa. Penyediaan air di PPS Bungus dikelola langsung oleh pihak pelabuhan dengan sumber air baku yang berasal dari aliran air

permukaan di kawasan Bukit Barisan. Hasil uji fisik dan kimiawi menunjukkan bahwa air baku yang digunakan tergolong kelas satu, yang berarti dapat digunakan sebagai bahan baku air minum maupun keperluan lainnya yang memerlukan standar kualitas tinggi.

Sumber air baku PPS Bungus secara geografis terletak pada ketinggian 15 meter di atas permukaan laut dan berjarak 250 meter secara horizontal dari area pelayanan utama di pelabuhan. Sistem distribusi air bersih di PPS Bungus telah dirancang agar mampu menyalurkan air secara efisien ke berbagai titik layanan. Untuk mendukung keberlanjutan pasokan air, PPS Bungus telah membangun sistem distribusi yang mengandalkan jaringan transmisi air bersih yang disuplai melalui reservoir utama. Infrastruktur ini dikembangkan dengan pendanaan dari APBN Murni Kementerian Kelautan dan Perikanan serta DIPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Dengan sistem ini, diharapkan pasokan air tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara optimal.



Gambar 39. Distribusi Air Bersih di PPS Bungus

Namun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penyaluran air bersih di PPS Bungus mengalami penurunan. Grafik disamping ini menunjukkan penurunan volume penyaluran air bersih dalam dua tahun terakhir. Data berikut menunjukkan perubahan volume dan nilai penyaluran air bersih:

Tabel 51. Distribusi Air Bersih di PPS Bungus

Tahun	Volume (Ton)	Nilai (Rp)
2023	1.763	35.260.000
2024	1.530	30.600.000

Berdasarkan data di atas, terjadi penurunan volume penyaluran air bersih sebesar 13,2%, dari 1.763 ton pada tahun 2023 menjadi 1.530 ton pada tahun 2024. Sejalan dengan itu, nilai penjualan air bersih juga mengalami penurunan sebesar 13,2%, dari Rp35.260.000 pada tahun 2023 menjadi Rp30.600.000 pada tahun 2024. Penurunan ini dapat diinterpretasikan melalui berbagai faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kebutuhan air bersih di pelabuhan, antara lain efisiensi penggunaan air oleh pengguna jasa, penurunan aktivitas kapal yang berlabuh, kendala dalam sistem distribusi, serta dampak musim dan ketersediaan sumber air baku. Grafik pendukung menunjukkan bahwa pada tahun 2023, distribusi air bersih masih mendominasi dengan 54% dari total penyaluran, sementara pada tahun 2024 jumlahnya menurun menjadi 46%. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pola konsumsi air yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Menghadapi tantangan dalam penyediaan air bersih, diperlukan strategi pengelolaan yang lebih adaptif untuk memastikan kelangsungan pasokan air serta meningkatkan efisiensi distribusi. Beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan antara lain optimalisasi infrastruktur distribusi melalui pemeliharaan berkala pada jaringan transmisi air bersih untuk menghindari kebocoran serta memastikan distribusi tetap efisien. Selain itu, diversifikasi sumber air juga menjadi solusi dengan mengeksplorasi opsi tambahan sumber air baku untuk mengantisipasi fluktuasi ketersediaan pasokan akibat perubahan cuaca atau faktor lainnya. Penyesuaian tarif dan insentif efisiensi juga perlu dipertimbangkan dengan mengkaji kembali kebijakan tarif agar tetap kompetitif serta memberikan insentif bagi pengguna jasa yang menerapkan efisiensi penggunaan air. Penyuluhan dan sosialisasi kepada pengguna jasa tentang pentingnya konservasi air dan penerapan praktik

hemat air yang tetap efektif dalam mendukung operasional mereka juga dapat membantu dalam pengelolaan air bersih yang lebih baik.

Penurunan volume dan nilai penyaluran air bersih di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menjadi indikator penting yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan pelabuhan. Meskipun faktor-faktor seperti efisiensi penggunaan dan perubahan pola konsumsi turut berkontribusi terhadap tren penurunan ini, langkah-langkah strategis tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air bersih di pelabuhan. Dengan pendekatan yang lebih adaptif dan inovatif, PPS Bungus dapat memastikan bahwa pasokan air bersih tetap mencukupi bagi seluruh pengguna jasa, sekaligus mengoptimalkan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya air untuk jangka panjang. Evaluasi berkala terhadap sistem distribusi dan kebijakan tarif juga menjadi langkah krusial dalam menghadapi tantangan operasional ke depan.

Penyaluran BBM

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Usaha Perikanan Tangkap, disebutkan bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (BBM Tertentu) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi serta bahan bakar yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan standar, mutu (spesifikasi), harga, volume, serta konsumen tertentu yang diberikan subsidi.

Minyak Solar (gas oil) sebagai BBM bersubsidi diberikan kepada nelayan yang menggunakan kapal perikanan Indonesia dengan ukuran kapal 30 (tiga puluh) Gross Ton (GT) ke bawah yang terdaftar di SKPD provinsi/kabupaten/kota. Penyaluran BBM bersubsidi ini dilakukan setelah nelayan atau pemilik kapal memperoleh Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota. Jika di lokasi tersebut tidak terdapat pelabuhan perikanan atau belum memiliki organisasi pengelola pelabuhan perikanan, maka penerbitan Surat Rekomendasi dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 40. Penyaluran BBM Subsidi

Pada tahun 2023, jumlah penyaluran BBM mencapai 976.757 liter dengan nilai Rp. 6.641.947.600. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan volume penyaluran BBM menjadi 796.328 liter dengan nilai Rp. 5.415.030.400. Hal ini menunjukkan adanya penurunan volume penjualan BBM sebesar

Tabel 52. Data Penyaluran BBM Subsidi di PPS Bungus

TAHUN	2023	2024
Volume (Ton)	976.757	796.328
Nilai (Rp)	6.641.947.600	5.415.030.400

Penyaluran Minyak Solar (gas oil) di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus untuk memenuhi kebutuhan kapal ikan dilaksanakan oleh unit usaha gabungan Koperasi Mina Utama Jakarta dan KUD Mina Padang. Pelaksanaan penyaluran dilakukan dengan menyewa tangki BBM milik Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang memiliki kapasitas 75 KL serta melalui bunker langsung dari Pertamina.

180.429 liter atau sekitar 18,47%. Penurunan penyaluran BBM ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1 Penurunan Aktivitas Penangkapan Ikan – Berkurangnya aktivitas perikanan tangkap akibat faktor cuaca, kondisi laut, atau kebijakan terkait perikanan yang membatasi area dan metode penangkapan ikan.
- 2 Efisiensi Penggunaan BBM – Adanya peningkatan efisiensi penggunaan BBM oleh kapal perikanan melalui teknologi mesin yang lebih hemat bahan bakar.
- 3 Ketersediaan BBM di Wilayah Lain – Nelayan mungkin memperoleh BBM bersubsidi dari sumber lain di luar Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
- 4 Regulasi dan Kebijakan Pemerintah – Perubahan kebijakan terkait distribusi dan subsidi BBM yang mempengaruhi jumlah penyaluran.
- 5 Untuk memastikan distribusi BBM tetap optimal dan mendukung operasional perikanan, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan pengawasan penyaluran, evaluasi kebijakan subsidi, serta peningkatan infrastruktur penyimpanan dan distribusi BBM di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Penyaluran Es

Pabrik es di pelabuhan perikanan memiliki peran krusial dalam menjaga mutu ikan pasca-penangkapan, memastikan kesegarannya hingga sampai ke tangan konsumen. Ketersediaan es yang mencukupi dan berkualitas tinggi sangat memengaruhi harga jual ikan, daya saing nelayan, serta efisiensi rantai pasok industri perikanan. Es digunakan tidak hanya oleh nelayan, tetapi juga oleh pedagang ikan, perusahaan pengolahan hasil laut, hingga industri ekspor yang mengandalkan produk perikanan dalam kondisi segar.

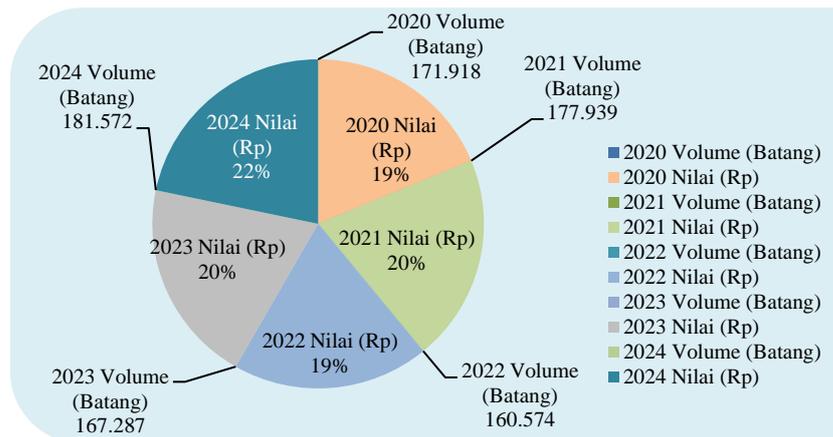
Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, kebutuhan es bagi kapal perikanan tradisional, kapal perikanan industri, serta pedagang ikan disuplai oleh PT. Danitama Mina. Pabrik ini berperan sebagai penyedia utama es batang yang digunakan dalam berbagai tahap, mulai dari pendinginan ikan saat penangkapan, penyimpanan, hingga distribusi ke berbagai daerah. Dengan meningkatnya aktivitas perikanan dan tuntutan mutu yang lebih tinggi, keberadaan pabrik es menjadi semakin penting dalam mendukung keberlanjutan sektor perikanan di pelabuhan ini.

Selain menyediakan es, pabrik juga berfungsi menjaga stabilitas harga dan pasokan, terutama pada musim puncak penangkapan ikan. Keterbatasan pasokan es dapat menghambat aktivitas nelayan dan menyebabkan lonjakan harga, sehingga sistem distribusi serta kapasitas produksi pabrik harus dikelola dengan optimal. Efisiensi produksi juga menjadi faktor penting, termasuk penggunaan teknologi pendinginan modern dan energi alternatif guna mendukung operasional yang berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya standar mutu ikan di pasar domestik maupun internasional, keberadaan pabrik es yang modern dan efisien akan menjadi nilai tambah bagi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Investasi dalam peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi bentuk es, serta penerapan teknologi ramah lingkungan dapat menjadi strategi penting untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing industri perikanan di pelabuhan ini.

Tabel 53. Penyaluran ES di PPS Bungus dalam Lima Tahun

TAHUN	Volume (Batang)	Nilai (Rp)
2020	171.918	3.524.319.000
2021	177.939	3.825.688.500
2022	160.574	3.612.915.000
2023	167.287	3.763.957.500
2024	181.572	4.085.370.000
TOTAL	859.290	18.812.250.000



Gambar 41. Penyaluran ES di PPS Bungus dalam Lima Tahun

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penyaluran es di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, volume es yang disalurkan mencapai 171.918 batang dengan nilai Rp 3.524.319.000. Tahun berikutnya, jumlah penyaluran meningkat menjadi 177.939 batang dengan nilai Rp 3.825.688.500, menunjukkan peningkatan permintaan seiring dengan pulihnya aktivitas perikanan. Namun, pada tahun 2022, volume penyaluran mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 160.574 batang dengan nilai Rp 3.612.915.000. Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi cuaca yang kurang mendukung, kebijakan perikanan, atau perubahan dalam pola operasional nelayan.

Pada tahun 2023, volume penyaluran kembali mengalami kenaikan menjadi 167.287 batang dengan nilai Rp 3.763.957.500, mencerminkan adanya pemulihan dalam aktivitas perikanan. Puncak penyaluran terjadi pada tahun 2024, di mana jumlah es yang disalurkan mencapai 181.572 batang dengan nilai Rp 4.085.370.000. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas perikanan yang lebih stabil serta meningkatnya kebutuhan es untuk menjaga mutu hasil tangkapan.

Secara keseluruhan, selama periode 2020 hingga 2024, total penyaluran es di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mencapai 859.290 batang dengan nilai ekonomi sebesar Rp 18.812.250.000. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi tahunan, kebutuhan es tetap tinggi dan mengalami pertumbuhan dalam jangka panjang.

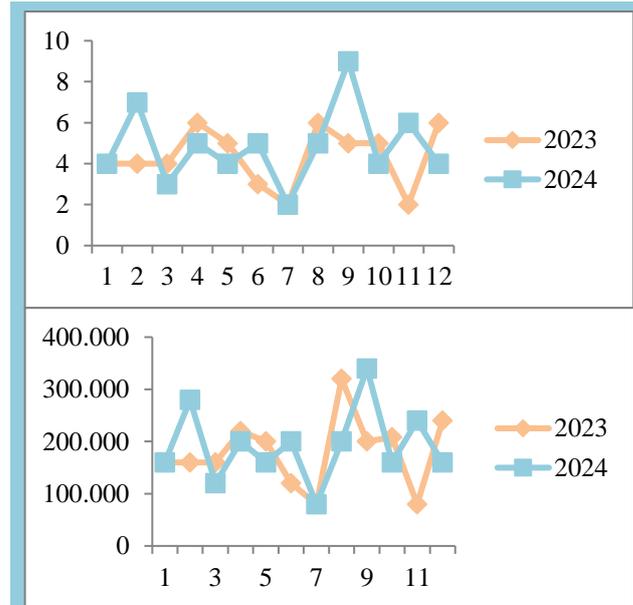
Pelayanan Bengkel

Pelayanan bengkel mencakup berbagai jenis pekerjaan teknis yang berhubungan dengan kebutuhan operasional perkapalan dan mesin. Layanan yang diberikan antara lain meliputi pekerjaan bubut, perbaikan kapal, perbaikan mesin, serta pekerjaan lainnya yang bersifat pendukung dan penunjang teknis.

Pada tahun 2023, bengkel menerima 52 order dengan total nilai jasa Rp2.148.800,-. Jumlah ini meningkat pada tahun 2024 menjadi 58 order dengan nilai jasa Rp2.300.000,-. Terjadi peningkatan volume order sebesar 11,54 persen dan kenaikan nilai jasa sebesar Rp151.200,- atau 7,04 persen. Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan pelanggan yang semakin tinggi serta menunjukkan kinerja bengkel yang semakin produktif dan adaptif terhadap kebutuhan teknis yang berkembang.

Tabel 54. Kegiatan Bengkel PPS Bungus

No	Bulan	Volume		Nilai (Rp)	
		Tahun		Tahun	
		2023	2024	2023	2024
1.	Januari	4	4	160.000	160.000
2.	Februari	4	7	160.000	280.000
3.	Maret	4	3	160.000	120.000
4.	April	6	5	220.000	200.000
5.	Mei	5	4	200.000	160.000
6.	Juni	3	5	120.000	200.000
7.	Juli	2	2	80.000	80.000
8.	Agustus	6	5	320.000	200.000
9.	September	5	9	200.000	340.000
10.	Oktober	5	4	208.000	160.000
11.	November	2	6	80.000	240.000
12.	Desember	6	4	240.000	160.000
J U M L A H		52	58	2.148.000	2.300.000



Gambar 42. Volume dan Nilai Kegiatan Bengkel

Kegiatan bengkel selama tahun 2023 dan 2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, baik dari sisi volume pekerjaan maupun nilai jasa yang dihasilkan. Secara umum, terjadi peningkatan kinerja pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sisi volume pekerjaan, total tonase yang ditangani sepanjang tahun 2023 adalah 52 ton, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 58 ton, menunjukkan adanya peningkatan sebesar 6 ton atau sekitar 11,54 persen. Peningkatan ini terutama terjadi pada beberapa bulan, seperti Februari (dari 4 ton menjadi 7 ton), Juni (dari 3 ton menjadi 5 ton), September (dari 5 ton menjadi 9 ton), dan November (dari 2 ton menjadi 6 ton). Hal ini mencerminkan peningkatan aktivitas perbaikan atau permintaan jasa pada bulan-bulan tersebut.

Sementara itu, dari sisi nilai jasa, terdapat kenaikan dari Rp2.148.000,00 pada tahun 2023 menjadi Rp2.300.000,00 pada tahun 2024. Kenaikan sebesar Rp151.200,00 atau sekitar 7,04 persen ini menunjukkan bahwa tidak hanya volume pekerjaan yang bertambah, tetapi juga nilai pekerjaan, yang dapat disebabkan oleh meningkatnya kompleksitas pekerjaan maupun penyesuaian tarif jasa.

Beberapa bulan menunjukkan lonjakan nilai jasa yang cukup signifikan, antara lain Februari (dari Rp160.000,00 menjadi Rp280.000,00), Juni (dari Rp120.000,00 menjadi Rp200.000,00), September (dari Rp200.000,00 menjadi Rp340.000,00), dan November (dari Rp80.000,00 menjadi Rp240.000,00). Lonjakan tersebut dapat menjadi indikator meningkatnya nilai pekerjaan baik dari sisi volume maupun tingkat kesulitan.

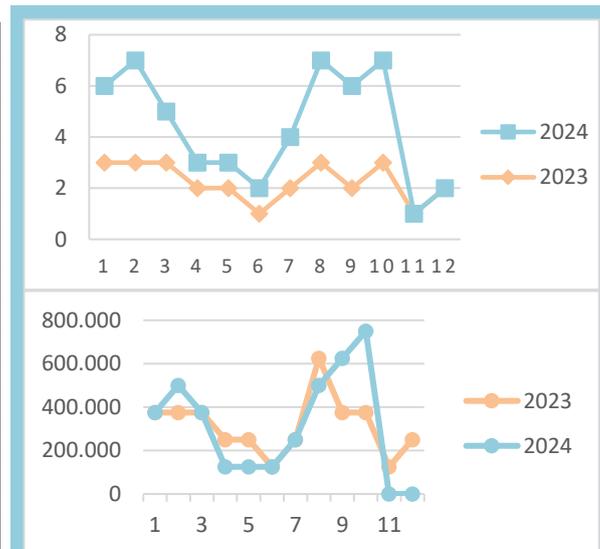
Namun demikian, terdapat pula bulan-bulan di mana volume dan nilai jasa mengalami penurunan, seperti Maret, April, Mei, Agustus, Oktober, dan Desember. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap layanan bengkel bersifat dinamis dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti musim penangkapan ikan, kebutuhan pemeliharaan berkala, serta jadwal operasional pelanggan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tren positif yang mencerminkan peran strategis layanan bengkel dalam mendukung kegiatan operasional teknis. Peningkatan jumlah pekerjaan dan nilai jasa pada tahun 2024 menjadi indikator keberhasilan bengkel dalam menjaga kualitas layanan serta responsivitas terhadap kebutuhan pelanggan secara berkelanjutan.

Pelayanan Jasa Listrik

Tabel 55. Pelayanan Jasa Listrik Tahun 2024

NO	Bulan	Volume		Nilai (Rp)	
		Tahun		Tahun	
		2023	2024	2023	2024
1	Januari	14	17	45.704.259	30.226.126
2	Februari	23	19	48.986.011	38.266.283
3	Maret	22	17	34.242.573	35.409.715
4	April	19	25	24.068.367	35.526.106
5	Mei	24	18	16.573.995	41.680.338
6	Juni	12	18	14.251.616	4.141.077
7	Juli	23	18	21.718.955	90.107.142
8	Agustus	21	17	40.984.160	65.823.364
9	September	26	34	51.533.370	52.214.461
10	Oktober	19	18	42.165.975	4.896.517
11	November	10	18	26.757.509	121.565.763
12	Desember	12	18	29.342.687	48.176.688
JUMLAH		225	237	396.329.477	568.033.580



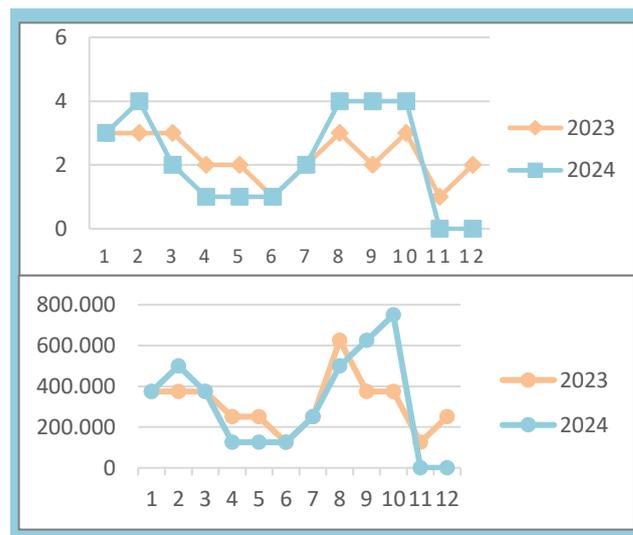
Data pelayanan jasa listrik di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus menunjukkan peningkatan dari 225 order pada tahun 2023 menjadi 237 order di tahun 2024, naik sekitar 5,3%. Namun, yang paling mencolok adalah lonjakan nilai layanan, dari Rp 396,3 juta pada 2023 menjadi Rp 568 juta pada 2024, meningkat 43,3%. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan pemakaian listrik per order atau penyesuaian tarif selama 2024.

Secara bulanan, terjadi fluktuasi yang signifikan. Pada Juli dan November 2024, nilai layanan melonjak hingga Rp 90 juta dan Rp 121 juta, meski jumlah order tidak meningkat tajam. Ini menunjukkan kemungkinan adanya konsumsi energi besar atau proyek khusus. Sebaliknya, pada Juni dan Oktober, nilai pelayanan justru turun drastis meskipun order meningkat atau tetap, yang perlu ditelusuri lebih lanjut apakah disebabkan oleh tarif khusus, koreksi data, atau penurunan pemakaian listrik.

Pelayanan Penggunaan Forklift

Tabel 56. Pelayanan Forklift Tahun 2024

NO	Bulan	Volume		Nilai (Rp)	
		Tahun		Tahun	
		2023	2024	2023	2024
1	Januari	3	3	375.000	375.000
2	Februari	3	4	375.000	500.000
3	Maret	3	2	375.000	375.000
4	April	2	1	250.000	125.000
5	Mei	2	1	250.000	125.000
6	Juni	1	1	125.000	125.000
7	Juli	2	2	250.000	250.000
8	Agustus	3	4	625.000	500.000
9	September	2	4	375.000	625.000
10	Oktober	3	4	375.000	750.000
11	November	1	-	125.000	-
12	Desember	2	-	250.000	-
JUMLAH		27	26	3.750.000	3.750.000



Pelayanan penggunaan forklift di PPS Bungus selama tahun 2023 dan 2024 menunjukkan jumlah order yang relatif stabil, dengan total 27 order pada tahun 2023 dan sedikit menurun menjadi 26 order pada tahun 2024. Menariknya, meskipun terjadi penurunan satu order, nilai pendapatan dari layanan ini tetap sama di kedua tahun, yaitu sebesar Rp 3.750.000. Hal ini mengindikasikan adanya penyesuaian tarif atau peningkatan penggunaan per order pada beberapa bulan tertentu di tahun 2024.

Secara bulanan, fluktuasi jumlah order dan nilai terlihat cukup bervariasi. Misalnya, pada bulan Oktober 2024, terjadi peningkatan nilai yang signifikan menjadi Rp 750.000 dibandingkan Rp 375.000 di tahun sebelumnya, meskipun jumlah order hanya naik satu. Demikian pula pada bulan September, peningkatan jumlah order dari 2 menjadi 4 diikuti dengan peningkatan nilai dari Rp 375.000 menjadi Rp 625.000. Di sisi lain, beberapa bulan seperti April dan Mei menunjukkan penurunan baik dari segi jumlah order maupun nilai, masing-masing dari 2 order menjadi 1, dan nilai dari Rp 250.000 menjadi Rp 125.000. Hal serupa juga terjadi pada bulan Agustus, di mana jumlah order naik, namun nilai justru turun dari Rp 625.000 menjadi Rp 500.000, yang mengindikasikan adanya kemungkinan tarif khusus atau jenis layanan berbeda.

Selain itu, pada bulan November dan Desember 2024 tidak tercatat adanya penggunaan forklift, berbeda dengan tahun sebelumnya yang masih menunjukkan adanya permintaan layanan. Hal ini perlu dicermati lebih lanjut apakah disebabkan oleh berkurangnya aktivitas bongkar muat pada akhir tahun atau perubahan pola operasional pengguna jasa.

Secara keseluruhan, meskipun secara total jumlah order sedikit menurun, kinerja pelayanan forklift tetap stabil dari sisi pendapatan, yang menandakan adanya efisiensi atau penyesuaian strategi tarif.

Pelayanan Kebersihan

Dalam pengelolaannya, pelabuhan perikanan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga harus memperhatikan aspek ekologi. Ketiga aspek tersebut ekonomi, sosial, dan ekologi merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan perlu dikelola secara terpadu. Pendekatan ini menjadi dasar dari model pengelolaan pelabuhan yang berwawasan lingkungan demi mendukung keberlanjutan pembangunan. Perpaduan yang seimbang antara produktivitas ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan mencerminkan penerapan konsep *Eco Port*, yaitu pelabuhan yang menjadikan integritas ekologi sebagai elemen utama dalam sistem pengelolaannya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan, diperlukan penerapan manajemen pelabuhan yang pro-lingkungan secara berkelanjutan.

Salah satu bentuk nyata dari manajemen pro-lingkungan adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan pelabuhan. Kebersihan lingkungan tidak hanya menciptakan suasana yang aman, bersih, dan nyaman, tetapi juga berperan penting dalam mencegah penyebaran penyakit serta menjaga ketertiban dan keselamatan aktivitas di pelabuhan. Dari sisi kesehatan masyarakat, berbagai faktor lingkungan perlu diawasi secara ketat, termasuk potensi agen penyebab penyakit (fisik, kimia, dan mikrobiologis), media perantara seperti air, udara, makanan/minuman, serta vektor penyakit (seperti serangga dan tikus), sampah, limbah, dan perilaku manusia yang berisiko. Pemantauan terhadap kondisi tersebut, termasuk terhadap penyakit dan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas pelabuhan, merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan pelabuhan yang sehat dan berkelanjutan.

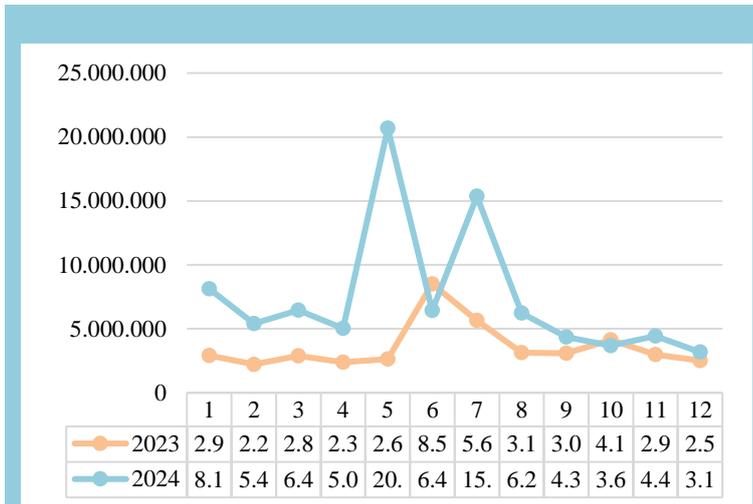
Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan lingkungan, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus telah menerapkan standar ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan

sejak tahun 2022. Standar ini menegaskan bahwa pelabuhan memiliki sistem pengelolaan lingkungan yang terstruktur dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan.

Atas upaya nyata dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan pelabuhan, PPS Bungus dianugerahi penghargaan sebagai "Pelabuhan Sehat" pada tahun 2024 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penghargaan ini menjadi bukti pengakuan nasional atas komitmen dan kinerja PPS Bungus dalam mewujudkan pelabuhan perikanan yang tidak hanya produktif, tetapi juga aman, bersih, dan berwawasan lingkungan.

Tabel 57. Penerimaan Jasa Kebersihan di PPS Bungus Tahun 2023 dan 2024

No	Bulan	Jasa Kebersihan	
		Tahun	
		2023	2024
1.	Januari	2.902.294	8.121.552
2.	Februari	2.226.774	5.407.542
3.	Maret	2.879.274	6.453.212
4.	April	2.389.634	5.033.262
5.	Mei	2.650.834	20.677.162
6.	Juni	8.518.031	6.434.062
7.	Juli	5.652.052	15.380.384
8.	Agustus	3.128.804	6.234.912
9.	September	3.082.554	4.351.412
10.	Oktober	4.144.514	3.684.372
11.	November	2.991.684	4.428.352
12.	Desember	2.505.044	3.179.002
J U M L A H		43.071.493	89.385.226



Gambar 43. Penerimaan Jasa Kebersihan di PPS Bungus Tahun 2023 dan 2024

Pelayanan Docking Kapal

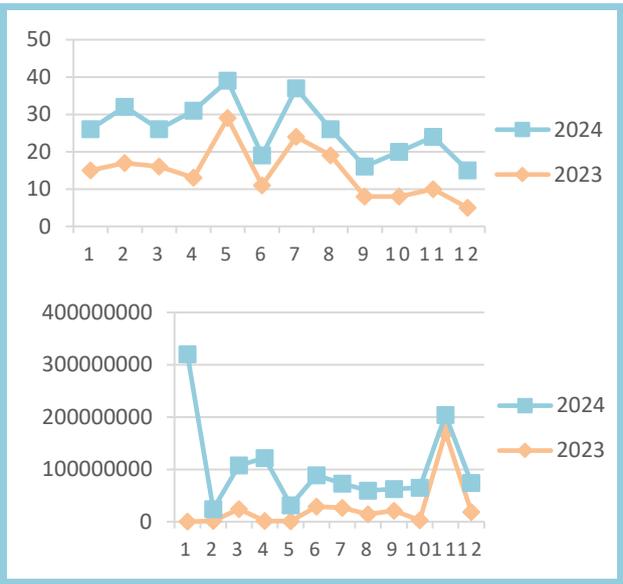
Kegiatan docking kapal merupakan salah satu layanan vital yang disediakan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus guna memastikan keberlangsungan dan keselamatan operasional kapal-kapal perikanan. Docking adalah proses pengangkatan kapal dari air ke darat untuk dilakukan pemeriksaan, pemeliharaan rutin, atau perbaikan struktur kapal, terutama bagian bawah lambung yang tidak dapat dijangkau saat kapal berada di air.

Secara umum, terdapat empat jenis dock yang umum digunakan di pelabuhan, yaitu: graving dock (kolam tertutup yang dikeringkan), floating dock (dock apung), slipway atau landasan tarik, serta synchrolift dry dock (sistem pengangkat kapal secara vertikal). Masing-masing memiliki keunggulan sesuai dengan skala dan jenis kapal yang dilayani.

Di PPS Bungus, sistem docking yang digunakan adalah Wise/Vessel Lift, yaitu alat pengangkat kapal yang bekerja dengan sistem hidrolik dan bergerak hingga sisi dermaga. Alat ini memungkinkan kapal diangkat langsung dari air untuk dibawa ke area servis di darat. Dengan kapasitas angkat maksimal hingga 30 Gross Ton (GT), Vessel Lift di PPS Bungus dirancang khusus untuk melayani kapal perikanan kecil hingga menengah, yang merupakan mayoritas armada aktif di pelabuhan ini.

Ketersediaan fasilitas docking yang memadai tidak hanya mendukung kelancaran operasional kapal nelayan, tetapi juga menjadi bagian penting dari standar keselamatan pelayaran dan ketahanan

armada. Layanan ini turut berkontribusi dalam menjaga umur pakai kapal, mengurangi risiko kecelakaan laut, serta meningkatkan efisiensi usaha perikanan secara keseluruhan.



Gambar 44. Grafik Pelayanan Docking

Berdasarkan data tahun 2023 dan 2024, terjadi penurunan jumlah kapal yang melakukan docking, dari 175 kapal pada tahun 2023 menjadi 136 kapal pada tahun 2024. Meski terdapat penurunan volume sebesar 22,3%, namun nilai jasa docking pada beberapa bulan justru menunjukkan peningkatan. Total nilai pendapatan dari jasa docking juga mengalami penurunan, dari Rp333.503.100 di tahun 2023 menjadi Rp282.994.120 pada tahun 2024 atau turun sekitar 15,1%.

Beberapa bulan menunjukkan tren menarik, seperti Juli 2024 yang mencatatkan nilai tertinggi sebesar Rp50.261.600 meskipun hanya melayani 13 kapal. Angka ini lebih kecil dibandingkan 24 kapal pada Juli 2023 yang menghasilkan Rp35.557.800. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan terdapat kapal-kapal dengan kerusakan atau kebutuhan reparasi lebih kompleks sehingga nilai layanan docking lebih tinggi meskipun jumlah kapal lebih sedikit.

Sebaliknya, bulan Agustus 2024 mengalami penurunan tajam baik dari sisi volume (19 kapal menjadi 7 kapal) maupun nilai (Rp30.263.000 menjadi hanya Rp11.372.000). Beberapa bulan lain seperti April dan Oktober 2024 mengalami peningkatan nilai layanan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun volume kapal tidak terlalu jauh berbeda, mengindikasikan adanya peningkatan permintaan jenis perbaikan yang lebih spesifik atau intensif.

Pas Masuk Pelabuhan.

Dasar Tarif Pungutan Pas Masuk

Dasar hukum pemberlakuan tarif pungutan pas masuk diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Peraturan ini menjadi landasan bagi unit pelaksana teknis dalam menetapkan tarif atas layanan dan fasilitas pelabuhan perikanan. Pungutan pas masuk dikenakan kepada kapal perikanan sebagai kontribusi atas pemanfaatan fasilitas pelabuhan, serta mendukung pengelolaan dan pelayanan pelabuhan yang efisien, transparan, dan berkelanjutan.

Tabel 58. Docking Tahun 2023 dan 2024

No	Bulan	Volume (Kapal)		Nilai (Rp)	
		Tahun		Tahun	
		2023	2024	2023	2024
1.	Januari	15	11	38.948.000	21.521.200
2.	Februari	17	15	23.692.000	40.489.000
3.	Maret	16	10	37.137.000	13.012.000
4.	April	13	18	22.850.000	33.256.000
5.	Mei	29	10	30.761.700	18.894.000
6.	Juni	11	8	12.894.000	14.122.000
7.	Juli	24	13	35.557.800	50.261.600
8.	Agustus	19	7	30.263.000	11.372.000
9.	September	8	8	23.535.600	16.976.000
10.	Oktober	8	12	35.950.000	21.774.320
11.	November	10	14	22.620.000	22.916.000
12.	Desember	5	10	19.294.000	18.400.000
Jumlah		175	136	333.503.100	282.994.120

Jenis Kendaraan yang dikenakan Pas Masuk:

- Sepeda / Becak / Gerobak
- Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Roda Tiga
- Kendaraan Bermotor Roda Tiga
- Mobil Penumpang, Angkutan Umum, dan sejenisnya
- Bus / Truk
- Truk Gandeng / Trailer / Container

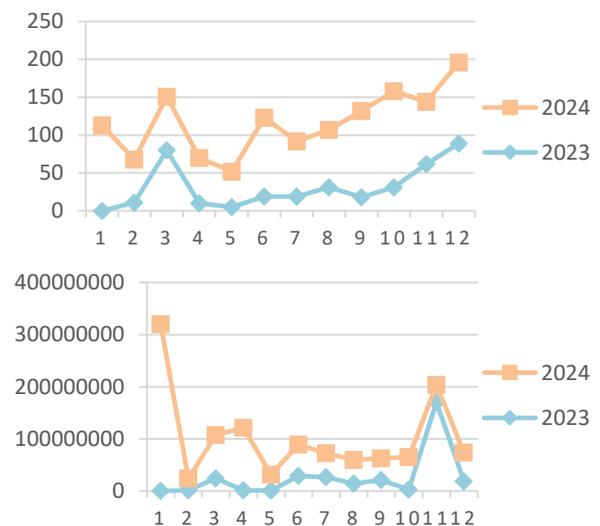
Jenis Pas Masuk:

- Pas Masuk Harian:
Dikenakan biaya untuk setiap kali kendaraan masuk ke area pelabuhan.
- Pas Masuk Berlangganan Bulanan:
Dibayar secara rutin setiap bulan, berlaku untuk kendaraan yang sering keluar-masuk pelabuhan.
- Pas Masuk Berlangganan Tiga Bulanan:
Berlaku selama tiga bulan, dan khusus diperuntukkan bagi jenis kendaraan berikut:
 - Kendaraan Bermotor Roda Dua
 - Mobil Penumpang, Angkutan Umum, dan sejenisnya
 - Bus / Truk

Dengan adanya pengelompokan jenis kendaraan dan fleksibilitas waktu pembayaran (harian, bulanan, hingga tiga bulanan), sistem pas masuk di Pelabuhan Perikanan dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna pelabuhan sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak dari sektor ini.

Tabel 59. Penerimaan Pas Masuk

No	Bulan	Volume		Nilai (Rp)	
		Tahun		Tahun	
		2023	2024	2023	2024
1	Januari	862	592	8.891.000	6.411.000
2	Februari	490	586	7.033.000	6.582.000
3	Maret	609	573	5.612.000	7.724.000
4	April	430	458	7.198.100	5.263.000
5	Mei	607	1.498	6.011.000	20.429.000
6	Juni	576	909	6.412.000	10.345.000
7	Juli	967	1.158	11.880.000	14.753.000
8	Agustus	744	590	8.231.000	8.773.000
9	September	515	750	4.680.000	7.565.000
10	Oktober	1174	708	16.593.000	6.653.000
11	November	592	538	7.090.000	6.611.000
12	Desember	1130	518	15.033.000	6.059.000
Jumlah		8.696	8.878	104.664.100	107.168.000



Berdasarkan data penerimaan pas masuk di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus tahun 2023 dan 2024, terlihat adanya peningkatan baik dari sisi volume kapal masuk maupun nilai penerimaan. Volume kapal masuk meningkat dari 8.696 kapal pada tahun 2023 menjadi 8.878 kapal pada tahun 2024, atau naik sekitar 2,09%. Sejalan dengan itu, nilai penerimaan pas masuk juga mengalami kenaikan sebesar 2,39%, dari Rp104.664.100 di tahun 2023 menjadi Rp107.168.000 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum aktivitas kapal yang masuk ke PPS Bungus cenderung meningkat, meskipun tidak signifikan.

Puncak kunjungan kapal terjadi pada bulan Oktober 2023 dengan 1.174 kapal dan pada bulan Mei 2024 dengan 1.498 kapal, yang juga menjadi bulan dengan nilai penerimaan tertinggi di tahun 2024 sebesar Rp20.429.000. Sebaliknya, penerimaan terendah pada tahun 2023 terjadi pada bulan September (Rp4.680.000), sementara pada tahun 2024 nilai terendah tercatat pada bulan Desember sebesar Rp6.059.000. Meskipun terdapat bulan-bulan dengan volume tinggi, nilai penerimaan tidak selalu sebanding, yang kemungkinan disebabkan oleh variasi jenis kapal, ukuran, atau durasi sandar yang memengaruhi tarif pas masuk yang dikenakan.

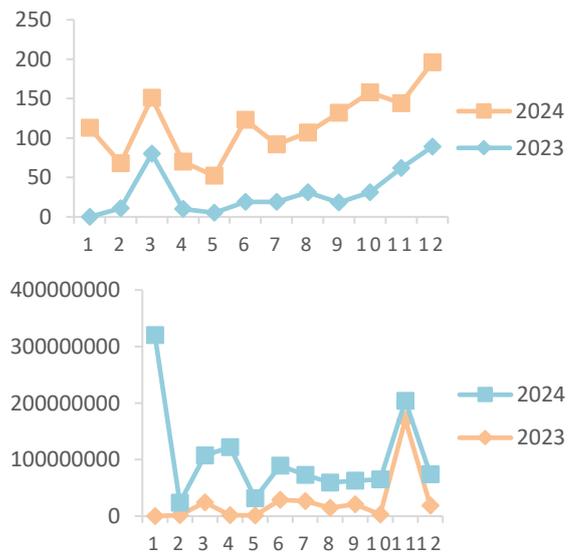
Kegiatan Tambat Labuh

Tambat labuh merupakan aktivitas utama dalam operasional pelabuhan yang memerlukan perhatian khusus, terutama terkait keberadaan dan kondisi fasilitasnya. Fasilitas utama seperti dermaga dan kolam labuh berfungsi sebagai tempat kapal bersandar untuk bongkar muat, pengisian bahan bakar, dan layanan lainnya.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah dilengkapi fasilitas tambat labuh yang mendukung pelayanan kapal perikanan. Penetapan tarif jasa tambat labuh mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Regulasi ini menjadi dasar penarikan tarif sekaligus mendukung pelayanan pelabuhan yang profesional, berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap pendapatan negara.

Tabel 60. Kegiatan Tambat Labuh

No	Bulan	Volume		Nilai (Rp)	
		Tahun		Tahun	
		2023	2024	2023	2024
1.	Januari	-	113	-	320.103.800
2.	Februari	11	57	1.723.500	22.190.460
3.	Maret	80	71	24.371.000	83.135.180
4.	April	10	60	1.565.000	120.259.420
5.	Mei	5	47	985.000	30.663.620
6.	Juni	19	104	28.992.200	60.052.640
7.	Juli	19	73	26.403.000	46.341.050
8.	Agustus	31	76	14.538.060	44.875.855
9.	September	18	114	20.822.200	41.883.115
10.	Oktober	31	127	2.660.846	62.239.325
11.	November	62	82	170.454.560	33.375.415
12.	Desember	89	107	18.424.420	55.458.380
J U M L A H		375	1.031	310.939.786	920.578.260



Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam konteks keuangan negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki peran yang sangat penting dan kedudukannya sejajar dengan penerimaan dari sektor perpajakan. Hal ini terlihat dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang menempatkan PNBP dan pajak sebagai dua komponen utama dalam struktur pendapatan dalam negeri.

PNBP merupakan pungutan yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan atas manfaat langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari layanan publik atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang dimiliki negara. Pungutan ini dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui mekanisme APBN. PNBP mencakup berbagai sektor, termasuk sumber daya alam, jasa layanan, serta hasil pengelolaan aset negara.

Untuk meningkatkan kontribusi PNBP, pemerintah menetapkan beberapa strategi utama, di antaranya:

- Memaksimalkan kualitas layanan jasa melalui pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada;
- Melakukan perbaikan dan penambahan sarana-prasarana pelabuhan;
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM);
- Memperkuat kerja sama lintas institusi; serta
- Meningkatkan pengawasan dan menyempurnakan regulasi serta implementasinya di lapangan.

Penerapan strategi-strategi tersebut telah memberikan dampak positif terhadap kinerja pelabuhan, termasuk di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus. Pada tahun 2024, total penerimaan PNBP yang dihimpun oleh PPS Bungus mencapai Rp2.608.458.995,-. Jumlah ini menunjukkan pencapaian yang luar biasa karena melebihi target tahunan sebesar Rp1.283.204.000,-, atau setara dengan 203% dari target yang ditetapkan.

Capaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan pelabuhan serta peran aktif PPS Bungus dalam mendukung penerimaan negara melalui layanan jasa pelabuhan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Keberhasilan ini juga menjadi indikator penting bahwa penguatan kelembagaan dan pelayanan publik di pelabuhan dapat berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan negara non-pajak.

Tabel 61. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024

Akun	Jenis Jasa	Target 2024	Realisasi Tahun 2024
425131	Pelayanan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	317.175.000	512.081.472
	Pelayanan Penggunaan Tanah dan Bangunan	115.650.000	56.509.155
	Tanah yang dipakai di kawasan Pelabuhan Perikanan	41.450.000	4.705.500
	Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin	140.300.000	439.916.817
	Pelayanan peralatan di kawasan pelabuhan perikanan	7.500.000	7.200.000
	Pelayanan Penggunaan Peralatan Pengolahan	10.400.000	-
	Pelayanan Penggunaan Transportasi	1.875.000	3.750.000
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	966.029.000	2.096.377.523
	Pelayanan tambat untuk Kapal Perikanan	136.479.000	331.052.154
	Pelayanan Tambat untuk Kapal Non Perikanan	476.600.000	485.531.961
	Pelayanan Docking dengan Pekerja	68.000.000	117.062.800
	Pelayanan Perbaikan Kapal	55.400.000	165.931.320
	Pelayanan Pengadaan Air	31.000.000	229.912.480
	Pelayanan Bengkel	1.800.000	2.300.000
	Pelayanan Pas Masuk Harian	70.000.000	65.408.000
	Pelayanan Pas Masuk Berlangganan	28.500.000	41.760.000
	Pelayanan Kebersihan di Kawasan Pelabuhan	7.650.000	20.098.476
	Pelayanan Kebersihan Kolam Pelabuhan	62.000.000	69.286.750
	Pendapatan Jasa Lainnya	28.600.000	568.033.582
	TOTAL PENERIMAAN	1.283.204.000	2.608.458.995

Jumlah Nelayan dan Tenaga Kerja

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas perikanan, tidak hanya sebagai pusat kegiatan penangkapan ikan, tetapi juga sebagai lokasi yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Tenaga kerja yang ada di PPS Bungus

dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu nelayan, pedagang ikan, penyedia jasa dan transportasi, serta tenaga kerja pada industri pengolahan ikan.

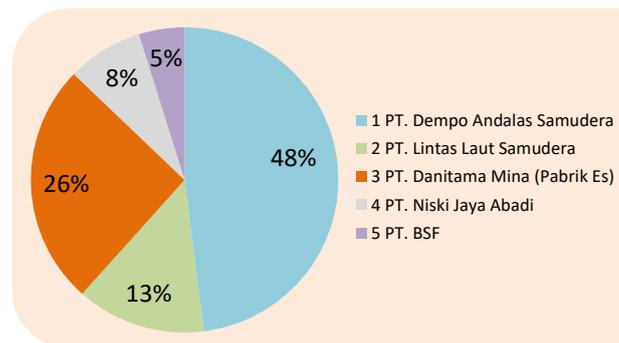
Kelompok nelayan merupakan bagian terbesar yang berkontribusi langsung pada kegiatan produksi perikanan tangkap. Namun, hingga kini, para pekerja sektor perikanan khususnya nelayan dan anak buah kapal (ABK) masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait perlindungan hak-hak dasar mereka saat bekerja di laut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tidak jarang ditemukan kasus perlakuan tidak adil, bahkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Sebagai bentuk respons terhadap isu tersebut, Pemerintah Indonesia terus mendorong perusahaan-perusahaan perikanan untuk melaksanakan sertifikasi usaha dan menerapkan prinsip perlindungan HAM dalam kegiatan operasional mereka. Beberapa langkah nyata yang diwajibkan antara lain: pemberian asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan, serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebagai instrumen formal perlindungan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan.

Sementara itu, jumlah tenaga kerja non-nelayan yang terserap di PPS Bungus pada tahun 2024 tercatat sebanyak 498 orang. Tenaga kerja ini tersebar di berbagai instansi dan unit kerja, termasuk Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, instansi pemerintah dan swasta, serta tenaga lepas yang bekerja di sekitar kawasan pelabuhan. Keberadaan tenaga kerja non-nelayan ini menunjukkan bahwa PPS Bungus juga memiliki kontribusi dalam mendukung penciptaan lapangan kerja di sektor jasa dan administrasi kelautan.

Tabel 62. Jumlah tenaga kerja Non Nelayan di PPS Bungus tahun 2024

No	Nama Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	
1	PT. Dempo Andalas Samudera	60	Orang
2	PT. Lintas Laut Samudera	17	Orang
3	PT. Danitama Mina (Pabrik Es)	32	Orang
4	PT. Niski Jaya Abadi	10	Orang
5	PT. BSF	6	Orang
Jumlah		125	Orang



Investasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus merupakan salah satu simpul penting dalam rantai industri kelautan dan perikanan di wilayah barat Indonesia. Selain berperan sebagai pusat kegiatan pendaratan ikan dan pelayanan kapal perikanan, PPS Bungus juga berkembang menjadi kawasan yang menarik bagi investasi, terutama di sektor pengolahan hasil perikanan, jasa pendukung pelabuhan, dan logistik.

Pada tahun 2024, perkembangan investasi di PPS Bungus menunjukkan tren positif, seiring dengan meningkatnya kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi kawasan ini. Berdasarkan data terkini, luas lahan industri yang telah dimanfaatkan oleh para investor di lingkungan PPS Bungus mencapai 9.098 meter persegi. Lahan tersebut digunakan untuk berbagai keperluan usaha yang mendukung aktivitas pelabuhan, seperti industri pengolahan ikan, penyimpanan dan distribusi hasil tangkapan, penyediaan kebutuhan logistik kapal, serta penyediaan fasilitas pendingin dan es.

Jumlah investor aktif yang beroperasi di PPS Bungus tercatat sebanyak 24 investor. Para investor ini berasal dari berbagai latar belakang usaha dan bidang industri yang terkait erat dengan sektor kelautan dan perikanan. Mereka berkontribusi dalam mendukung ekosistem usaha perikanan secara

menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Beberapa investor bergerak dalam bidang penyediaan bahan bakar kapal, pengolahan dan ekspor hasil laut, jasa transportasi dan bongkar muat, serta penyimpanan dingin (cold storage).

Keberadaan investasi ini tidak hanya berdampak terhadap peningkatan produktivitas pelabuhan, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperkuat ketahanan ekonomi maritim daerah. Selain itu, sinergi antara pengelola pelabuhan, pemerintah, dan sektor swasta terus ditingkatkan melalui fasilitasi perizinan, kemudahan berusaha, dan dukungan infrastruktur untuk menjaga iklim investasi yang kondusif.

Secara keseluruhan, PPS Bungus telah menunjukkan peran strategis sebagai kawasan pelabuhan yang tidak hanya menjadi pusat kegiatan perikanan tangkap, tetapi juga sebagai zona industri berbasis kelautan dan perikanan yang prospektif. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Tabel 63. Daftar Investor dan Lahan Industri Perikanan yang dimanfaatkan di PPS Bungus 2024

No	Nama Pengguna (Badan Usaha/Perorangan/Instansi)	Jenis Fasilitas/BMN Yang Digunakan	Nilai Perolehan BMN (Rp)
1	Meri Lenggo	Tanah dan Bangunan (Kios)	237.938.000
2	Amelia Fersi	Tanah dan Bangunan (Kios)	237.938.000
3	Yulmi	Tanah dan Bangunan (Kios)	237.938.000
4	Desria Shinta W	Tanah dan Bangunan (Kios)	237.938.000
5	Shilvia Okteviaanche Buggi	Tanah dan Bangunan (Kios)	237.938.000
6	Busnar	Tanah dan Bangunan (Kios)	237.938.000
7	Yetni	Tanah dan Bangunan (Kios)	237.938.000
8	Rosni	Tanah dan Bangunan (Kios)	237.938.000
9	Agusna Wati	Tanah dan Bangunan (Kios)	333.760.000
10	Syafridon	Tanah dan Bangunan (Kios)	333.760.000
11	Maiyeni	Tanah dan Bangunan (Kios)	333.760.000
12	Hardiyanto	Tanah dan Bangunan (Kios)	333.760.000
13	Elfia Fitri	Tanah dan Bangunan (Kios)	333.760.000
14	Anna Yulia	Tanah dan Bangunan (Kios)	333.760.000
15	Satrio Panjaitan	Tanah dan Bangunan (Kios)	333.760.000
16	Fitri Yanti	Tanah dan Bangunan (Kios)	333.760.000
17	Zainul Amri	Tanah dan Bangunan (Kios)	333.760.000
18	PT. Dani Tama Mina	Bangunan Permanen	1.175.115.358
19	PT. Dempo Andalas Samudera	Tanah/Lahan	95.834.815.000
20	PT. Amar Mandiri	Tanah/Lahan	95.834.815.000
21	Adrias Kecil	Tanah/Lahan	95.834.815.000
22	PT. Lintas Laut Samudera	Bangunan Permanen	1.175.115.358
23	KUD Mina Padang	Tangki BBM	22.707.969
24	Werry Erwin	Bangunan Permanen	27.553.252



2024

BAB 6

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

6.1. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

6.2. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Permasalahan yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan operasional dan pengelolaan PPS Bungus, masih dihadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang memengaruhi efektivitas pelayanan pelabuhan serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas. Beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi hingga tahun 2024 antara lain:

- 1 **Penurunan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelabuhan**
Beberapa fasilitas vital pelabuhan telah mengalami penurunan daya dukung karena telah melewati usia teknis ekonomisnya. Fasilitas tersebut mencakup dermaga, jetty, fender, tempat pembongkaran ikan, lampu penerangan kawasan pelabuhan, serta sarana pendukung lainnya.
- 2 **Ketiadaan Fasilitas Docking untuk Kapal >30 GT**
Hingga kini, PPS Bungus belum memiliki fasilitas docking atau slipway yang memadai untuk kapal dengan ukuran di atas 30 Gross Ton (GT). Hal ini menjadi kendala bagi pemilik kapal dalam melakukan perawatan dan perbaikan kapal (docking) secara efisien dan terjangkau di lokasi pelabuhan.
- 3 **Ketidakesesuaian Lokasi Pendaratan dengan Izin Pangkalan**
Masih terdapat kapal-kapal yang memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan mencantumkan PPS Bungus sebagai pangkalan pendaratan, namun tidak melakukan pendaratan ikan di PPS Bungus. Hal ini mengakibatkan terjadinya potensi kehilangan data produksi, berkurangnya potensi PNBPN, serta melemahkan pengawasan sumber daya ikan.
- 4 **Terbatasnya Sistem Digitalisasi dan Integrasi Data**
Sistem informasi dan pelayanan di pelabuhan belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Keterbatasan dalam sistem pelaporan, pencatatan hasil tangkapan, serta perizinan secara real-time berdampak pada lambatnya proses administrasi dan akurasi data statistik perikanan.

Upaya Pemecahan Masalah

Guna menjawab tantangan-tantangan tersebut dan meningkatkan kinerja PPS Bungus sebagai pelabuhan perikanan samudera yang modern dan berdaya saing, beberapa strategi dan solusi telah dan akan terus diupayakan, antara lain:

- 1 **Penataan Ulang dan Revitalisasi Sarana Prasarana Pelabuhan**
Melalui program pemeliharaan rutin, rehabilitasi, dan pengembangan infrastruktur pelabuhan, PPS Bungus terus berupaya memperbaiki kualitas layanan fisik pelabuhan. Perencanaan pembangunan dan revitalisasi difokuskan pada peningkatan kenyamanan, keamanan, serta efisiensi pelayanan.
- 2 **Penguatan Kemitraan Investasi Fasilitas Docking**
Mendorong partisipasi pihak ketiga dan investor strategis untuk membangun fasilitas docking kapal >30 GT. Skema kerja sama dapat dilakukan melalui pendekatan KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha), penyediaan insentif investasi, dan integrasi fasilitas industri galangan kapal di kawasan pelabuhan.
- 3 **Monitoring dan Evaluasi (Monev) SIPI serta Pengawasan Pendaratan**
Melakukan pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan terhadap kapal yang memiliki izin pendaratan di PPS Bungus. Koordinasi dengan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan DJPT diperkuat guna memastikan pelaksanaan kewajiban pendaratan ikan sesuai SIPI. Langkah ini juga didukung dengan penguatan sanksi administratif terhadap pelanggaran.
- 4 **Digitalisasi Layanan dan Integrasi Sistem Informasi**
Meningkatkan kualitas layanan melalui penerapan sistem digital dalam pengelolaan pelabuhan, seperti layanan berbasis aplikasi untuk pencatatan hasil tangkapan, perizinan, tracking kapal, dan monitoring kegiatan pelabuhan secara daring. Sistem ini juga akan menunjang transparansi dan efisiensi pelayanan.



2024

BAB 7

RENCANA PEMBANGUNAN

TAHUN 2025

- 7.1. LATAR BELAKANG**
- 7.2. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN**
- 7.3. ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN TERKINI**
- 7.4. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN**
- 7.5. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 2025**
- 7.6. RINGKASAN**

Latar Belakang

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan merupakan bagian strategis dari upaya pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan merata. Dalam konteks pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, pembangunan sektor ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, memperluas lapangan kerja, serta mendukung penguatan kedaulatan maritim Indonesia.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (PPS Bungus) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memiliki peran yang sangat penting sebagai simpul logistik perikanan, pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, dan penggerak industri perikanan skala lokal maupun nasional. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan PPS Bungus diarahkan untuk memperkuat daya saing, meningkatkan pelayanan publik, serta memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan dan lingkungan pesisir.

Visi dan Misi Pembangunan

Visi:

"Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Perikanan Terpadu yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Berwawasan Lingkungan."

Misi:

- Mengembangkan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang memadai, modern, dan ramah lingkungan.
- Meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah hasil tangkapan perikanan.
- Meningkatkan sistem informasi dan database perikanan yang terintegrasi dan berbasis digital.
- Mendorong kemitraan usaha dan investasi dalam pengelolaan pelabuhan perikanan.
- Menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan serta pelaku usaha perikanan lainnya.

Isu Strategis dan Tantangan Terkini

Berikut adalah isu-isu strategis dan tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan PPS Bungus tahun 2025:

- Keterbatasan Infrastruktur: Banyak fasilitas pelabuhan yang telah melewati usia teknis, termasuk dermaga, jetty, tempat pelelangan ikan (TPI), sistem drainase, fender, dan fasilitas listrik penerangan yang membutuhkan rehabilitasi atau penggantian.
- Belum Tersedianya Fasilitas Docking Kapal Besar: Saat ini belum tersedia fasilitas docking untuk kapal dengan ukuran di atas 30 GT, sehingga kapal-kapal tersebut harus melakukan docking di luar wilayah Sumatera Barat.
- Pelanggaran Pendaratan Ikan Sesuai SIPI: Masih banyak kapal yang tidak mendaratkan hasil tangkapan mereka di PPS Bungus meskipun telah memiliki izin pangkalan pendaratan ikan di pelabuhan ini.
- Kurangnya Fasilitas Pendukung Industri: Seperti gudang pendingin, gudang penyimpanan bahan baku, sistem pengolahan limbah, serta jalur distribusi logistik yang efisien.
- Terbatasnya Akses Pembiayaan dan Investasi: Terutama dari sektor swasta untuk pengembangan fasilitas komersial dan industri perikanan.
- Kurangnya Tenaga Kerja Terlatih dan Sertifikasi Profesi: Baik bagi nelayan, teknisi, tenaga pelabuhan, dan operator cold chain.

- Kurang Optimalnya Digitalisasi Sistem dan Layanan: Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pemantauan kapal, pencatatan hasil tangkapan, manajemen logistik, dan pelayanan administrasi.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan 2025

Rencana pembangunan PPS Bungus tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan pelabuhan perikanan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan layanan, penguatan daya saing, serta pemanfaatan teknologi.

Strategi Umum:

- Modernisasi infrastruktur fisik dan non-fisik pelabuhan.
- Penguatan peran pelabuhan sebagai simpul ekonomi dan logistik.
- Peningkatan nilai tambah produk perikanan melalui hilirisasi dan industri pengolahan.
- Digitalisasi sistem pelayanan pelabuhan.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perikanan dan perlindungan HAM perikanan.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas 2025

Kegiatan Fisik dan Infrastruktur

- Rehabilitasi Dermaga Utama dan Jetty: Penguatan struktur, penambahan kapasitas, dan peningkatan daya tahan terhadap abrasi dan perubahan iklim.
- Pembangunan Fasilitas Docking Kapal >30 GT: Pengadaan lahan dan pembangunan fasilitas docking untuk mendukung operasional kapal besar dan memperkuat pelayanan pelabuhan.
- Revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI): Perbaikan fasilitas lantai, drainase, sistem sanitasi, dan penambahan ruang pendingin untuk menjaga mutu hasil tangkapan.
- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Cold Storage: Termasuk peralatan pendukung, sistem pendingin, dan jaringan distribusi es.
- Pembangunan Sistem Drainase dan Penanganan Limbah: Untuk menjaga kebersihan lingkungan pelabuhan.
- Peningkatan Fasilitas Penunjang: Termasuk rumah dinas, gedung administrasi, pos keamanan, taman permanen, dan fasilitas publik lainnya.

Kegiatan Non-Fisik dan Penguatan Tata Kelola

- Pelatihan dan Sertifikasi SDM: Bagi nelayan, pengelola pelabuhan, teknisi perikanan, dan operator fasilitas pendukung.
- Digitalisasi Sistem Informasi Pelabuhan: Termasuk implementasi e-logbook, e-SIPI, SIMKADA, dan dashboard monitoring berbasis cloud.
- Monitoring dan Evaluasi (Monev) SIPI: Pemantauan pelaksanaan izin pendaratan ikan dan kerja sama dengan DJPT.
- Sosialisasi dan Edukasi HAM Perikanan: Peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya jaminan sosial, BPJS, dan Perjanjian Kerja Laut (PKL).
- Peningkatan Kemitraan dan Promosi Investasi: Mendorong investasi sektor swasta dan kerja sama industri pengolahan hasil laut.
- Pengembangan Ekosistem Ekonomi Maritim Lokal: Dukungan UMKM, koperasi nelayan, dan penguatan akses ke pasar lokal maupun ekspor.

Ringkasan

Rencana Pembangunan Tahun 2025 di PPS Bungus merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam memperkuat peran pelabuhan perikanan sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi maritim nasional dan daerah. Di tengah dinamika global yang menuntut efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan, PPS Bungus diarahkan untuk menjadi simpul strategis dalam rantai pasok perikanan nasional—tidak hanya sebagai tempat sandar kapal dan bongkar muat hasil tangkapan, tetapi juga sebagai pusat ekonomi terpadu yang mendukung industri perikanan hulu hingga hilir.

Pembangunan yang direncanakan tidak hanya bersifat fisik semata seperti rehabilitasi infrastruktur dan modernisasi fasilitas, tetapi juga mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta transformasi digital dalam sistem pelayanan pelabuhan. Hal ini dilakukan agar PPS Bungus dapat memberikan layanan yang cepat, transparan, dan terintegrasi, sekaligus mampu merespons perubahan kebutuhan pelaku usaha perikanan secara adaptif.

Dengan dukungan sumber daya yang memadai, sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan lembaga internasional, serta partisipasi aktif masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan, pembangunan pelabuhan diarahkan untuk menjadi katalisator peningkatan kesejahteraan nelayan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ketahanan pangan berbasis laut. PPS Bungus juga akan terus mendorong penerapan prinsip ekonomi biru (blue economy), efisiensi energi, serta perlindungan terhadap lingkungan pesisir dan ekosistem laut.

Ke depan, PPS Bungus siap untuk bertransformasi menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera yang modern, berdaya saing, dan tangguh terhadap tantangan global, seperti perubahan iklim, fluktuasi pasar dunia, serta tuntutan terhadap traceability dan kualitas produk perikanan. Pembangunan di tahun 2025 menjadi bagian dari langkah besar dalam mewujudkan pelabuhan yang mampu menunjang ekosistem industri perikanan terpadu berbasis teknologi dan keberlanjutan.

Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan pelayanan prima, PPS Bungus berkomitmen untuk berkontribusi nyata dalam mendukung visi besar Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, sekaligus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi biru di kawasan barat Indonesia.



2024

BAB 8

PENUTUP

- 8.1. KESIMPULAN
- 8.2. SARAN

Kesimpulan

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus selama tahun 2024, sebagai berikut:

- 1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**
Secara keseluruhan, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PPS Bungus tahun 2024 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Semua indikator utama yang ditetapkan berhasil terpenuhi, baik dari sisi pelayanan pelabuhan, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), maupun aspek pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan.
- 2 Realisasi Anggaran**
Realisasi keuangan berdasarkan alokasi anggaran dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar 99,69%, yang mencerminkan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Tingkat serapan anggaran ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah direalisasikan dengan efisien sesuai dengan prioritas pembangunan pelabuhan.
- 3 Peningkatan Aktivitas Pelabuhan dan Investasi**
Sepanjang tahun 2024, terjadi peningkatan aktivitas kapal dan volume hasil tangkapan yang didaratkan di PPS Bungus. Selain itu, terdapat kemajuan dalam penataan lahan industri dan peningkatan investasi, di mana sejumlah investor baru mulai tertarik untuk menanamkan modalnya, terutama pada sektor pengolahan dan penyimpanan ikan. Total lahan industri yang telah dimanfaatkan mencapai 9.098 m² dengan jumlah investor aktif sebanyak 24 entitas.
- 4 Permasalahan Teknis Masih Dihadapi**
Meskipun berbagai capaian telah diraih, beberapa permasalahan masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, seperti keterbatasan infrastruktur docking kapal di atas 30 GT, penurunan kondisi teknis beberapa fasilitas pelabuhan karena usia pakai, dan belum optimalnya pemanfaatan pangkalan pendaratan ikan oleh seluruh kapal yang memiliki SIPI PPS Bungus.
- 5 Komitmen Terhadap Transformasi Digital dan Inovasi**
Tahun 2024 juga menjadi titik awal penguatan sistem digitalisasi pelayanan pelabuhan yang lebih terintegrasi, termasuk penyusunan dashboard data aktivitas pelabuhan, pelaporan elektronik (e-reporting), serta penguatan sistem informasi berbasis cloud. Hal ini diharapkan mempercepat proses layanan dan meningkatkan transparansi tata kelola pelabuhan.

Saran

Untuk menunjang peningkatan kualitas pengelolaan dan operasional PPS Bungus ke depan, disampaikan beberapa saran berikut:

- 1 Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran dan Infrastruktur**
Diperlukan pengelolaan yang lebih maksimal terhadap kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat perikanan. Evaluasi berkala terhadap kualitas pekerjaan fisik juga harus terus dilakukan.
- 2 Penguatan Koordinasi Lintas Sektor**
Dukungan dari instansi terkait seperti Pemerintah Daerah, Pertamina, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kota, serta lembaga logistik sangat diperlukan untuk mendukung penguatan rantai pasok dan revitalisasi industri perikanan, khususnya tuna di Sumatera Barat.
- 3 Peningkatan Kegiatan Promosi dan Investasi**

Promosi aktif terhadap peluang investasi harus dilakukan secara sistematis, baik melalui forum bisnis, media sosial, maupun jejaring digital. Kepastian hukum dan kemudahan perizinan juga harus dipastikan untuk menarik lebih banyak investor.

4 Pengembangan SDM dan Sistem Pelayanan Digital

Diperlukan peningkatan kapasitas SDM pelabuhan melalui pelatihan dan sertifikasi, khususnya dalam pelayanan kepelabuhanan dan teknologi informasi. Sistem pelayanan digital juga harus dikembangkan agar mampu menyediakan layanan cepat, efisien, dan berbasis data.

5 Monitoring dan Evaluasi Pendaratan Ikan

Perlu intensifikasi pemantauan terhadap kapal yang memiliki SIPI PPS Bungus, agar pendaratan ikan benar-benar dilakukan di pelabuhan sesuai izin. Hal ini penting untuk mendukung transparansi, akurasi data produksi, serta peningkatan PNBP.

Penutup

Demikian Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja, penggunaan anggaran, serta evaluasi atas capaian kinerja dan tantangan yang dihadapi selama tahun berjalan. Laporan ini diharapkan menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan, perencanaan strategis, serta pengembangan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang lebih baik dan berkelanjutan ke depan.

Seiring dengan dinamika global di sektor kelautan dan perikanan, termasuk dampak perubahan iklim, tuntutan digitalisasi, serta tantangan pasar ekspor yang semakin kompetitif, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dituntut untuk mampu bertransformasi menjadi pelabuhan yang modern, adaptif, inklusif, serta tetap berpijak pada prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat perikanan.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi biru (*blue economy*) di kawasan barat Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Dengan posisi geografis yang strategis, didukung oleh SDM pelabuhan yang terus berkembang, serta sinergi dengan pemangku kepentingan, pelabuhan ini diharapkan mampu:

- Meningkatkan efisiensi rantai pasok perikanan, melalui penguatan infrastruktur, pelayanan logistik, dan fasilitas pendingin (*cold chain*) yang mumpuni;
- Menjadi pusat hilirisasi produk perikanan yang mampu memberikan nilai tambah dan daya saing di pasar domestik maupun internasional;
- Menjadi contoh penerapan digitalisasi layanan pelabuhan, dengan sistem informasi yang terintegrasi dan transparan untuk pelayanan kapal, pendaratan ikan, perizinan, dan monitoring aktivitas pelabuhan;
- Menjadi pelabuhan inklusif, yang memberikan ruang bagi pemberdayaan nelayan kecil, koperasi perikanan, pelaku UMKM, serta pelibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi perikanan;
- Berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan, dengan menerapkan prinsip perikanan yang bertanggung jawab, mendorong kepatuhan terhadap izin SIPI/SIKPI, serta penguatan sistem pelaporan hasil tangkapan.

Untuk mewujudkan semua itu, dibutuhkan dukungan lintas sektor yang konsisten: dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, perguruan tinggi, serta komunitas masyarakat

perikanan. Kolaborasi dan partisipasi aktif semua pihak akan menjadi fondasi utama dalam membangun pelabuhan perikanan yang tidak hanya fungsional secara fisik, tetapi juga berdaya secara sosial dan ekonomi.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus percaya bahwa pelabuhan bukan hanya tempat berlabuh kapal, tetapi juga tempat berlabuhnya harapan dan masa depan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, segala program dan kebijakan harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan nelayan, penciptaan lapangan kerja, serta pelestarian ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sepanjang tahun 2024. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan, mitra kerja, serta seluruh masyarakat kelautan dan perikanan dalam mewujudkan visi bersama: Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang maju, adil, dan berkelanjutan.

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NO	PEGAWAI		PANGKAT		JABATAN		TIM KERJA		PENDIDIKAN AKHIR	
	NIP	NAMA PEGAWAI TEMPAT/TANGGAL LAHIR	GOL/ RU	TMT	NAMA	TMT	NAMA	MASA KERJA GOL	NAMA	PROGRAM STUDI
1	197101071999031002	WIDODO, S.Pi, M.Sc JAKARTA/07-01-1971	IV/c	01-04-2025	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	03-06- 2022	-	26 Tahun 1 Bulan	S2	Fisheries Management
2	196509301999031001	Ir SUHADI, M.Si JOMBANG/30-09-1965	IV/b	01-10-2023	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya	22-10- 2020	Operasional Pelabuhan	29 Tahun 0 Bulan	S2	Sumber Daya Perairan Pesisir & Kelautan
3	197703192005022001	MELLY MASRUL, S.Pi, M.Si PADANG/19-03-1977	IV/a	01-04-2018	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda	22-10- 2020	Tata Kelola Sarana Prasarana	20 Tahun 2 Bulan	S2	Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan
4	198604052009011001	BAYU EKO WIBOWO, S.St.Pi MAGELANG/05-04-1986	IV/a	01-04-2024	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	22-10- 2020	Dukungan Manajerial	16 Tahun 3 Bulan	D4	Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan
5	198111042005021001	RISDIANTO, S.Kom SUNGAIPENUH/04-11-1981	III/d	01-04-2017	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	22-10- 2020	Dukungan Manajerial	22 Tahun 2 Bulan	S1	Sistem Informasi
6	197101012006041019	SYAHRUROMADAN HSB, S.Pi BENGKALIS/01-01-1971	III/d	01-04-2018	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda	22-10- 2020	Operasional Pelabuhan	26 Tahun 0 Bulan	S1	Manajemen Sumber Daya Perairan
7	197101161998032001	YANTI MURNI, S.H PADANG/16-01-1971	III/d	01-10-2020	Arsiparis Muda	29-12- 2021	Dukungan Manajerial	28 Tahun 0 Bulan	S1	Ilmu Hukum
8	198703052011011001	MUHAMMAD DEDE.S, S,.St.Pi SOLOK/05-03-1987	III/d	01-04-2021	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda	22-10- 2020	Pelayanan Usaha	14 Tahun 3 Bulan	D4	Permesinan Perikanan
9	198310282014071001	MOL ISRALMAHADIA, SE MANDONGA/28-10-1983	III/c	01-10-2024	Penata Perizinan Ahli Pertama	20-12- 2024	Pelayanan Usaha	20 Tahun 3 Bulan	S1	Manajemen
10	197102212000031002	HERDANI WIDI SUPRIYO INDRAGIRI/21-02-1971	III/b	01-04-2020	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Mahir	01-04- 2021	Pelayanan Usaha	25 Tahun 11 Bulan	SLTA	-
11	197306222000032002	EVASUSANTI KELLABUHANTAROK/22-06-1973	III/b	01-04-2020	Pranata Keuangan Apbn Terampil	19-03- 2021	Dukungan Manajerial	26 Tahun 8 Bulan	SLTA	-

NO	PEGAWAI		PANGKAT		JABATAN		TIM KERJA		PENDIDIKAN AKHIR	
	NIP	NAMA PEGAWAI TEMPAT/TANGGAL LAHIR	GOL/ RU	TMT	NAMA	TMT	NAMA	MASA KERJA GOL	NAMA	PROGRAM STUDI
12	197312212002121002	GAZALI, S.Ak PADANG/21-12-1973	III/b	01-04-2023	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	06-05- 2024	Dukungan Manajerial	23 Tahun 0 Bulan	S1	Akuntansi
13	198510152019022006	YORA ARUNGLA`BI, S.Pi. UJUNG Pandang/15-10-1985	III/b	01-10-2023	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama	10-02- 2021	Operasional Pelabuhan	9 Tahun 1 Bulan	S1	Manajemen Sumber Daya Perairan
14	199411272022032005	UKHI WERDI PRATAMI, S.Pi BOYOLALI/27-11-1994	III/a	01-03-2023	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama	11-08- 2023	Operasional Pelabuhan	3 Tahun 1 Bulan	S1	Manajemen Sumberdaya perikanan
15	199410282020121006	DANU PRASETYO, A.Md BOGOR/28-10-1994	II/d	01-10-2023	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	01-01- 2024	Dukungan Manajerial	9 Tahun 2 Bulan	D3	Perdagangan Internasional Wilayah Asean dan RRT
16	199509262020122001	RIZKI DIAN PRATIDANASTI, A.Md SLEMAN/26-09-1995	II/d	01-04-2024	Arsiparis Pelaksana	09-09- 2022	Dukungan Manajerial	7 Tahun 4 Bulan	D3	Ekonomika Terapan
17	199611102019021002	IKHSAN FAZILLAH PIDIE/10-11-1996	II/b	01-10-2022	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil	01-06- 2022	Pelayanan Usaha	6 Tahun 2 Bulan	SLTA	-
18	196804241998032002	Ir JOSNAWATI, M.Si KOTOSANI/24-04-1968	IV/a	01-04-2014	Penelaah Pengembangan Usaha	01-01- 2021	Pelayanan Usaha	27 Tahun 1 Bulan	S2	Sumber Daya Perairan Pesisir & Kelautan
19	196805301994032001	Ir HEWILDA PADANGPANJANG/30-05-1968	IV/a	01-10-2017	Analisis Kesyahbandaran	01-01- 2021	Kesyahbandaran	31 Tahun 1 Bulan	S1	Manajemen Sumber Daya Perairan
20	196910231998032003	ERNAWATI, S.Sos PADANG/23-10-1969	III/d	01-04-2018	Analisis Keuangan	01-01- 2021	Dukungan Manajerial	26 Tahun 8 Bulan	S1	Ilmu Administrasi Negara
21	197104201998032004	ELVA TRIANDY, S.Sos PADANG/20-04-1971	III/d	01-04-2018	Pengelola Penataan Sarana Dan Prasarana	01-01- 2021	Tata Kelola Sarana Prasarana	28 Tahun 0 Bulan	S1	Ilmu Administrasi Negara
22	198702122009121002	WISNU SYAFRIANSYAH, S.St.Pi LAHAT/12-02-1987	III/d	01-04-2022	Syahbandar Pelabuhan Perikanan	01-08- 2024	Kesyahbandaran	15 Tahun 4 Bulan	D4	Teknologi Penangkapan Ikan
23	196808122000031001	HAMDANI PADANG/12-08-1968	III/b	01-04-2020	Pengelola Layanan Operasional	01-01- 2021	Pelayanan Usaha	25 Tahun 3 Bulan	SLTA	-
24	196907052000031003	KAHARUDDIN SAHLI NASRUL KUDUS/05-07-1969	III/b	01-04-2020	Pengelola Data	01-01- 2021	Operasional Pelabuhan	26 Tahun 3 Bulan	SLTA	-

NO	PEGAWAI		PANGKAT		JABATAN		TIM KERJA		PENDIDIKAN AKHIR	
	NIP	NAMA PEGAWAI TEMPAT/TANGGAL LAHIR	GOL/ RU	TMT	NAMA	TMT	NAMA	MASA KERJA GOL	NAMA	PROGRAM STUDI
25	197804042000031004	MUDANCE SYAFRI PADANG/04-04-1978	III/b	01-04-2020	Pengelola Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan	01-01- 2021	Kesyahbandaran	21 Tahun 6 Bulan	SLTA	-
26	197210182000032003	NETTI HAMIDAH KUDUS/18-10-1972	III/b	01-04-2020	Pengelola Keuangan	01-01- 2021	Dukungan Manajerial	26 Tahun 11 Bulan	SLTA	-
27	196810211998031004	RAHMAN PADANG/21-10-1968	III/b	01-10-2022	Pengelola Layanan Operasional	01-01- 2021	Pelayanan Usaha	28 Tahun 0 Bulan	SLTA	-
28	197310081998031002	MARJOHAN KARAKBATU/08-10-1973	III/b	01-10-2022	Pengelola Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan	01-01- 2021	Kesyahbandaran	22 Tahun 11 Bulan	SLTA	-
29	196706251998031002	JAMALUDIN SENGKEMANG/25-06-1967	III/b	01-10-2022	Pengelola Penataan Sarana Dan Prasarana	01-11- 2023	Tata Kelola Sarana Prasarana	22 Tahun 8 Bulan	SLTA	-
30	197403122002122001	ELFIANTI PADANG/12-03-1974	III/b	01-04-2023	Pengelola Data	01-01- 2021	Operasional Pelabuhan	24 Tahun 11 Bulan	SLTA	-
31	197108072002121001	GUSLIMAN LABUHANTAROK/07-08-1971	III/b	01-04-2023	Pengelola Barang Milik Negara	01-01- 2022	Dukungan Manajerial	23 Tahun 0 Bulan	SLTA	-
32	199306182019021005	RIYANDA SAYUZA KASUMA, S.S.t.Pi SUNGAI PENUH/18-06-1993	III/b	01-04-2023	Syahbandar Pelabuhan Perikanan	01-11- 2023	Kesyahbandaran	6 Tahun 2 Bulan	D4	Teknologi Penangkapan Ikan
33	196703131999031001	ERI SUPARJAN LABUHAN/13-03-1967	III/a	01-10-2022	Pengelola Layanan Operasional	01-11- 2023	Pelayanan Usaha	31 Tahun 0 Bulan	SLTA	-
34	196803272002121001	DASRIL PADANG/27-03-1968	II/d	01-04-2023	Pengelola Layanan Operasional	01-01- 2021	Pelayanan Usaha	29 Tahun 8 Bulan	SLTA	-
35	197301092005021001	BAKRI Y PADANG/09-01-1973	II/d	01-04-2025	Pengelola Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan	01-11- 2023	Kesyahbandaran	17 Tahun 2 Bulan	SLTA	-
36	198310092022211001	CECEP AHMAD ROHIMAT, S.St.Pi GARUT/09-10-1983	-	-	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama	01-01- 2022	Kesyahbandaran	-	SLTA	Teknologi Penangkapan Ikan
37	198709112022211001	RINO SETIYAWAN PANJANGBANDARLAMPUNG/11-09- 1987	-	-	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	01-01- 2022	Pelayanan Usaha	-	SLTA	-
38	197807192023212013	YULI SETIANINGSIH, S.Pi TEGAL/19-07-1978	-	-	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama	01-07- 2023	Pelayanan Usaha	-	S1	Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan

NO	PEGAWAI		PANGKAT		JABATAN		TIM KERJA		PENDIDIKAN AKHIR	
	NIP	NAMA PEGAWAI TEMPAT/TANGGAL LAHIR	GOL/ RU	TMT	NAMA	TMT	NAMA	MASA KERJA GOL	NAMA	PROGRAM STUDI
39	198801292023211009	PARNANDES PADANG/29-01-1988	-	-	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	01-07- 2023	Tata Kelola Sarana Prasarana	-	SLTA	-
40	198812082023211021	RIDLO IQBAL, S.St.Pi. LAMPUNG SELATAN/08-12-1988	-	-	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama	01-07- 2023	Tata Kelola Sarana Prasarana	-	D4	Penyuluhan Perikanan
41	198910122023211022	IBNU ARIFIN, S.ST.Pi. BENGKULU UTARA/12-10-1989	-	-	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama	01-07- 2023	Kesyahbandaran	-	D4	Penyuluhan Perikanan
42	199109192023211010	MAULANA RASDIO PADANG/19-09-1991	-	-	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	01-07- 2023	Pelayanan Usaha	-	SLTA	-
43	199410292023211007	INDRA SAPUTRA, S.Tr.Pi. MUKOMUKO/29-10-1994	-	-	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama	01-07- 2023	Kesyahbandaran	-	D4	Teknologi Penangkapan Ikan
44	199502182023211012	IRSAN MAULANA PADANG/18-02-1995	-	-	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	01-07- 2023	Kesyahbandaran	-	SLTA	-
45	199702172023211010	IKHSAN KURNIAWAN, S.Pi JAMBI/17-02-1997	-	-	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama	01-07- 2023	Operasional Pelabuhan	-	S1	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
46	198308172023211017	ARIE BAINdra, S.I.P. ROKAN HILIR/17-08-1983	-	-	Arsiparis Pertama	01-11- 2023	Dukungan Manajerial	-	S1	-
47	198605092023211019	ARISYAH PUTRA, A.Md PADANG/09-05-1986	-	-	Pranata Komputer Terampil	01-11- 2023	Dukungan Manajerial	-	D3	-
48	199104062023211020	ALI HUSIN ROMA. MS LAMPUNG UTARA/06-04-1991	-	-	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	01-11- 2023	Operasional Pelabuhan	-	SLTA	-
49	199308232023212057	LUSI GUSMA NINGSI, S.Kom PADANG/23-08-1993	-	-	Pranata Komputer Pertama	01-11- 2023	Dukungan Manajerial	-	S1	-
50	199603232024211001	ERVIN SAIFUL RIZAL, A.Md.Pi PATI/23-03-1996	-	-	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil	01-03- 2024	Operasional Pelabuhan	-	D3	-
51	199701092024212003	DEFI ANGRAINI KOMALASARI, S.Pi MUARO JAMBI/09-01-1997	-	-	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama	01-03- 2024	Pelayanan Usaha	-	S1	-

NO	PEGAWAI		PANGKAT		JABATAN		TIM KERJA		PENDIDIKAN AKHIR	
	NIP	NAMA PEGAWAI TEMPAT/TANGGAL LAHIR	GOL/ RU	TMT	NAMA	TMT	NAMA	MASA KERJA GOL	NAMA	PROGRAM STUDI
52	199909092024211001	AHMAD RIYADHI SOLIHIN, A.Md.Pi KARAWANG/09-09-1999	-	-	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil	01-03- 2024	Tata Kelola Sarana Prasarana	-	D3	-
53	14001	META NOVIA IDOLA, S.E. Padang/22-11-1993	-	-	Pramubakti	06-01- 2014	Dukungan Manajerial	-	S1	Manajemen
54	14023	JEFRI OKTAVIANDI PADANGPANJANG/14-10-1991	-	-	Pramubakti	01-10- 2010	Pelayanan Usaha	-	SLTA	-
55	16688	RISDAYANI, S.M. SERBATUNG/06-08-1989	-	-	Pramubakti	02-01- 2015	Dukungan Manajerial	-	S1	Manajemen
56	19049	SIWET, S.Pi Taratak/20-06-1989	-	-	Pramubakti	01-09- 2014	Tata Kelola Sarana Prasarana	-	S1	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
57	19052	AFDIWAL CANIAGO, S.Pi Sibolga/10-07-1992	-	-	Pramubakti	01-09- 2014	Pelayanan Usaha	-	S1	Budidaya Perairan
58	19056	MUHAMAD FIRDAUS, S.Pi Padang/16-11-1991	-	-	Pramubakti	01-09- 2014	Pelayanan Usaha	-	S1	Budidaya Perairan
59	19057	YOGI MAULANA, S.Pi Medan/14-10-1992	-	-	Pramubakti	01-06- 2016	Dukungan Manajerial	-	S1	Budidaya Perairan
60	23790	FEBRI, S.KOM PADANG/01-02-1994	-	-	Pramubakti	02-01- 2019	Dukungan Manajerial	-	S1	Sistem Informasi
61	23791	MUHAMAD BAYU, S.T BUKITTINGGI/15-03-1996	-	-	Pramubakti	02-01- 2019	Tata Kelola Sarana Prasarana	-	S1	Teknik Sipil
62	102543	TEDI AGUSTIAN, S.E.,M.M PADANG/23-08-1997	-	-	Sekretaris Pimpinan	01-01- 2022	Dukungan Manajerial	-	S2	Magister Management
63	102542	FAHRUL RAHMADI, A.Md PADANG/29-02-2000	-	-	Petugas Layanan Informasi	01-01- 2022	Dukungan Manajerial	-	D3	Statistika

**REKAPITULASI PEMANFAATAN LAHAN
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
TAHUN 2024**

TAHUN PENGADAAN	URAIAN KEGIATAN	VOLUME LUAS											
		KETERSEDIAAN LAHAN						PEMANFAATAN					
A	LUAS AREA PELABUHAN												
1989	1 Tanah bangunan kantor permanen	140.380	x	1	=	140.380	m2						
1995	2 Tanah hasil reklamasi	61.402	x	1	=	35.770	m2						
B	PEMANFAATAN LAHAN STAKEHOLDER												
	1 PT. Dani Tama Mina										2.037	m2	
2006	2 PT. Dempo Andalas Samudera										6.700	m2	
	3 PT. Amar Mandiri										918	m2	
	4 KUD. Mina Padang/sewa tanki										100	m2	
	5 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK.										10	m2	
	6 Adrias Kecil										100	m2	
	7 Werry Erwin										78	m2	
	8 Andy Syahputra										682	m2	
	9 PT. Lintas Laut Samudera										422	m2	
2024	10 PT. Bespi Samudera Aquatic										96	m2	
	11 Koperasi DW PPS Bungus										99	m2	
	12 Kantor Satker PSDKP										500	m2	
	13 Kantor BLPPMHP										500	m2	
	14 Mess Kapal HIU										250	m2	
2011	15 Kantor LPSDKP										1.000	m2	
2013	16 Mess PSDKP							12	x	13	=	156	m2
C	ASET												
1991	1 Balai Pertemuan Nelayan							19,10	x	11,80	=	225	m2
	(Dialihfungsikan untuk gedung										=	-	m2
	Satker BRKP)										=	-	m2

TAHUN PENGADAAN	URAIAN KEGIATAN	VOLUME LUAS											
		KETERSEDIAAN LAHAN						PEMANFAATAN					
1991	2 Pos Jaga depan										=	-	m2
1991	3 Rumah Kepala Pelabuhan										=	-	m2
1991	4 Rumah Dinas Tipe C										=	-	m2
1991	5 Rumah Dinas Tipe D										=	-	m2
1991	6 Kantor Administrasi							270	x	1	=	270	m2
1991	7 Kantor Bengkel							250	x	1	=	250	m2
1991	8 Tempat Penginapan Nelayan							319	x	1	=	319	m2
1991	9 Tempat Peribadatan							50	x	1	=	50	m2
1991	10 MCK							50	x	1	=	50	m2
1991	11 Tandon Air Metal							100	x	1	=	100	m2
1991	12 Tangki Air + Instalasi							1.522	x	1	=	1.522	m2
1991	13 Ground Reservoir Air							350	x	1	=	350	m2
1991	14 Bak Pengolahan Air							169	x	1	=	169	m2
	15 Pabrik Es (swasta)							1522	x	1	=	1.522	m2
	16 Kolam Pemancingan							1300	x	1	=	1.300	m2
1991	17 Receiving Hall & Tempat Processing							96,6	x	36,9	=	3.565	m2
1991	18 Galangan Kapal							60	x	52	=	3.087	m2
1991	19 Hanggar Vessel Lift							80	x	1	=	80	m2
1991	20 Tempat perbaikan jaring/Net loft							53,8	x	14	=	753	m2
1991	21 Gedung Pengepakan							30,1	x	20	=	602	m2
1991	22 Jalan Utama							662	x	7	=	4.633	m2
1991	23 Jalan Kompleks							265	x	5	=	1.323	m2
1994	24 Pos Pelayanan Terpadu										=	-	m2
2002	25 Drainase							220	x	1	=	220	m2
2005	26 Mess Tamu										=	-	m2
2005	27 Pos Jaga Pintu Gerbang										=	-	m2
2005	28 Pos Jaga Pas Masuk										=	-	m2
2005	29 Pos Jaga depan kantor Administrasi										=	-	m2
2005	30 Kios BAP Tahap I :							250	x	1	=	250	m2
2006	31 Jalan Lingkungan I							146	x	420	=	61.320	m2
2006	32 Jalan Lingkungan II							165	x	4,7	=	777	m2

TAHUN PENGADAAN	URAIAN KEGIATAN	VOLUME LUAS													
		KETERSEDIAAN LAHAN					PEMANFAATAN								
2006	33 Transit Sheed						40,9	x	5,2	=	213	m2			
2006	34 Kios BAP Tahap II :						250	x	1	=	250	m2			
2006	35 Gudang Kantor						30	x	1	=	30	m2			
2009	36 Gedung Prosessing tuna						59	x	10	=	590	m2			
2011/2012	37 Gudang Kantor Administrasi PP tahap						800	x	1	=	800	m2			
2011	38 MASJID						160	x	1	=	160	m2			
2012	39 Perluasan Masjid									=	250	m2			
2012	40 Landscape Kantor ADPEL									=	1.000	m2			
2013	41 Jalan inspeksi di Gedung dry ice									=	150	m'			
2013	42 Peningkatan jalan di gedung prosesing tuna									=	215	m'			
2013	43 Pembangunan Water treatment dan sumur bor berikut instalasinya									=	400	M2			
TOTAL							176.150	m2						88.942	m2
SISA LAHAN YANG MASIH BISA DIMANFAATAKAN							87.208	m2							

**DATA SARANA DAN PRASARANA
DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
TAHUN 2024**

1. FASILITAS POKOK

No	FASILITAS		Unit /Kapasitas	Tahun Pengadaan	Kondisi	Keterangan
A	Areal Pelabuhan		22 Ha		Baik	
	a.	Tanah sertifikat	140,380 m ²	1989	Baik	
	b.	Tanah reklamasi	61,402 m ²	1995	Baik	
	c.	Tanah DKP Prop Sumatera Barat	2 ha		Baik	
	d.	Lahan industri	7,5 ha		Baik	
	e.	Difungsikan pihak ke-3	1,4 ha		Baik	
	f.	Lahan belum dimanfaatkan	6,1 ha		Baik	
B	Kolam Pelabuhan		4 ha		Baik	
	a.	Alur pelayaran			Baik	
C	Dermaga					
	a.	Dermaga bongkar (100 m x 15 m)	1500 m ²	1989	Baik	
	b.	Dermaga bunker (10 m x 36 m)	360 m ²	1989	Baik	
	c.	Dermaga tambat (180 x 4 m)	720 m ²	1989	Baik	
	d.	Dermaga jetty II (100 m x 8 m)	800 m ²	2000	Baik	
D	Jalan				Baik	
	a.	Jalan utama	6.220 m ²		Baik	
	b.	Jalan komplek	464 m ²		Baik	
	c.	Jalan lingkungan I	621 m ²		Baik	
	d.	Jalan lingkungan II	254 m ²		Baik	
	e.	Jalan Inspeksi di Gedung Dry Ice	150 m ²	2013	Baik	
	f.	Jalan Inspeksi di Gedung Processing Tuna	215 m ²	2013	Baik	
E	Drainase dibelakang kantor administrasi		220 m²		Baik	
F	Drainase di gedung Dry Ice		200 m²		Baik	
G	Gorong-gorong		1 paket		Baik	

2. FASILITAS FUNGSIONAL

No	FASILITAS	Unit /Kapasitas	Tahun Pengadaan	Kondisi	Pemanfaatan (sudah/belum) dimanfaatkan
1	Kantor				
	- Kantor administrasi	270 m2		Baik	
	- Kantor bengkel	260 m2		Baik	
	- Kantor KP	30 m2		Baik	
	- Kantor BLPPMHP	250 m2		Baik	
	- Kantor P2SDKP	304 m2		Baik	
	- Kantor LPSDKP	1.274 m2		Baik	
	- Kantor administrasi Pelabuhan	800 m2	2011-2012	Baik	
	- Landscape Kantor administrasi Pelabuhan	1.000 m2	2012	Baik	
2	Receiving Hall	3.342 m2		Baik	
3	Gedung Processing Tuna	450 m2		Baik	
4	Transit Sheet	212,68 m2		Baik	
5	Keranjang ikan Kapasitas 50 Kg	200 unit		Baik	
6	Fish box				
	- Kapasitas 2 ton	4 unit		Baik	
	- Kapasitas 1 ton	6 unit		Baik	
	- Kapasitas 250 kg	25 unit		Baik	
7	Ice Cruiser	1 unit		Baik	
8	Kereta dorong	2 unit		Baik	rusak
9	Mesin packing box	1 unit		Baik	
10	Galangan kapal/hanggar terbuka	2.500 m2		Baik	
11	Vessel lift	1 unit		Baik	
12	Hanggar vessel lift	80 m2		Baik	
13	Fork lift	3 unit		Baik	1 disel x2 metrik
14	Net loft/tempat perbaikan jaring	525 m2		Baik	

15	Gedung dry ice	825 m2		Baik	
16	Tandon air metal	100 m2		Baik	
17	Tanki air + instalasi	1.522 m2		Baik	
18	Ground recevoir air	350 m2		Baik	
19	Bak pengolahan air	169 m2		Baik	
20	Bangunan intake	10 ltr/detik		Baik	
21	Sumur artesis + instalasinya	1 paket	2009	Baik	
	- Water treatmen dan Sumur Bor 1	1 paket	2013	Baik	
22	Mersin Bubut	1 unit		Baik	
23	Pabrik Es DANITAMA	1.522 m2		Baik	
24	Coldstorage	3.940 m ²	2018	Baik	
25	Genset				
	- Genset 35 KVA	1 unit		Baik	
	- Genset 15 KVA	1 unit		Baik	
26	Jaringan listrik PLN	550 KVA		Baik	
27	Tangki BBM + Instalasinya	75 m3		Baik	
28	Hidrant	3 unit		Baik	rusak
29	Lampu suar	2 unit		Baik	
30	Rambu-rambu				
	- Papan pengumuman	7 unit		Baik	
	- Papan petunjuk	4 unit		Baik	
	- Papan perhatian	3 unit		Baik	
	- Portal	2 unit		Baik	
31	CCTV	2 unit		Baik	
32	SSB	1 unit		Baik	
33	Jaringan LAN	1 paket		Baik	
34	Telepon	3 unit		Baik	

3. FASILITAS PENUNJANG

No	FASILITAS	Unit /Kapasitas	Tahun Pengadaan	Kondisi	Pemanfaatan (sudah/belum) dimanfaatkan
1	Balai pertemuan nelayan	243 m2		Baik	
2	Mess tamu	1 unit		Baik	
3	Pos				
	- Pos jaga pintu gerbang	1 unit		Baik	
	- Pos jaga depan	1 unit		Baik	
	- Pos jaga masuk	1 unit		Baik	
	- Pos jaga depan kantor administrasi	1 unit		Baik	
	- Pos pelayanan terpadu	1 unit		Baik	
4	Rumah				
	- Rumah kepala pelabuhan	1 unit		Baik	
	- Rumah dinas tipe C	9 unit		Baik	
	- Rumah dinas tipe D	8 unit		Baik	
5	Tempat peribadatan	50 m2		Baik	
	Tempat peribadatan/Masjid 2	160 m2	2011	Baik	
	Perluasan Masjid	250 m2	2012	Baik	
6	Kios BAP				
	- Kios BAP tahap I	250 m2		Baik	
	- Kios BAP tahap II	250 m2		Baik	
7	MCK	50 m2		Baik	
8	Kendaraan				
	a. Roda 4			Baik	
	- Toyota Kijang/LSX	1 unit		Baik	
	- Nissan . Z 24 Terano Spirit	1 unit		Baik	
	- Toyota Kijang pickup	1 unit		Rusak Berat	
	- Toyota Kijang Komando	1 unit		Rusak Berat	

-	Mitsubishi Micro Bus FE 304	1 unit	Baik
-	Nissan Grand Livina 1,8	1 unit	Baik
-	Ford Everes	1 unit	Baik
-	Kijang Inova Diesel 2,5	1 unit	Baik
-	Rush 1,5 M/T	1 unit	Baik
-	Toyota Avanza Veloz 1,3	1 unit	Baik
-	Honda HRV	1 unit	Baik
-	Mitsubishi L200 PU. 4x2	1 unit	Baik
-	Ford Ranger 4x2. 2,5	1 unit	Baik
-	Toyota Hilux Pick Up	1 unit	Baik
-	Isuzu Box Berefrigasi	1 unit	Baik
b. Roda 3			
-	Viar VR 150 3 R	1 unit	Baik
-	Nasha NSR 315 A	1 unit	Baik
-	Motora/Alat Angkut Sampah	2 unit	Baik
-	Motora Yanmar	1 unit	Baik
c. Roda 2			
-	Yamaha RX King	1 unit	Baik
-	Suzuki FD 125 XRM	1 unit	Baik
-	Honda Supra X 125 D	2 unit	Baik
-	Suzuki EN. 125/Thander	2 unit	Baik
-	Honda CS 1	1 unit	Baik
-	Honda Supra X NF 125 TR M/T	1 unit	Baik
-	Honda NF 12A 1CF M/T	1 unit	Baik
-	Honda Supra X 125 PGM F1 NF 12A 1CF M/T	3 unit	Baik
-	Honda New Vario 110F1	2 unit	Baik
-	Honda Supra X 125 CW F1	3 unit	Baik
-	Honda Revo CW F1	2 unit	Baik

	-	Yamaha Vino 125 BJ8/Fino	1 unit		Baik	
	-	Yamaha N-Max 2DP Non ABS/NMAX	1 unit		Baik	
	-	Yamaha Mio M3 125 SE88/Mio	4 unit		Baik	
	-	Yamaha Aerox	1 unit		Baik	
9	K3					
	-	Mesin pemotong rumput	20 unit		Baik	
	-	Motora	2 unit		Baik	
	-	Bak sampah	2 unit		Baik	
	-	Mesin penyemprot rumput	1 unit		Baik	
10	Timbangan					
	-	Kapasitas 1 ton	1 unit		Baik	
	-	Kapasitas 100 kg	1 unit		Baik	
11	Pagar keliling		4.000 m2		Baik	
12	Kolam pemancingan		1.300 m2		Baik	
13	Sound system		1 unit		Baik	